

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian ini berfokus pada analisis peran kebijakan sekolah dalam mengurangi angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Tawuran pelajar merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang mendalam untuk memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, pendekatan yang mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam sangat diperlukan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (Fadli, 2021), penelitian kualitatif dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada hasil pengamatan terhadap manusia dan lingkungannya secara bahasa dan istilah. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang lebih deskriptif dan biasanya menggunakan analisis (Wekke & dkk, 2019). Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif, naratif, dan interpretatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman konteks dan makna subjektif yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Menurut Lawrance (Neuman, 2018), penelitian studi kasus adalah penelitian yang mempelajari berbagai macam data tentang beberapa kasus selama satu atau lebih periode waktu yang berbeda. Penelitian studi kasus adalah jenis penelitian yang menyelidiki suatu masalah dalam batas-batas tertentu, melakukan pengumpulan data mendalam, dan menggunakan berbagai informasi. Penelitian ini terbatas dalam ruang dan waktu, dan kasus yang diselidiki dapat berupa program, kejadian, kegiatan, atau individu.

John W. Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* menjelaskan tiga jenis studi kasus, yaitu (Creswell, 2007):

1. Studi Kasus Intrinsik (*Intrinsic Case Study*) dilakukan ketika peneliti memiliki minat yang mendalam pada suatu kasus tertentu dan ingin memahami kasus tersebut secara mendalam tanpa niat untuk menggeneralisasi hasilnya ke konteks lain.
2. Studi Kasus Instrumental (*Instrumental Case Study*) dilakukan ketika peneliti menggunakan suatu kasus tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu atau fenomena yang lebih luas. Kasus tersebut digunakan sebagai alat (*instrument*) untuk memberikan wawasan terhadap isu yang lebih besar.
3. Studi Kasus Kolektif (*Collective Case Study*) melibatkan beberapa kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu atau fenomena yang sedang diteliti. Beberapa kasus dipilih untuk menunjukkan berbagai perspektif atau untuk memperkaya data.

Mengacu pada jenis studi kasus yang dipaparkan oleh John W. Creswell maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus intrinsik. Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami tawuran pelajar secara mendalam dan holistik dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta. Metode ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis kebijakan sekolah yang diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai sumber data dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Oleh karena itu, metode studi kasus merupakan pilihan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian ini dan memberikan wawasan yang bermakna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengurangi angka tawuran pelajar melalui kebijakan sekolah yang efektif.

Adapun desain penelitian studi kasus ini mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh (Creswell, 2007) dan tahapan penelitian yang diuraikan oleh (Moleong, 2018):

1. Persiapan Penelitian

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi masalah penelitian dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara sederhana di lapangan dengan narasumber. Selama proses observasi dan wawancara sederhana di awal ini, peneliti juga melakukan penyusunan awal rencana penelitian dan pengurusan ijin penelitian. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Pemilihan kasus dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi tawuran pelajar dengan implementasi kebijakan sekolah, aksesibilitas data, dan dukungan dari pihak sekolah. SMP Negeri 116 Jakarta dipilih karena memiliki riwayat kasus tawuran yang signifikan dan telah menerapkan berbagai kebijakan seperti tata tertib sekolah, kegiatan pembiasaan, dan program ekstrakurikuler. Sekolah ini juga bersedia menyediakan akses terhadap dokumentasi dan data yang tersedia dan diperlukan oleh peneliti, serta mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah untuk pelaksanaan penelitian.

2. Perancangan Penelitian

Dalam tahap perancangan ini dilakukan penyempurnaan rancangan penelitian setelah diadakan observasi dan wawancara sederhana di lapangan, unit analisis ditetapkan yaitu kebijakan sekolah yang diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mengurangi tawuran pelajar untuk mencakup kebijakan sekolah seperti tata tertib, kegiatan pembiasaan, program ekstrakurikuler, dan layanan bimbingan konseling. Fokus penelitian adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan ini dalam mengurangi tawuran pelajar, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama: wawancara semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti

guru, staf, dan siswa untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai implementasi kebijakan sekolah. Observasi non partisipatif digunakan untuk mengamati langsung pelaksanaan kebijakan dan interaksi antar siswa di lingkungan sekolah. Dokumentasi meliputi analisis dokumen resmi sekolah, seperti tata tertib. Proses pengumpulan data meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data. Proses pengumpulan data ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar.

4. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih data penting yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema utama dari data yang telah disajikan. Langkah-langkah analisis data ini dirancang untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dijelaskan secara sistematis.

5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi dan *member checking*. Triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. *Member checking* melibatkan verifikasi data dan interpretasi dengan responden, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik dan konfirmasi terhadap temuan penelitian. Teknik-teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian, serta memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.

6. Etika Penelitian

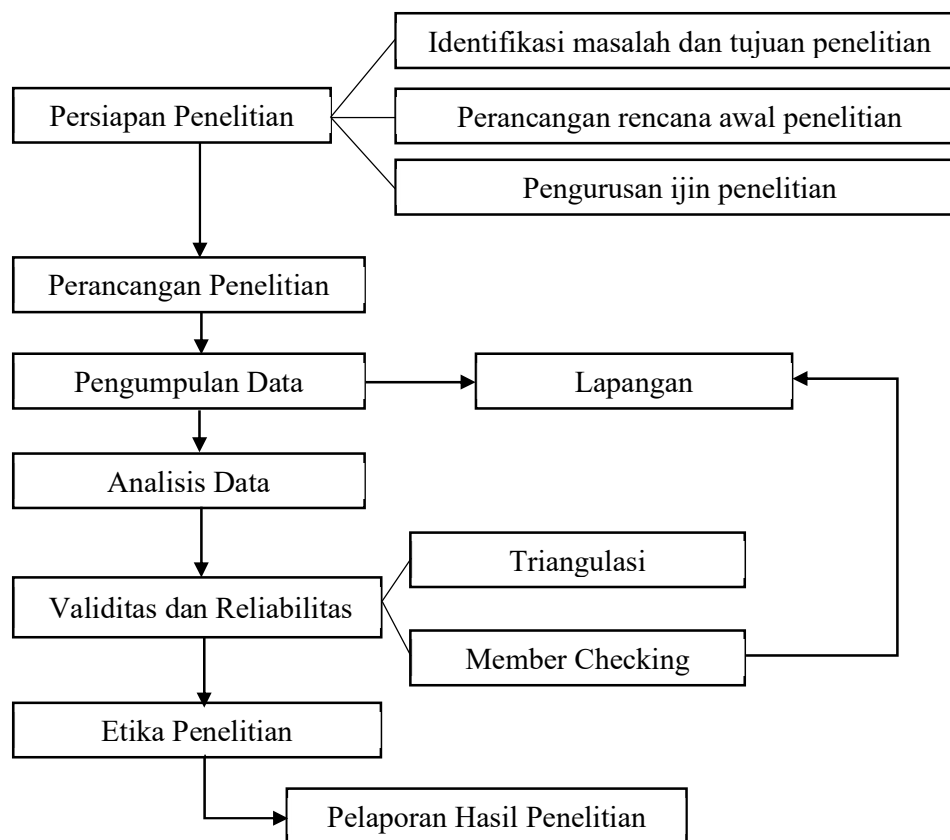
Dalam penelitian ini, prinsip etika yang diterapkan mencakup persetujuan informasi yang jelas dari semua informan sebelum

pengumpulan data, memastikan bahwa partisipasi informan bersifat sukarela, perlakuan yang adil dan hormat terhadap setiap peserta, serta penggunaan data hanya untuk tujuan penelitian yang telah disetujui. Kerahasiaan dan privasi informan dijaga dengan cara menyimpan data dalam format yang aman, mengidentifikasi data dengan kode alih-alih nama asli, dan hanya membagikan hasil penelitian dalam bentuk yang tidak mengungkapkan identitas individu. Selain itu, data yang sensitif atau pribadi akan ditangani dengan penuh perhatian untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

7. Pelaporan Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam laporan yang mencakup temuan utama dan evaluasi kebijakan sekolah. Pelaporan hasil akan dilakukan dengan menyajikan temuan secara sistematis untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan pendidikan dan pencegahan tawuran pelajar.

Adapun gambaran desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 3. 1. Gambar Desain Penelitian

keberhasilan SMP Negeri 116 Jakarta dalam mengatasi masalah tawuran dan menerapkan kebijakan yang efektif.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan sekolah untuk mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Subjek penelitian dipilih dengan cermat menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti memilih individu atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell, 2007). Subjek penelitian terdiri dari:

1. Wakil kepala sekolah; memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan sekolah serta berfungsi sebagai jembatan antara kepala sekolah dan staf lainnya. Wakil kepala sekolah memberikan pandangan mengenai kebijakan yang diterapkan serta evaluasi implementasinya dari sisi administrasi dan operasional.
2. Guru; terlibat langsung dalam penerapan kebijakan di kelas dan interaksi sehari-hari dengan peserta didik. Guru memberikan wawasan mengenai pelaksanaan kebijakan di lingkungan sekolah, dampak kebijakan terhadap perilaku siswa, serta efektivitas kebijakan dari sudut pandang pendidik.
3. Peserta didik; sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan, siswa memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi perilaku mereka dan respons mereka terhadap kebijakan yang diterapkan di sekolah.
4. Petugas keamanan sekolah; bertanggung jawab atas pengawasan dan keamanan di lingkungan sekolah. Petugas keamanan memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan pengurangan tawuran diterapkan di lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan peserta didik.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi penting dan relevan untuk mendalami topik penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013) nforman adalah individu yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki informasi relevan dan dapat memberikan keterangan yang mendalam terkait dengan topik penelitian. Informan penelitian dalam studi ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informant*); Informan ini memiliki peran penting karena mereka adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait dengan kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Informan kunci mencakup wakil kepala sekolah.
2. Informan Utama: Informan ini terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan dan berfungsi sebagai sumber informasi utama tentang efek kebijakan di lingkungan sekolah. Informan utama mencakup guru dan peserta didik.
3. Informan Tambahan: Informan ini melengkapi data yang diperoleh dari informan utama dan kunci dengan perspektif tambahan yang relevan. Informan tambahan mencakup staf sekolah lain dalam penelitian ini adalah petugas keamanan sekolah.

Berikut merupakan informan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1.
Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|------|---|
| 1 | AH | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru BK |
| 2 | G | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Guru Bahasa Inggris |
| 3 | NA | Wali Kelas dan Guru Bahasa Indonesia |
| 4 | F | Wali Kelas dan Guru Pendidikan Agama Islam |
| 5 | No. | Wali Kelas dan Guru IPA |
| 6 | MF | Guru BK |
| 7 | S | Penjaga Keamanan Sekolah |

| | | |
|----|-----|---|
| 8 | MHR | Peserta Didik Kelas 9 |
| 9 | HH | Peserta Didik Kelas 9 |
| 10 | RRS | Peserta Didik Kelas 9 |
| 11 | R | Peserta Didik Kelas 9 |
| 12 | JP | Peserta Didik Kelas 9 |
| 13 | RP | Peserta Didik Kelas 9 |
| 14 | FA | Peserta Didik Kelas 9 |
| 15 | TR | Peserta Didik Kelas 9 |
| 16 | GS | Peserta Didik Kelas 9 |
| 17 | AAR | Peserta Didik Kelas 8 dan Ketua OSIS |
| 18 | AN | Peserta Didik Kelas 8 dan Wakil Ketua OSIS |
| 19 | GR | Peserta Didik Kelas 8 dan Sekertaris 1 OSIS |

Sumber: Data Peneliti 2024

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

3.5.1. Wawancara

Dikutip dari (Arifin, 2021) menurut Rahardjo, pada hakikatnya wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data rinci perihal persoalan atau permasalahan dalam penelitian. Atau, suatu proses konfirmasi data yang sebelumnya telah didapatkan melalui teknik lain.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari para informan mengenai kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Proses wawancara dimulai dengan mengidentifikasi dan memilih informan yang relevan, yaitu wakil kepala sekolah, petugas keamanan sekolah, guru, dan peserta didik. Setelah informan dipilih, peneliti menghubungi mereka untuk mengatur jadwal wawancara yang sesuai. Wawancara dilakukan secara tatap muka di lokasi yang nyaman bagi informan, seperti di ruang guru atau ruang kelas yang tenang, untuk

memastikan suasana yang kondusif dan bebas dari gangguan. Setiap sesi wawancara diawali dengan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian dan konfirmasi persetujuan dari informan untuk berpartisipasi dalam wawancara serta persetujuan untuk merekam percakapan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan panduan wawancara yang telah dirancang sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjawab secara terbuka dan mendalam. Selama wawancara, peneliti berperan sebagai fasilitator yang aktif mendengarkan dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh informan. Setiap wawancara direkam menggunakan alat perekam suara untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat. Setelah wawancara selesai, peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan atas partisipasi mereka dan menyusun transkrip dari rekaman wawancara untuk analisis data lebih lanjut.

3.5.2. Pedoman Wawancara

Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan semi-terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari informan tentang kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi aspek-aspek kebijakan, implementasi, efektivitas, dan faktor pendukung serta penghambat kebijakan.

Tabel 3. 2.
Pedoman Wawancara

| PEDOMAN WAWANCARA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|--|
| Tanggal Wawancara: | |
| Identitas Informan | |
| Nama: | |
| Jabatan: | |
| Daftar Pertanyaan | |
| 1. Konflik apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? | |

2. Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta?
3. Pada tahun berapa saja pernah terjadi kasus tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
4. Berapa jumlah kasus tawuran yang pernah terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta?
5. Apakah terdapat perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dari tahun ke tahun?
6. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta?
7. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
8. Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
9. Kebijakan apa saja yang dibuat oleh sekolah dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
10. Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
11. Adakah faktor pendukung/pendorong implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?
12. Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?
13. Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?
14. Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
15. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?
16. Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?
17. Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pertanyaan Pendukung

1. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mempromosikan pendekatan preventif dalam mengurangi tawuran pelajar?

2. Bagaimana kebijakan tersebut mengatur tentang pencegahan konflik dan peningkatan kesadaran siswa akan pentingnya kerukunan?
3. Bagaimana sekolah menangani kasus tawuran pelajar yang terjadi di dalam atau di sekitar lingkungan sekolah?
4. Apakah ada kebijakan yang mengatur tindakan disiplin dan sanksi bagi siswa yang terlibat dalam tawuran?
5. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mendorong pembinaan karakter dan sikap positif siswa?
6. Bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam upaya mengurangi tawuran pelajar?
7. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang menekankan pendidikan nilai dan etika kepada siswa?
8. Bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam upaya mengurangi tawuran pelajar dan meningkatkan kesadaran moral siswa?
9. Bagaimana sekolah melibatkan orang tua siswa dalam penanggulangan tawuran pelajar?
10. Apakah ada kebijakan yang mengatur kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif?

Tabel 3. 3.
Pedoman Wawancara Peserta Didik

| PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|---|--|
| Tanggal Wawancara: | |
| Identitas Informan | |
| Nama: | |
| Kelas: | |
| Daftar Pertanyaan | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? 2. Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? 3. Seberapa sering tawuran pelajar terjadi? 4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? 5. Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? 6. Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? | |

7. Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
8. Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
9. Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?
10. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

3.5.3. Observasi

Menurut Rahardjo dikutip dari (Arifin, 2021), observasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang memanfaatkan penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa kejadian, kegiatan, objek, situasi tertentu, dan perasaan emosional individu. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran realistis terhadap suatu fenomena atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Jenis observasi ini dapat partisipatif, di mana peneliti benar-benar terlibat dalam kegiatan tersebut, atau non partisipatif, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat (Hasanah, 2016).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai pelaksanaan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, dimana peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas sekolah. Tahap pertama melibatkan perencanaan, yang mencakup identifikasi aktivitas atau situasi yang akan diamati, penjadwalan waktu dan lokasi observasi, serta persiapan alat-alat yang diperlukan seperti buku catatan dan lembar observasi. Selama proses observasi, peneliti mencatat secara rinci berbagai kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah, termasuk pelaksanaan tata tertib sekolah, kegiatan pembiasaan, program ekstrakurikuler, serta layanan dan bimbingan konseling. Peneliti mengamati interaksi dan perilaku peserta

didik dan staf sekolah tanpa ikut campur atau mempengaruhi situasi yang diamati. Data yang dikumpulkan melalui observasi ini kemudian dicatat dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan sekolah dalam mencegah tawuran pelajar dan implementasinya di lapangan.

3.5.4. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mencatat temuan di lapangan yang berkaitan dengan tentang kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Lembar ini mencakup kolom-kolom untuk mencatat aspek yang diamati, indikator yang dicari, waktu, lokasi, dan hasil pengamatan.

Tabel 3. 4.
Lembar Observasi

| LEMBAR OBSERVASI PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|
| Tanggal Observasi: | | | |
| Lokasi Observasi: | | | |
| No. | Aspek yang Diamati | Indikator yang Dicari | Hasil Pengamatan |
| 1 | Kondisi Lingkungan Sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Fisik • Ruang kelas, termasuk meja, kursi, dan papan tulis. • Ketersediaan dan kondisi fasilitas umum seperti toilet, kantin, dan perpustakaan. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan dan Keamanan • Keberadaan petugas keamanan sekolah dan pengawasan mereka. • Kondisi pagar, pintu, dan sistem keamanan lainnya. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kebersihan area sekolah, termasuk halaman, koridor, dan area parkir. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Interaksi Siswa Perilaku siswa di lingkungan sekolah, apakah terdapat tanda-tanda konflik atau tawuran. Kehadiran kelompok atau geng yang berpotensi terlibat dalam tawuran pelajar. Tingkat keramahan dan hubungan sosial antar siswa di lingkungan sekolah. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Guru dan Staf: <ol style="list-style-type: none"> Aktivitas pengawasan guru dan staf terhadap siswa di lingkungan sekolah. Respons dan interaksi mereka terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan tawuran. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Ekstrakurikuler: <ol style="list-style-type: none"> Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan dan efektivitas kegiatan ekstrakurikuler tersebut. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Sekitar: <ol style="list-style-type: none"> Kondisi lingkungan sekitar sekolah yang mungkin mempengaruhi | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | terjadinya tawuran pelajar. 19. Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar dalam penanggulangan tawuran. | |
| 2 | Kebijakan Sekolah | 11. Kebijakan Pencegahan 12. Kebijakan Penanganan Kasus Tawuran 13. Kebijakan Pembinaan Siswa 14. Kebijakan Pendidikan Nilai dan Etika 15. Kebijakan Kerja Sama dengan Orang Tua dan Masyarakat | |
| 3 | Implementasi dan Efektivitas Kebijakan | 11. Kehadiran dan Partisipasi 12. Aktivitas dan Prosedur 13. Peran dan Tanggung Jawab 14. Respon dan Pelaksanaan 15. Dukungan dan Sumber Daya 16. Perubahan dan Dampak | |

3.5.5. Dokumentasi

Dokumen berupa sumber tertulis, gambar, video, atau karya monumental dapat digunakan sebagai sumber data bagi proses penelitian (Nilamsari, 2014). Prosedur dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang relevan mengenai kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Proses dokumentasi dimulai dengan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, seperti tata tertib sekolah, peraturan internal, laporan kegiatan, serta materi dan laporan dari program ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. Peneliti

mengidentifikasi dan meminta akses kepada dokumen-dokumen tersebut melalui koordinasi dengan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan petugas administrasi. Setelah dokumen diperoleh, peneliti memeriksa dan mencatat informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti kebijakan yang diterapkan, pelaksanaan program, dan hasil evaluasi kebijakan. Dokumen yang diperoleh kemudian diorganisasi dan disimpan dengan baik dalam format digital dan/atau fisik untuk memudahkan akses dan referensi selama proses analisis data. Selanjutnya, peneliti menganalisis dokumen yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan sekolah. Prosedur ini memastikan bahwa data dokumentasi yang dikumpulkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami efektivitas kebijakan dan mendukung temuan penelitian secara menyeluruh.

3.6. Sumber Data

Pada sub-bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis dan rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Sumber data dalam penelitian merujuk pada segala bentuk informasi yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Data ini bisa berupa informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya atau informasi yang sudah tersedia dari sumber yang telah ada sebelumnya. Definisi ini penting untuk memahami bagaimana data diperoleh dan digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Creswell J. W., 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer memberikan informasi yang spesifik dan relevan

terkait dengan topik penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan aktual (Creswell J. W., 2014).

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer mencakup informasi yang dikumpulkan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan penerima kebijakan, seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan staf sekolah. Melalui wawancara, peneliti mengumpulkan pendapat dan pengalaman langsung dari informan mengenai kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap tawuran pelajar. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung tentang pelaksanaan kebijakan di lapangan, sementara dokumentasi mencakup arsip dan catatan terkait kebijakan yang diterapkan. Data primer memberikan wawasan mendalam dan konteks aktual tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dan diterima oleh komunitas sekolah.

Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, seperti laporan, artikel, dan dokumen resmi. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis data primer dengan menyediakan konteks tambahan dan informasi yang relevan yang mungkin tidak dapat diperoleh langsung dari lapangan (Yin, 2018). Menurut Yin, data sekunder sering kali membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menyediakan dasar untuk interpretasi data primer, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan serta verifikasi informasi yang dikumpulkan (Yin, 2018).

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan kebijakan sekolah, dokumen terkait peraturan yang diterbitkan, dan studi-studi terdahulu tentang kebijakan sekolah dalam mengatasi tawuran pelajar. Data sekunder ini membantu memberikan latar belakang dan konteks tambahan yang mendukung analisis data primer. Misalnya, peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta No. 86 Tahun 2019, merupakan data sekunder yang

memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari studi ini. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan dari data primer dengan literatur dan kebijakan yang lebih luas, serta mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin tidak terlihat hanya dari data primer.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian ini untuk memastikan data yang diperoleh dapat dianalisis secara akurat dan menghasilkan temuan yang valid. Proses ini melibatkan beberapa langkah mulai dari pengumpulan hingga penarikan kesimpulan. Teknik pengolahan data merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian.

Menurut (Creswell J. W., 2014), teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses sistematis untuk menyusun informasi, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Proses ini mencakup tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan terstruktur. Reduksi data mencakup seleksi dan penyederhanaan data yang relevan, sedangkan penyajian data melibatkan pengorganisasian data dalam format yang memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan adalah proses akhir di mana peneliti menginterpretasikan hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan teknik pengolahan data yang sistematis, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan dapat dipercaya.

3.7.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang memusatkan pada perubahan, abstraksi, dan penyederhanaan data mentah dari catatan lapangan yang berlangsung sepanjang proses penelitian sebelum data

terkumpul (Rijali, 2019). Saat menulis ringkasan, peneliti melakukan pengkodean, memusatkan perhatian pada topik penelitian, menetapkan batasan masalah, dan menyimpulkan dengan mencatat yang berlangsung hingga dibuat laporan akhir. Maka dari itu hakikat reduksi data adalah proses menggabungkan dan menormalisasikan segala bentuk data ke dalam bentuk teks untuk dianalisis.

Reduksi data adalah proses penting dalam pengolahan data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengorganisir, dan memfokuskan data mentah agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Reduksi data mencakup:

1. Organisasi data (menentukan kategori, konsep, tema, dan pola)
2. Coding data

Coding data adalah proses dalam analisis data kualitatif di mana data mentah seperti wawancara, observasi, atau dokumen dikategorikan ke dalam kode atau label yang mewakili tema, konsep, atau kategori tertentu. Proses ini mempermudah pengorganisasian, pengelompokan, dan analisis data untuk menemukan pola, tema, dan wawasan yang relevan. Coding data membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna dalam data kualitatif dengan lebih sistematis. Pada penelitian ini terdapat 5 tema dengan 16 sub tema dan 46 kode.

3. Interpretasi

Interpretasi hasil penelitian harus dikaitkan dengan teori yang ada sehingga dapat menghindari bias dan memberikan penjelasan yang kuat dan ilmiah. Dalam proses ini, hasil yang diperoleh dari data penelitian akan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan dan literatur yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat tidak hanya berdasarkan asumsi atau pandangan subjektif, tetapi didukung oleh dasar teoretis yang kuat. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Interpretasi ini kemudian disajikan dalam bagian pembahasan, di mana peneliti menguraikan temuan-temuan utama, mengaitkannya dengan teori yang ada, serta mendiskusikan implikasi dan relevansinya dalam konteks penelitian.

Tabel 3. 5.
Hasil Coding

| No. | Tema | Sub Tema | Kode |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Kebijakan Sekolah | Tata Tertib | Larangan |
| | | | Prosedur penanganan pelanggaran |
| | | | Sanksi |
| | | Kegiatan Pembiasaan | Upacara bendera |
| | | | Selasa ceria |
| | | | Rabu sehat/kebersihan kelas |
| | | | Literasi numerasi |
| | | | Tadarus/kebaktian |
| | | Program Ekstrakurikuler | Keaktifan ekstrakurikuler |
| | | | Dampak ekstrakurikuler |
| | | | Partisipasi peserta didik |
| | | | Pengaruh program |
| | | Program Preventif | Sosialisasi |
| | | | Program pelatihan |
| | | Pencabutan atau Penahanan KJP | Pencabutan KJP secara permanen |
| Penahanan KJP selama 3 bulan | | | |
| Bimbingan Konseling | Pemberian materi di kelas | | |
| | Sesi konseling | | |
| | Penanganan pelanggaran | | |
| 2 | Efektivitas Kebijakan | Dampak Kebijakan | Penurunan kasus |
| | | | Perubahan perilaku |
| | | | Peningkatan keamanan |
| | | | Kepatuhan peserta didik |
| | | | Efektivitas program |
| | | Ketercapaian Tujuan | Tidak ada kasus tawuran |
| | | | Efektivitas kebijakan |
| | | | Perbaikan berkelanjutan |
| 3 | Faktor Pendukung | Kerja Sama | Stakeholder sekolah |
| | | | Pendidik |
| | | | Orang tua |
| | | | Masyarakat |
| | | | Pihak berwajib dan terkait |
| | | Himbauan Dinas Pendidikan Jakarta | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | Landasan Hukum dan Regulasi | Keputusan Gubernur DKI Jakarta Jakarta No. 86 Tahun 2019 KUHP mengenai tawuran |
| | | Pelatihan dan Program Khusus | Sosialisasi Seminar dari pihak terkait LDKS |
| 4 | Faktor Penghambat | Kurangnya Pengawasan | Pengawasan kurang |
| | | Keterbatasan Implementasi | Jangkauan terbatas |
| | | Pengaruh Alumni | Provokasi alumni |
| 5 | Respons Peserta Didik | Persepsi Terhadap Kebijakan | Positif Negatif |
| | | Partisipasi dalam Program Pencegahan | Aktif dalam program Tidak aktif dalam program Tertarik pada program Tidak tertarik pada program |

3.7.2. Penyajian Data

Setelah melakukan seleksi data, penyajian data akan dilakukan. Data diorganisasikan dan disusun dalam model relasional agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data adalah kegiatan penyusunan sekumpulan data, memberikan kesempatan penarikan kesimpulan dan mulai bertindak. Catatan lapangan, bagan, grafik, dan matriks merupakan bentuk penyajian data kualitatif (Rijali, 2019). Dikutip dari (Wekke & dkk, 2019), Miles dan Huberman (1984) mengatakan bahwa teks naratif merupakan cara menyajikan data yang paling umum dalam penelitian kualitatif.

Penyajian data merupakan langkah krusial dalam proses penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menyajikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil temuan secara jelas dan terstruktur, serta memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, yang menekankan pada penyampaian informasi secara rinci dan mendalam mengenai hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode narasi deskriptif. Metode ini melibatkan penjabaran hasil temuan secara terperinci berdasarkan tema dan sub-tema yang telah dikembangkan dari data yang dikumpulkan. Narasi deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi dalam bentuk teks yang memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, setiap tema dan sub-tema diuraikan secara mendalam, menyediakan konteks dan detail yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian. Penyajian naratif ini juga membantu dalam menjelaskan hubungan antara berbagai temuan dan memberikan interpretasi yang relevan berdasarkan data yang diperoleh.

3.7.3. Menarik Kesimpulan

Menurut Barrett & Twycross (2018), menarik kesimpulan dan konfirmasi merupakan keterampilan yang dimulai sedari pengumpulan data, aliran data, sebab akibat/kausalitas, dan rasio lainnya. Permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif akan terus berkembang, sehingga hasil penelitian saat ini dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin tidak lagi relevan di masa yang akan datang. Namun demikian, temuan-temuan penelitian kualitatif diharapkan dapat melahirkan penemuan baru. Hasil yang diberikan berbentuk teori mengenai objek yang sebelumnya tidak jelas, maka selepas penelitian akan menjadi lebih jelas (Fadli, 2021).

Rangkaian kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama proses penelitian, melalui: (1) mengoreksi sambil mencatat, (2) memeriksa catatan lapangan, (3) meninjau dan berdiskusi dengan rekan untuk membangun konsensus intersubjektif, (4) perluasan usaha intensif untuk memasukkan replikasi temuan pada kumpulan data lain (Rijali, 2019).

Menarik kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber data menjadi pemahaman yang menyeluruh dan koheren mengenai fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk

menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dan merumuskan kesimpulan yang mencerminkan tujuan serta fokus penelitian. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta harus mencerminkan hubungan antara temuan yang ada dengan teori dan literatur yang relevan. Proses menarik kesimpulan mencakup:

1. Integrasi Temuan

Peneliti menggabungkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan diorganisasi dan dikelompokkan berdasarkan tema dan sub-tema untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil mencerminkan keseluruhan gambaran dari penelitian.

2. Analisis Temuan

Temuan dari data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan. Peneliti memeriksa apakah data yang diperoleh mendukung atau menyanggah hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta mengevaluasi keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan analisis, peneliti menyusun kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara komprehensif. Kesimpulan ini harus mencakup jawaban atas pertanyaan penelitian, serta refleksi mengenai efektivitas dan implikasi kebijakan atau fenomena yang diteliti.

4. Validasi Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik diuji untuk memastikan validitas dan konsistensinya dengan data yang ada. Peneliti juga mempertimbangkan *feedback* dari informan atau hasil triangulasi data untuk memperkuat kesimpulan yang diambil.

5. Penyampaian Kesimpulan

Kesimpulan disajikan dalam bentuk yang jelas dan ringkas, menyertakan implikasi praktis, rekomendasi, dan saran untuk

penelitian selanjutnya. Kesimpulan ini harus mudah dipahami oleh pembaca dan memberikan wawasan yang signifikan terkait penelitian yang dilakukan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya akurat dan dapat dipercaya, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman dan pengembangan kebijakan atau praktik terkait.

3.7.4. Validasi dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas adalah dua aspek krusial dalam memastikan kualitas data dalam penelitian. Validitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti, sementara reliabilitas mengukur konsistensi dan keandalan data. Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data diuji untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan.

Validitas data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur dan sejauh mana temuan penelitian secara akurat menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Validitas mencakup berbagai aspek, termasuk validitas internal, yang memastikan bahwa temuan penelitian adalah akibat langsung dari variabel yang diteliti, dan validitas eksternal, yang mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke konteks lain (Creswell J. W., 2014).

Untuk menguji validitas data, penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu triangulasi dan *member checking*. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, atau peneliti untuk mengonfirmasi hasil temuan (Creswell J. W., 2014). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan membandingkan

hasil dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh adalah konsisten dan dapat diandalkan.

Member Checking adalah metode validasi di mana data dan temuan penelitian dikembalikan kepada informan untuk memastikan akurasi dan kecocokan dengan pandangan mereka. Dalam proses ini, hasil wawancara dan observasi diberikan kepada informan untuk diperiksa dan dikonfirmasi. Informan diminta untuk memberikan umpan balik mengenai keakuratan representasi data mereka dan melakukan koreksi jika diperlukan (Creswell, 2014). Metode ini membantu memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pemahaman dan perspektif informan.

Reliabilitas data merujuk pada konsistensi dan keandalan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data dikatakan reliabel jika hasil pengukuran yang sama dapat diperoleh jika pengukuran tersebut dilakukan kembali dalam kondisi yang sama. Reliabilitas mencakup aspek seperti stabilitas, konsistensi, dan akurasi data dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi (Neuman, 2018).

Reliabilitas data dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan menggunakan teknik seperti triangulasi dan *member checking*. Keberadaan berbagai sumber data dan proses verifikasi yang terlibat memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya konsisten tetapi juga mencerminkan pandangan yang valid dari informan. Dengan menggunakan metode triangulasi dan *member checking*, penelitian ini bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.7.5. Tabel Pertanyaan Validasi Data

Untuk memvalidasi data yang telah dikumpulkan, peneliti menyusun tabel pertanyaan validasi data yang berfokus pada hasil temuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Tabel 3. 6.
Tabel Pertanyaan Validasi Data

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|--|
| Tanggal: | |
| Identitas Informan | |
| Nama: | |
| Jabatan/Kelas: | |
| Daftar Pertanyaan | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? 2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? 3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? 4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? 5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? 6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? 7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? 8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? 9. Apa saja program ekstrakurikuler yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan. 10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar? 11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten? 12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan. 13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? 14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar? 15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya? | |

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan mendalam mengenai temuan-temuan tersebut. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Bab ini akan menguraikan hasil-hasil utama penelitian, mengaitkan temuan dengan teori yang relevan, serta memberikan penjelasan mengenai implikasi dari temuan tersebut. Pada bagian ini, peneliti akan membahas temuan dengan merujuk pada data yang telah dikumpulkan. Temuan-temuan tersebut akan dikaitkan dengan literatur yang ada, untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat didukung oleh teori yang kuat. Dengan demikian, bab ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan hasil penelitian, tetapi juga sebagai landasan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi pada bab selanjutnya.

4.1. Profil SMP Negeri 116 Jakarta

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP Negeri 116 Jakarta |
| NPSN | : 20100720 |
| Status | : Negeri |
| Bentuk Pendidikan | : SMP |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
| SK Pendirian Sekolah | : 965/121/ I /HP/ u / I / 1 |
| Tanggal SK Pendirian | : 1979-01-01 |
| SK Izin Operasional | : 965/121/ I /HP/ U / I / 1 |
| Tanggal SK Izin Operasional | : 1990-01-01 |
| Luas Tanah | : 5.921 m ² |
| Alamat | : Jl. Sunter Permai Raya Sunter Agung Rt. 15 Rw.06, Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350 |
| Kurikulum | : Kurikulum 2013 & Kurikulum Merdeka |

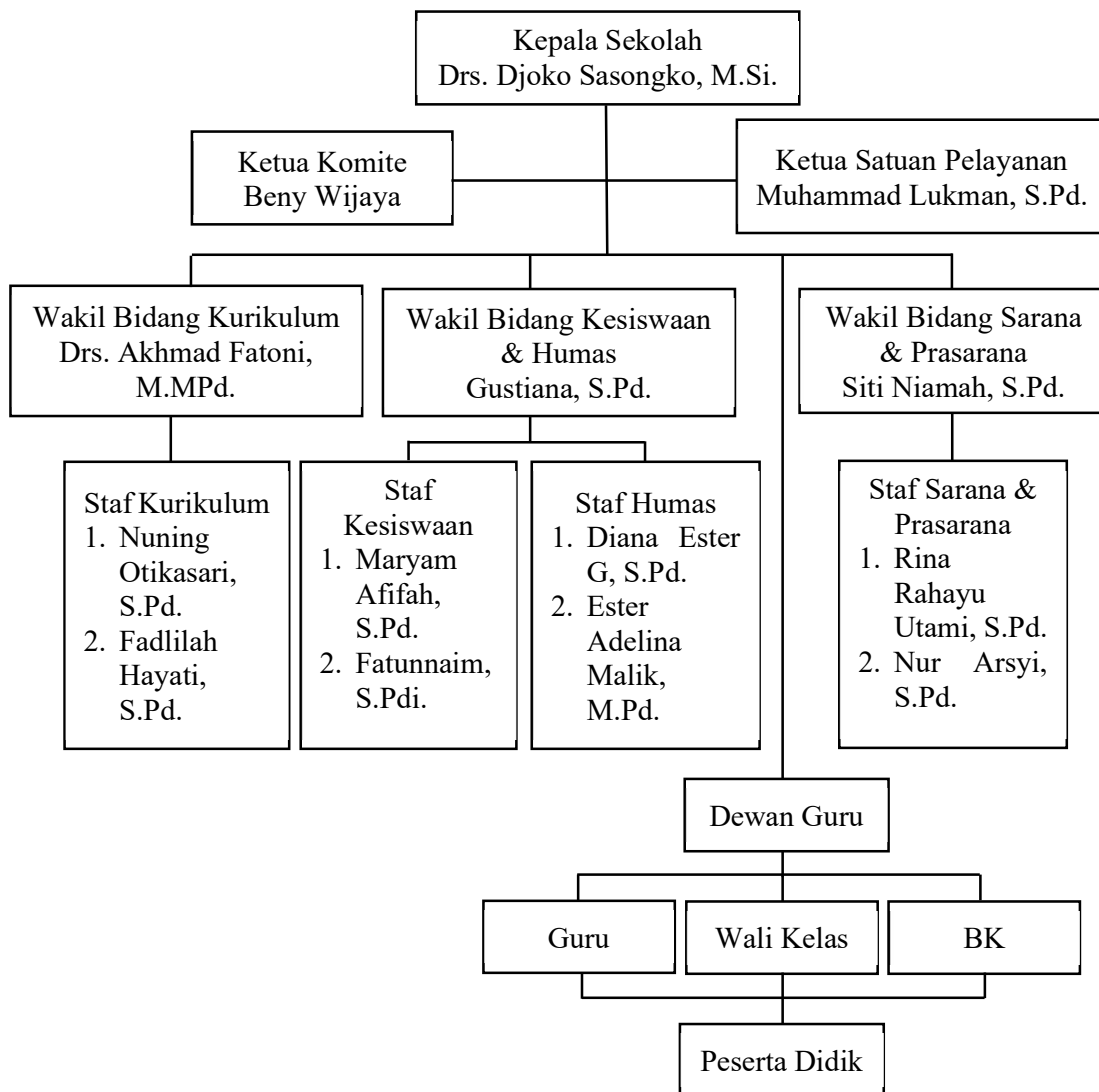
Waktu Penyelenggaraan : Sehari penuh (5 hari/minggu)
Akreditasi : A



Gambar 4. 1. Lapangan Sekolah

Gedung pertama SMP Negeri 116 Jakarta mulai berdiri di Jl. PLTU pada tahun 1975 dan mendapatkan SK Pendirian Sekolah 965/121/I/HP/u/I/1 pada tahun 1979. Pada tahun 1990, SMP Negeri 116 mendapatkan SK Izin Operasional SK Izin Operasional 965/121/I/HP/U/I/1. Pada tahun 1192, sekolah ini dipindahkan ke gedung baru yang berlokasi Jl. Sunter Permai Raya Sunter Agung Rt. 15 Rw.06, Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dikarenakan lokasi sekolah yang lama melakukan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sekolah ini melakukan perbaikan gedung pada tahun 2015 yang berlangsung selama 6 bulan sehingga kegiatan pembelajaran peserta didik dilakukan di sekolah lain yaitu SMP Negeri 34 Jakarta. Saat ini SMP Negeri 116 Jakarta masih menggunakan Kurikulum 2013 bagi peserta didik kelas 9, sedangkan peserta didik yang berada pada kelas 7 dan 8 sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Sekolah ini memiliki lokasi yang mudah di jangkau dan strategis karena tidak jauh dari jalan utama dan dilalui oleh rute Bis Sekolah Gratis dan angkutan umum. SMP Negeri 116 Jakarta berada tidak jauh dari salah satu ikon kota Jakarta saat ini yaitu Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang dapat diakses dengan berjalan kaki sekitar 650 meter.

4.1.1. Struktur Organisasi Sekolah



Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Sekolah

4.1.2. Visi Misi Sekolah

Visi: Mewujudkan Peserta Didik yang Beriman, Berakhlak Mulia, Cerdas, Berprestasi, Mandiri Berwawasan Global

Misi:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat
2. Mewujudkan pendidikan yang kompetitif untuk menghadapi perubahan
3. Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan
5. Penguatan tata kelola akuntabilitas dan citra publik pendidikan
6. Mendorong kemandirian peserta didik
7. Membiasakan peserta didik menjaga kebersihan lingkungan.

4.1.3. Sumber Daya yang Dimiliki Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh telah penelitian, sumber daya yang di miliki oleh SMP Negeri 116 Jakarta baik dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sarana serta prasarana adalah sebagai berikut:

Data Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik

Tabel 4. 1.
Data PTK dan Peserta Didik

| Uraian | Guru | TP | PD |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| Laki - Laki | 13 | 7 | 329 |
| Perempuan | 18 | 2 | 309 |
| Total | 31 | 9 | 638 |

Sumber: Data Pokok Pendidikan dan Jadwal KBM

Keterangan :

- Data Rekap Per Tanggal 7 Maret 2024
- Singkatan :
 - TP = Tenaga Kependidikan
 - PD = Peserta Didik

4.1.3.1. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan faktor penting bagi kelancaran dan keberlanjutan proses pembelajaran. Ketika terdapat kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengajaran dan pekerjaan mereka tidak sesuai dengan kualifikasi atau kebutuhan sekolah yang ada, maka lingkungan belajar dapat terganggu dan bahkan mempengaruhi status dan kinerja siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat guru berjumlah 31 orang yang terdiri dari 13 guru laki – laki dan 18 guru perempuan di SMP Negeri 116 Jakarta. Seluruh pendidik yang mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta telah mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 dan sebanyak 3 pendidik telah menempuh pendidikan S2. Tentunya semua pendidik telah mempunyai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya, sehingga kondisi tersebut sangat membantu untuk lebih memperlancar kegiatan belajar mengajar. Dengan keadaan seperti ini, diharapkan guru dapat mengembangkan proses pembelajaran di sekolah yang lebih beragam dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran.

Tabel 4. 2.
Status Pendidik

| Guru Mata Pelajaran | Jumlah |
|--|---------------|
| Guru IPS | 4 |
| Guru IPA | 4 |
| Guru Bahasa Indonesia | 4 |
| Guru Bahasa Inggris | 4 |
| Guru Matematika | 4 |
| Guru Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 2 |
| Guru Seni Budaya | 3 |
| Guru Pendidikan Agama Islam | 2 |
| Guru Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| Guru PKn | 2 |
| Guru BK | 2 |
| Guru Informatika | 5 |

Sumber: Jadwal KBM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik untuk 12 mata pelajaran ada di SMP Negeri 116 Jakarta, lebih dari satu guru dapat mengampu setiap mata pelajaran. Beberapa guru juga dapat mengajar dua mata pelajaran yang berbeda, keadaan secara rinci yaitu sebagai berikut; Guru IPS , IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika berjumlah 4 orang, Guru Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, PKn, dan BK berjumlah 2 orang, Guru Seni Budaya berjumlah 3 orang, dan Guru Informatika 5 orang.

4.1.3.2. Keadaan Peserta Didik

Dalam proses pembelajaran agar dapat diselenggarakan, peserta didik merupakan elemen serta indikator utama dalam mengukur keberhasilan sekolah. Mayoritas peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta memiliki tempat tinggal tidak jauh dari sekolah dan berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Keadaan ini terjadi karena sistem zonasi pada Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) mengatur bahwa calon peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah negeri wajib diterima minimal sebesar 90% dari keseluruhan jumlah peserta didik baru di sekolah. Sekolah juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila disertai dengan pengembangan potensi peserta didik. Setiap tahunnya SMP Negeri 116 Jakarta mengalami peningkatan jumlah siswa yang dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3.
Jumlah Peserta didik

| Tahun Ajaran | Semester | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|----------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki – Laki | Perempuan | |
| 2021/2022 | Ganjil | 356 | 296 | 652 |
| 2021/2022 | Genap | 347 | 299 | 646 |
| 2022/2023 | Ganjil | 356 | 289 | 645 |
| 2022/2023 | Genap | 358 | 286 | 644 |
| 2023/2024 | Ganjil | 332 | 309 | 641 |
| 2023/2024 | Genap | 329 | 309 | 638 |

Sumber: Data Pokok Pendidikan

Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan jumlah peserta didik setiap semesternya. Tidak seperti kebanyakan sekolah yang memiliki lebih banyak peserta didik perempuan, SMP Negeri 116 Jakarta memiliki jumlah peserta didik laki – laki yang lebih dominan setiap tahunnya.

SMP Negeri 116 Jakarta memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 4.
Rombongan Belajar

| Tingkat | Jumlah Kelas | Peserta Didik |
|--------------|--------------|---------------|
| 7 | 6 | 215 |
| 8 | 6 | 211 |
| 9 | 6 | 212 |
| Total | 18 | 638 |

4.1.3.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran selain sumber daya manusia. SMP Negeri 116 Jakarta berada di Jl. Sunter Permai Raya Sunter Agung yang dapat di akses menggunakan kendaraan darat dan memiliki tanah seluas 5.921 m². Tahun 1979 merupakan tahun pendirian sekolah ini dan telah menjalani beberapa perbaikan, renovasi, dan penambahan ruang untuk mendukung proses pembelajaran. Berikut ini rincian jenis prasarana yang terdapat di SMP Negeri 116 Jakarta:

Tabel 4. 5.
Prasarana

| Jenis Prasarana | Jumlah |
|------------------|--------|
| Ruang Kelas | 18 |
| Perpustakaan | 1 |
| Laboratorium | 3 |
| Ruang Pimpinan | 1 |
| Ruang Guru | 1 |
| Ruang Ibadah | 1 |
| Ruang UKS | 1 |
| Toilet | 3 |
| Gudang | 1 |
| Lapangan | 1 |
| Ruang Tata Usaha | 1 |
| Ruang Konseling | 2 |

| | |
|----------------|-----------|
| Ruang OSIS | 1 |
| Ruang Bangunan | 1 |
| Total | 36 |

Sumber: Data Pokok Pendidikan

Beberapa sarana dan prasarana telah mengalami kerusakan ringan yang tidak memengaruhi proses pembelajaran. SMP Negeri 116 merupakan sekolah yang memiliki bangunan dua lantai berbentuk huruf U dengan lapangan di tengah luas sekolah. SMP Negeri 116 Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang cukup terawat dan kebersihan sekolah yang baik. Sekolah ini juga dilengkapi pos penjaga keamanan sekolah tidak jauh dari gerbang sekolah. Sekolah ini hanya memiliki satu gerbang sebagai akses keluar dan masuk setiap warga sekolah serta di lengkapi dengan CCTV di beberapa titik. Terdapat kantin yang luas dan bersih yang dilengkapi dengan pilihan makanan yang lebih sehat. Di samping itu, sekolah juga telah menganjurkan peserta didik untuk membawa wadah minuman secara mandiri dalam rangka untuk mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, sekolah ini juga dipenuhi dengan beragam tanaman yang rimbun mulai dari tanaman hias pucuk merah hingga pohon mangga dan belimbing buah.



Gambar 4. 3. Musala dan Tempat Berwudhu Sekolah



Gambar 4. 4. Kantin Sekolah

Kondisi sarana dan prasarana sekolah merupakan elemen pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di sebuah sekolah. Maka dari itu, sarana dan prasarana yang lengkap dan terawat dengan baik dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan kualifikasi fasilitas pendukung di SMP Negeri 116 Jakarta sudah dapat dikategorikan cukup lengkap untuk menunjang proses pembelajaran.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian yang disajikan merupakan gabungan dari hasil observasi non-partisipan, hasil wawancara tenaga kependidikan, guru dan peserta didik, hasil rekaman dan pencatatan dokumen yang ditemukan selama kegiatan penelitian. Melalui teknik wawancara penelitian semi-struktural telah menghasilkan 19 orang narasumber, yang terdiri dari 2 orang wakil kepala sekolah, 1 guru BK, 3 wali kelas, 1 penjaga keamanan sekolah, 9 peserta didik kelas 9F, dan 3 peserta didik anggota OSIS kelas 8. Data yang tidak terungkap selama wawancara dilengkapi dengan hasil observasi non-partisipasi serta pencatatan dokumen dan rekaman.

SMP Negeri 116 Jakarta merupakan sekolah menengah pertama yang terletak sangat strategis dan memiliki beberapa sekolah dari berbagai jenjang yang berlokasi tidak jauh dari sekolah tersebut. Sekolah ini pernah menjadi sekolah yang terkenal dengan fenomena tawuran selama beberapa tahun yang panjang dengan beberapa sekolah terdekat walaupun intensitas dan frekuensinya selalu bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Beberapa tahun

terakhir telah diketahui bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan mengenai fenomena tawuran yang melibatkan peserta didik dari SMP Negeri 116 Jakarta, khususnya saat Pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2020 di Indonesia.

1. Intensitas Tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta

Diketahui bahwa fenomena tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta telah menurun secara signifikan dalam rentang tahun 2021 – 2024. Seperti yang diutarakan oleh G “...COVID, 2020. 2021 kita masuk kembali. Baru masuk itu agak mengalami lonjakan lah ya, wajar menurut saya, karena dia artinya belum dapat arahan lagi dari sekolah. Masuk ke 2022 ke 2023 sih agak berkurang.” Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari S, penjaga keamanan sekolah yang mengatakan bahwa

“Tawuran akhir-akhir ini sudah jarang bahkan bisa dibilang sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang terlibat dalam kasus tawuran. Sudah aman.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, terjadi lonjakan kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik SMP Negeri 116 pada tahun 2021 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 dapat dikatakan sudah tidak ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik.

Menurunnya fenomena tawuran pelajar akibat dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kembali terjadi dan melonjak pada tahun 2021 ketika pembelajaran tatap muka pertama kali diberlakukan di Jakarta. Sesuai dengan yang disampaikan oleh NO, salah satu wali kelas 9 mengutarakan bahwa

“Jadi, kayak kalau tahun kemarin. Mungkin karena anaknya kebanyakan di rumah kali ya. Begitu masuk. Kita masuknya cuma semester dua, kalo gak salah anak kelas 9 kemarin tuh. Begitu masuk agak *euphoria* masuk begitu ya. Nah itu agak banyak tuh. Karena anak-anaknya keenakan rumah. Pokoknya banyak. Nggak kepegang lah sama guru kan cara penanganannya, cara pembentukan karakternya. Kan kalau pake *zoom* itu nggak bisa untuk membentuk karakter anak. Beda dengan kalau kita tatap muka. Kalo tatap muka mah bisa kita *press*. Tapi kalau masuk nggak bisa. Makanya fluktuasi, sebelum tahun kemarin. Nggak ada tawuran, walaupun ada gosip-gosip. Mau tawuran tapi nggak jadi. Cuma ada yang gosip aja ya. Gosip doang sebelum pandemi. Nah mulai pandemi kita agak *loss* ya

karena memang juga ada orang di rumah semua. Kita nggak tau. Pokoknya kemarin itu agak banyak ya karena itu. Karena baru masuk. Iya baru masuk setelah pandemi. Sudah kelamaan di rumah, masuk. Di pertengahan mau dekat semester 2. Terus baru masuk *full* di semester 2. Nah itu baru ketemu anak-anak itu. Tiba-tiba mereka jadi senior, kasusnya banyak. Pemalakan lah, ini lah, itu. Banyak banget ya.”

Dari penjelasan Ibu NO sebagai wali kelas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu faktor fluktuasi intensitas tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik adalah karena peserta didik terlepas dari pengawasan guru dan sekolah. Sekolah tidak dapat memantau kegiatan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran *daring* serta longgarnya aktivitas kegiatan peserta didik selama di rumah menyebabkan peserta didik tidak menyerap pembelajaran dan pembentukan karakter yang disampaikan oleh guru dengan maksimal. Faktor internal berupa rasa senioritas menyebabkan peserta didik melakukan banyak kenakalan remaja.

Memperjelas penurunan intensitas tawuran pelajar dan faktornya adalah penjelasan dari NA selaku wali kelas 9, mengatakan bahwa

“...ya kayaknya, yang pertama tahun 2022 itu masih ada dan itu pun intensitasnya kayaknya, ada bulan-bulannya, ada momen-momen ada waktu-waktu yang mereka misalnya habis ujian atau kalau interval harinya itu biasa hari-hari hari kamis gitu kan. Kenapa pilihannya di kamis karena kan mereka, Jumat ya Jumat itu kan besok jeda libur, memang pembelajaran nggak penuh kalau hari kamis ini. Ada pengurangan jam terutama yang Pembelajaran Kurikulum Merdeka, mereka pulang cepat. Nah, pulang cepat itu kan yang mengindikasikan mereka, Kan masih harusnya masih belajar, tapi begitu sudah pulang mau ke mana ini, Jadi lebih kepada pelarian aja gitu ya, karena tidak ada kegiatan lain. Karena orang tua masih ada yang tahunya mereka masih sekolah, jadi merasa bebas dong.”

Pak NA melanjutkan penjelasan mengenai penurunan intensitas tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta, mengutarakan bahwa

“Ada. Yang pertama faktornya kenapa, ya jelas perubahannya berkurang ya. Tren-nya itu berkurang karena oknum yang tadi kita sebutkan itu, misal dari lima anak. Semakin mereka ini, semakin mereka kelasnya tinggi atau naik kelas, pasti mereka juga sudah mulai sadar kalau sebentar lagi saya mau lulus. Misalnya posisi sekarang, yang itu waktu mereka ikut kelas 8, sekarang mereka sudah mulai

berpikir, berpikir panjang gitu, mungkin berpikir bahwa ini sekadar mereka, jangan bikin masalah sudah. Tinggal lurus. Sudah sayang. Dan itu kelas 7 dan 8 sedang dalam masa pencarian jati diri. Kalau kelas 9 sudah agak, istilahnya tobat ya. Makanya siklusnya itu 3 tahunan karena pasti ada yang melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda dalam interval 1 sampai 3 tahun selama mereka di sekolah. Tahun terakhir ini yang kita khawatirkan tadi yang biasanya kelas 7 atau 8, ini alhamdulillah. Terutama yang tahun 2023 kemarin ya Alhamdulillah Sudah *clear* begitu. Nah bisa karena kakak kelasnya gak ada yang ajakin juga. Atau Faktor juga itu ya tapi Mungkin penanganan sekolah juga mungkin sudah, atau mungkin perhatian pemerintah juga sudah, mulai kan. Sekarang kan sudah ada spanduk-spanduk kan. Kita masuk itu, sudah ada semacam peringatan yang buat mereka melihat itu mungkin jadi berpikir. Jadi sudah agak *clear* memang di tahun terakhir ini sebelum masuk 2024 ini.”

Mengenai faktor perubahan intensitas tawuran, Bu NO mengutarakan bahwa

“Kondisi ya. Kondisional udah jatuhnya kan. Kondisional pertemuan antara guru dengan siswa jatuhnya berarti kalau pandemi berarti itu nggak ketemu langsung dengan guru. Itu faktor utamanya itu. Terus kondisi ekonomi berpengaruh. umumnya yang agak-agak nakal itu yang ekonominya ke bawah terus orang tuanya tidak begitu peduli atau terlalu peduli. Maksudnya terlalu manja. Terlalu dimanjain...”

Dari hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa intensitas tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta telah mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga tidak ada kasus yang tercatat di paruh pertama tahun 2024. Terjadinya penurunan intensitas ini diakibatkan oleh berkurangnya pengaruh teman sebaya dan kakak kelas yang menjadi pemrakarsa terjadinya tawuran pelajar. Selanjutnya adalah faktor ekonomi dan perhatian orang tua peserta didik. Faktor lain yang menyebabkan penurunan intensitas terjadinya tawuran pelajar yaitu, adanya penegakan hukum KUHP Pasal 358 serta Peraturan Gubernur No. 86 tahun 2019 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, adanya tindakan tegas dari sekolah terkait tindak kekerasan di lingkungan sekolah termasuk tawuran pelajar menyebabkan peserta didik merasa jera.

2. Yang Terlibat dalam Tawuran Pelajar SMP Negeri 116 Jakarta

SMP Negeri 116 Jakarta saat ini sudah tidak memiliki kasus tawuran yang melibatkan peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta. Beberapa tahun terakhir, bentuk kasus tawuran pelajar tidak lagi selalu melibatkan dua sekolah berbeda yang terlibat dalam tawuran. Menurut hasil wawancara yang didapat selama melakukan penelitian, diketahui bahwa akhir-akhir ini, tawuran yang terjadi, cenderung merupakan tawuran kelompok lingkungan teman sebaya di luar sekolah atau kelompok teman sebaya yang berasal dari tempat tinggal peserta didik dan melibatkan nama peserta didik dari SMP Negeri 116 Jakarta. Sesuai yang diutarakan oleh seorang peserta didik AN yang mengutarakan bahwa

“...magrib-magrib dia keluar, dia tuh ngelewatin gang yang sebenarnya nggak boleh dilewat sama dia karena dia punya banyak musuh di situ, begitu. Jadi dia langsung *set* begitu, dia lagi boti kalo gak salah. Terus kebacok ininya (punggung), aku lihat jahitannya aku di telponin malam-malam...”

AN dan AAR juga menambahkan dalam percakapan wawancara bahwa

“ Oh ini, si Black yang 8E...Oh iya dia, tapi dia mah antar rumah...Eh antar rumah, tapi kan dia bawa-bawa nama 116, pokoknya waktu itu serumah gitu, ributnya disitu ya, di Warakas, jauh ...Bukan dari sekolah sih...Itu apa sih, di foto gitu, terus biodatanya, keterangannya, namanya ini dari siswa SMP 116.”

Pak AF selaku wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa tawuran yang terjadi dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan tempat tinggal.

“...sebetulnya awalnya dari gang, dia tinggal di gang sebelah sekolah. Tapi sekolahnya di tempat yang berbeda. Dari situlah yang mengawali terjadinya tawuran.”

Selain itu, tawuran pelajar yang pernah terjadi melibatkan sekolah tertentu, Bu NO mengutarakan bahwa

“Kan biasanya tawurannya nggak di sini. Waktu tawuran tahun kemarin, tawurannya di sekitar SMK 55, tawurannya ke daerah-daerah pademangan atau dekat rel kereta yang bahari-bahari itu. Jadi gak mungkin *security* kesana. Disana bukan anak SMK saja tapi mereka bawa. Entah mungkin mereka alumni 116, kadang-kadang suka begitu kan. Alumni bawa. Ngasih tahu nih. Yuk, kita besok apa-apa. Itu rombongan ke sana anak-anak. Karena tawurannya di situ. Jarang kalau tawurannya di sini, tawurannya di rel kereta sana yang pas di JIS itu. JIS itu ada rel kereta di situ. Biasanya ada yang nyerang, misalnya datang. Nah, anak-anak kita pas jalan ke sana, pulang. Biasanya begitu. Jadi bukan tawuran kita yang nyerang. Kalau orang

bilang kita ini kayak jalur gaza. Kalau udah sore, tiap hari Jumat, itu pasti ada yang keliling. Keliling anak-anak yang mau tawaran itu yang naik motor bertiga-tiga. Keliling-keliling disini nih. Makanya kita kalau udah sore hari Jumat atau mulai sore, anak-anak yang eskul, gurunya biasanya kita nunggu di SD 09. Nungguin ngeliatin, kan? Sampai mereka baru pulang semua, udah dijemput, baru gurunya pulang. Kalau nggak begitu, ntar anaknya pas anaknya pulang, diserang. Kejadian tuh, ada rombongan anak sekolah, bawa-bawa celurit apa di sana. Jadi, anak mau pulang, ditahanlah. Nggak boleh pulang. Ntar dulu ya. Di-check dulu, gurunya di-check. Bicara, dilihat. Udah aman, baru-baru pulang. Yang ditakutkan selalu berantem.”

Bu NO juga berbicara mengenai peserta didik yang hampir terlibat dalam aksi tawuran lain hingga melibatkan pihak Kepolisian.

“Itu pernah tahun kemarin. Oh itu anak-anak saya kenal, enggak yang kemarin? Untungnya anak saya enggak. Tapi anak-anak kelas lain. Ketangkap tapi belum tawuran. Cuma dia bawa sajam (senjata tajam). Karena bawa sajam. Terus ada polisi. Udah takut duluan kan. Akhirnya dia melarikan diri. Polisi suruh berhenti, melarikan diri. Jatuh, ketangkap. Polisi Kemayoran atau Pademangan gitu. Diurus sama sekolah. Jadi sekolah juga yang ikut turun tangan.”

Dari pembicaraan narasumber di atas, masih terdapat keterlibatan peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta dalam aksi tawuran pelajar baik tawuran kelompok di lingkungan tempat tinggal maupun tawuran yang terjadi karena prakarsa alumni. Diketahui juga bahwa masih ada upaya untuk memprovokasi peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta untuk terlibat dalam aksi tawuran oleh peserta didik sekolah lain. Berdasarkan informasi yang ditemukan, ada beberapa sekolah sekitar yang pernah terlibat tawuran pelajar dengan peserta didik SMP Negeri 116 Jakarta. Hal ini terjadi karena tradisi turun-temurun yang cukup sulit pudar terkait dengan dendam antara para alumni dan kakak kelas masing-masing sekolah terhadap sekolah lain sehingga peserta didik baru cenderung mengikuti tradisi yang ada karena ajakan kakak kelas mereka.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta

Tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di latarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat menyebabkan peserta didik terlibat dalam aksi tawuran yaitu perasaan remaja yang ingin mendapatkan pengakuan dan harga diri, di mana jenjang sekolah menengah pertama

merupakan masa remaja mencari jati diri dan pengakuan dari lingkungan sekitar mereka. Selain itu, faktor lingkungan dan teman sebaya merupakan faktor utama peserta didik terlibat dalam aksi tawuran. Seperti yang diutarakan oleh Pak AF selaku wakil kepala sekolah bahwa

“...Memang anak-anak kita masa remaja, masa ingin menunjukkan jati diri, tapi rata-rata kan anak-anak itu suka negatif, ya. Ingin terkenal negatif. Jadi, terkenal tapi negatif itu yang namanya.”

Peserta didik AN juga mengutarakan pendapatnya mengenai penyebab peserta didik mengikuti tawuran, yaitu

“Mereka itu, mungkin, bisa gaya-gayaan terus ikut-ikutan, kebanyakan kayak, dari temen yang ya, taulah kalau kita temenan sama yang baik kita jadi baik, kalau kita temenan sama yang buruk kita jadi buruk, pertemanan terus lingkungan juga nah, temennya itu mungkin ngajakin kayak misalkan kalau lu nggak mau ikut, lu cemen, pasti di ajak-ajak kayak gitu mungkin, makanya dia tuh nggak mau dibilang kayak gitu makanya dia ikut-ikutan, terus pengaruh lingkungan juga, mungkin lingkungannya emang terbiasa kayak begitu, dia jadi kayak menganggap hal ini itu biasa, gitu terus ini juga sih, katanya sih, aku kan emang karena suka sharing gitu, mau ngobrol-ngobrol saja, aku yang mau ngobrol gitu kan, kayak, kenapa sih pengen ikut-ikut tawuran mulu? itu melampiaskan emosi gua, kata dia gitu, kata dia masalahnya di rumah, terus dia nggak mau melampiasin itu di rumah, dia melampiasin itu ke tawuran-tawuran gitu, kata dia begitu. Walaupun, pokoknya dia bilang kayak, masalah dia tuh udah banyak, makanya dia tuh kenal dunia malam, gitu ceritanya, padahal umur mereka masih, ya Allah, tapi kan nggak tau ya mungkin masalah hidup mereka lebih berat, karena Allah itu nggak bakal ngasih ujian terlalu berat ke hambanya.”

Sesuai dengan penjelasan AN mengenai penyebab terlibatnya seorang peserta didik dalam aksi tawuran ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengaruh internal untuk mendapatkan pengakuan serta melampiaskan emosi terpendam individu, selain itu terdapat faktor pengaruh teman sebaya dan lingkungan tempat tinggal termasuk di dalamnya keluarga yang menjadi faktor terbesar peserta didik melakukan tawuran pelajar. Selain faktor yang telah disajikan di atas, peserta didik AAR mengutarakan bahwa

“Menurut saya mah, itu mah pada gaya-gayaan lah. Gaya-gayaan doang. Anak SMP mau pada cari nama kali, mau pada sok-sok ngebela nama sekolahnya tapi caranya nggak benar. Karena kan nggak usah tawuran. Itu kan tawuran itu penyebabnya kesalahannya juga sepele-sepele gitu. Sepele-sepele ya mungkin salah paham doang

kayak kata-kataan. Sekolah jelek, sekolah lebih jelek. Pada bagusin nama sekolah, tapi ujung-ujungnya tawuran dengan cara kekerasan... Iya sih masih diajak-ajakin. Saya kemarin waktu yang ngumpul-ngumpul juga ada alumni, eh katanya gini, eh jalan lagi dong. Masa 116 gak jalan lagi. Terus ada yang bilang juga gini katanya. Itu di ancol waktu itu, tiga orang kita juga jadi. Tapi udah jarang sih kak.”

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang ditemukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor pemicu yang menjadi penyebab tawuran pelajar. Faktor pertama adalah pengaruh teman sebaya dan lingkungan, peserta didik dipengaruhi oleh ajakan dari alumni dan kakak kelas untuk mengikuti aksi tawuran berdasarkan dendam turun-temurun, harga diri mengatasnamakan sekolah, serta rasa tidak terima ketika seseorang atau sekelompok orang menjelekkkan nama sekolah mereka. Selanjutnya adalah faktor internal peserta didik berupa pencarian jati diri melalui pengakuan teman sebaya dan lingkungan dengan cara yang mereka anggap keren. Pada masa remaja ini, peserta didik cenderung mencari pelarian dari masalah yang mereka alami dengan cara melampiaskan emosi dan energi mereka melalui kekerasan. Selain itu, terdapat faktor keluarga juga dapat memengaruhi peserta didik dalam keputusan mereka untuk melakukan tawuran pelajar. Peserta didik yang tumbuh dalam keluarga yang cenderung melakukan akan merasa bahwa tindak kekerasan merupakan hal yang wajar, selain itu permasalahan di keluarga yang tidak dapat ditanggung oleh emosi remaja dan tidak menemukan tempat untuk menyalurkan hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor peserta didik dalam mengikuti aksi tawuran.

4.2.1. Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta

Sebagai salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Jakarta, SMP Negeri 116 Jakarta menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan disiplin dan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu masalah signifikan yang dihadapi oleh sekolah ini sebelum penerapan kebijakan resmi adalah tingginya insiden tawuran pelajar. Tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta sering kali terjadi sebagai hasil dari ketegangan

antar kelompok peserta didik. Insiden-insiden tersebut dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perselisihan pribadi, perbedaan kelompok sosial, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan internal sekolah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan di lingkungan sekolah tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan sosial peserta didik.

Sebelum adanya kebijakan resmi, penanganan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta cenderung bersifat reaktif dan terbatas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah tawuran melibatkan intervensi dari pihak guru dan petugas keamanan sekolah, yang sering kali tidak mencakup strategi pencegahan yang komprehensif. Tindakan seperti teguran dan hukuman kadang-kadang diterapkan, namun tidak selalu diikuti dengan pembinaan yang efektif untuk mengatasi akar masalah. Pak AF, selaku wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa sebelum tahun 2010-an, kasus tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta masih sering terjadi. Pada masa itu, tawuran dianggap sebagai pelanggaran yang harus ditangani secara internal oleh pihak sekolah.

“Kalau dulu-dulu tahun berapa, ya, sekitar Oh, ya, 2010-an kali juga masih ada tahun 2010-an kali juga masih ada. Tahun 2010-an itu kan tawuran masih sifatnya apa, ya, larangan, tapi belum. Ya, itu sebelum ada Pergub, tawuran masih ditangani secara internal aja. Pihak sekolah dengan sekolah yang lain, ya kalo dulu....Kalau tahun-tahun sebelum adanya Pergub, kadang-kadang kita datang, ini itu panggil gurunya, contohnya nih, 140 nih deket, kita panggil, terus SMP 23 gitu. Karena anak-anak kita, anak-anak 116 itu kan banyak yang dari Ancol. Ya, terus ada yang pulang dari Ancol, anak 23 kan ada di stasiun Ancol, kan kadang-kadang begitu...”

Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih terstruktur dan sistematis untuk mengurangi frekuensi dan dampak tawuran pelajar. Kesadaran akan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah tawuran kemudian mendorong SMP Negeri 116 Jakarta untuk mendukung dan menerapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini secara lebih holistik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak AF juga menjelaskan bahwa

“Tapi kalau setelah adanya Pergub, itu sudah masing-masing sekolah sudah memberikan sosialisasi... setelah adanya peraturan Pergub tadi, itu sudah meminimalisir ya, sudah membuat anak-anak di sekolah lebih mudah mengarahkan, gitu. Lebih mudah memberikan petunjuk arah atau mungkin sosialisasi tentang tawuran tadi, tentang larangan tawuran.”

Berdasarkan pernyataan Pak AF, dapat diketahui bahwa SMP Negeri 116 Jakarta telah menangani kasus tawuran sejak sekitar tahun 2010. Pada masa itu, belum ada peraturan resmi mengenai tawuran, sehingga penanganannya terbatas pada larangan internal dari pihak sekolah. Penanganan kasus tawuran menjadi lebih efektif setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019. Peraturan ini, yang didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 170, 351, 355, 358, serta 489, memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan tawuran di lingkungan sekolah.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik, SMP Negeri 116 Jakarta telah menyusun kebijakan yang komprehensif dan adaptif. Kebijakan ini mencakup tata tertib yang jelas dengan ketentuan, larangan, dan sanksi bagi pelanggaran, serta program-program tambahan seperti kegiatan pembiasaan, ekstrakurikuler, dan layanan Bimbingan Konseling (BK). Keunikan kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan tata tertib sebagai alat disiplin, tetapi juga memadukannya dengan program pembiasaan yang berkelanjutan, ekstrakurikuler yang difokuskan pada pengembangan karakter, serta layanan Bimbingan Konseling yang proaktif, menjadikannya lebih adaptif dibandingkan dengan kebijakan di sekolah-sekolah lain. Dengan harapan terciptanya lingkungan yang kondusif dan mencapai hasil belajar yang optimal, pihak sekolah sangat tegas terkait tata tertib yang ditetapkan untuk mendisiplinkan peserta didik sambil terus memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan situasi yang ada.

4.2.1.1. Tata Tertib

Kebijakan sekolah SMP Negeri 116 Jakarta secara umum disusun berdasarkan peraturan pemerintah, ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada, serta bersumber dari pendapat dari seluruh warga sekolah atas kesepakatan bersama. Berdasarkan perumusan kebijakan sekolah baik secara tertulis maupun non-tertulis yang ditetapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam mengurangi tawuran pelajar. Tata tertib tersebut mencakup:

- a. Ketentuan umum
- b. Ketentuan pakaian peserta didik
- c. Kehadiran peserta didik
- d. Kerapian peserta didik
- e. Kegiatan pembiasaan
- f. Larangan-larangan
- g. Aturan penggunaan *handphone*
- h. Perhitungan poin pelanggaran
- i. Pembinaan pelanggaran tata tertib

Pembinaan akan diberikan jika terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik jika terjadi pelanggaran tata tertib adalah sebagai berikut:

- Pembinaan I: Poin mencapai 5 – 10, teguran lisan 1
- Pembinaan II: Poin mencapai 15 – 30, pembinaan tertulis
- Pembinaan III: Poin mencapai 35 – 50, pembinaan tertulis dan pemanggilan orang tua
- Pembinaan IV: Poin mencapai > 50, pembinaan tertulis, pemanggilan orang tua, atau pengembalian peserta didik kepada orang tua

Berdasarkan tata tertib tersebut, peserta didik akan diberikan pembinaan sebelum diberikan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan hingga peserta didik menunjukkan perubahan atau perbaikan pada perilaku mereka. Sejak tahun 2021

terdapat setidaknya ada 150 kasus pelanggaran kecil maupun besar yang tercatat oleh guru BK.

Pemberian hukuman kepada peserta didik oleh sekolah didasarkan pada tingkat pelanggaran. Pemberian hukuman pada dasarnya diberikan kepada peserta didik dengan harapan mereka dapat menunjukkan perubahan atau perbaikan perilaku serta memberikan efek jera. Saat peserta didik melanggar tata tertib, sekolah tidak serta-merta mengembalikan mereka kepada orang tua atau di dikeluarkan dari sekolah. Sekolah wajib memberikan pembinaan dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengubah perilaku mereka. Maka dari itu, sanksi yang diberikan oleh sekolah harus bersifat mendidik.

4.2.1.2. Kegiatan Pembiasaan

Sebagai upaya sekolah dalam mengatasi tawuran pelajar, Pak AF menuturkan bahwa

“Jadi, kita usahanya, upaya selain kegiatan, selain aturan, jadi selain peraturan Pergub juga dilakukan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan-pembiasaan, kegiatan agama, keagamaan itu selalu hingga meminimalisir terjadinya tawuran di sekolah.”

Sesuai dengan visi dan misi sekolah untuk membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, mandiri berwawasan global, sekolah juga mewajibkan peserta didik untuk mengikuti jadwal kegiatan pembiasaan sebagai pendukung dari tata tertib sekolah. Kegiatan – kegiatan pembiasaan tersebut di antara lain:

1. Senin: Upacara Bendera

Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin sebagai kegiatan pembuka minggu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun rasa nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik. Selama upacara, peserta didik berkesempatan untuk mempelajari nilai-nilai kebangsaan dan menghormati simbol-simbol negara, yang berkontribusi pada pembentukan karakter dan rasa kebersamaan di antara peserta didik.



Gambar 4. 5. Upacara Bendera

2. Selasa: Selasa ceria (Pengembangan Kreativitas)

Pada hari Selasa, peserta didik mengikuti program "Selasa Ceria," yang difokuskan pada pengembangan kreativitas. Kegiatan ini melibatkan berbagai aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan permainan yang dirancang untuk merangsang imajinasi dan bakat peserta didik. Selasa Ceria memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan keterampilan mereka dalam suasana yang menyenangkan dan mendukung.



Gambar 4. 6. Kegiatan Selasa Ceria

3. Rabu: Pramuka, Literasi, Numerasi

Hari Rabu diisi dengan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan keterampilan dasar dan karakter. Kegiatan Pramuka mengajarkan keterampilan kepemimpinan dan kerja sama, sementara program Literasi atau Numerasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan matematika peserta didik. Kegiatan ini mendukung pembelajaran yang holistik dan pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik peserta didik.



Gambar 4. 7. Kegiatan Literasi Bersama

4. Kamis: Senam bugar/kebersihan kelas

Pada hari Kamis, peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan Senam Bugar, yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kebugaran mereka. Alternatifnya, beberapa kelas melaksanakan kegiatan kebersihan kelas sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih.



Gambar 4. 8. Foto bersama setelah Senam Bugar

5. Jumat: Tadarus, (Peserta Didik Muslim) dan Kebaktian (Peserta Didik Kristiani)

Hari Jumat ditujukan untuk kegiatan keagamaan dengan dua kegiatan berbeda. Peserta didik Muslim melakukan Tadarus, yaitu membaca dan mengkaji Al-Qur'an sebagai bentuk penguatan spiritual dan pembelajaran agama. Sementara itu, peserta didik Kristiani mengikuti kebaktian yang mencakup doa dan renungan, mendukung perkembangan spiritual dan moral mereka. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperdalam pemahaman dan

praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, bagi peserta didik yang memeluk agama Islam diwajibkan untuk mengikuti Shalat Jumat berjamaah di masjid sekolah bagi peserta didik muslim setiap hari Jumat sesuai jadwal.



Gambar 4. 9. Kegiatan Tadarus Bersama



Gambar 4. 10. Kegiatan Kebaktian

4.2.1.3. Program Ekstrakurikuler

Tabel 4. 6.
Program Ekstrakurikuler

| No. | Ekstrakurikuler | Jumlah Peserta |
|-----|-----------------|----------------|
| 1 | Pramuka | 24 |
| 2 | Paskibra | 60 |
| 3 | Rokhis | 15 |
| 4 | Marawis | 21 |
| 5 | Rokris | 23 |
| 6 | Pencak Silat | 27 |
| 7 | Karate | 22 |
| 8 | Futsal | 48 |
| 9 | Basket | 45 |
| 10 | Paduan Suara | 32 |
| 11 | Angklung | 23 |
| 12 | Literasi | 28 |
| 13 | Multimedia | 19 |

| | | |
|----|--------------|-----|
| 14 | Band Akustik | 6 |
| 15 | English Club | 32 |
| 16 | Bola Volly | 13 |
| 17 | Seni Tari | 52 |
| 18 | PMR | 48 |
| 19 | Rubby | 18 |
| 20 | Teater | 19 |
| | Total | 575 |

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha

Sebagai perwujudan dari visi dan misi sekolah yang telah disebutkan sebelumnya, SMP Negeri 116 Jakarta menyediakan berbagai kegiatan positif yang bertujuan untuk membentuk peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Peserta didik diwajibkan untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler wajib seperti pramuka, serta dapat memilih maksimal tiga ekstrakurikuler tambahan yang diselenggarakan oleh sekolah. Hampir seluruh peserta didik terlibat aktif dalam minimal satu ekstrakurikuler pilihan. Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan ekstrakurikuler, Paskibra menjadi program ekstrakurikuler yang paling diminati, diikuti oleh kegiatan Seni Tari dan PMR. Melalui beragam program ekstrakurikuler ini, SMP Negeri 116 Jakarta berhasil mengembangkan prestasi peserta didik dalam bidang non-akademik.



Gambar 4. 11. Paskibra SMPN 116 Jakarta

Selain kegiatan pembiasaan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, SMP Negeri 116 Jakarta memiliki total 20 program ekstrakurikuler. Banyaknya pilihan kegiatan ekstrakurikuler ini memungkinkan peserta didik untuk memilih kegiatan sesuai dengan minat mereka, serta mengeksplorasi potensi dan bakat mereka di

berbagai bidang. Hampir seluruh peserta didik memiliki minimal satu ekstrakurikuler pilihan yang aktif diikuti. Pak NA menuturkan bahwa

“... di samping juga ada ekstrakurikuler, kita tambah *eskul* menjadi pilihan mereka juga. Intinya anak ini sebenarnya butuh pelarian untuk melakukan hal positif sehingga mereka lupa terhadap hal negatif di samping mengurangi intensitas bermain dengan teman di luar sekolah mereka, kan pasti mereka akan fokus di samping tadi saran dan prasarana yang kita maksudkan sebenarnya mereka bisa lebih maksimal dalam waktu belajar baik di kelas dan di luar lingkungan sekolah.”

Melalui berbagai program ekstrakurikuler, SMP Negeri 116 Jakarta berhasil menciptakan peserta didik yang berprestasi dalam bidang non-akademik. Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, tetapi juga untuk menyalurkan emosi, waktu, dan energi mereka ke dalam aktivitas yang positif dan bermanfaat. Dengan demikian, peserta didik dijauhkan dari kegiatan negatif seperti kenakalan remaja, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan karakter yang kuat dan seimbang.

4.2.1.4. Layanan Bimbingan dan Konseling

Di samping penerapan tata tertib yang ketat, SMP Negeri 116 Jakarta juga menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) sebagai bagian integral dari upaya mengurangi tawuran pelajar dan mendukung perkembangan peserta didik. Program BK di sekolah ini tidak hanya terfokus pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga memberikan dukungan menyeluruh dalam pengembangan kehidupan pribadi dan sosial peserta didik, serta perencanaan dan pengembangan jenjang pendidikan dan karier mereka di masa depan. SMP Negeri 116 Jakarta menawarkan berbagai program BK yang mencakup berbagai materi dan metode pengajaran yang beragam. Layanan ini meliputi penyediaan ruang dan waktu yang memadai bagi peserta didik untuk berdialog secara terbuka, mengungkapkan perasaan, serta mendiskusikan permasalahan yang

mereka hadapi. Selain itu, bimbingan konseling ini juga mencakup sesi konseling individual dan kelompok, serta penanganan kasus yang cepat dan efektif. Melalui layanan ini, sekolah berusaha membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan peserta didik secara menyeluruh, serta membantu mereka dalam mengatasi tantangan pribadi dan sosial yang mungkin mereka hadapi.

Layanan Bimbingan Konseling (BK) di SMP Negeri 116 Jakarta memainkan peran yang krusial dalam mendukung pencapaian visi dan misi sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan fokus pada pengembangan kehidupan pribadi, sosial, dan perencanaan karier, layanan BK tidak hanya membantu peserta didik mengatasi tantangan akademik, tetapi juga memperkuat aspek-aspek karakter dan keterampilan sosial mereka. Program BK di sekolah ini dirancang untuk melengkapi kegiatan pembelajaran dengan sesi-sesi yang mengasah keterampilan interpersonal, empati, dan tanggung jawab. Melalui bimbingan individual dan kelompok, peserta didik diberi kesempatan untuk menggali potensi diri, mengatasi masalah pribadi, serta merencanakan masa depan yang lebih baik. Pendekatan yang holistik dan beragam dalam layanan BK, termasuk penyediaan ruang konsultasi yang aman, workshop keterampilan hidup, dan dukungan emosional, secara langsung mendukung visi sekolah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas. Dengan demikian, layanan BK berperan sebagai salah satu pilar utama dalam upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Selanjutnya, untuk lebih memahami dampak konkret dari layanan Bimbingan Konseling dalam konteks pengurangan tawuran pelajar, penting untuk mengeksplorasi bagaimana peran aktif BK tidak hanya mendukung pengembangan karakter peserta didik tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam memitigasi insiden tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta. Keterlibatan Bimbingan Konseling (BK) di

SMP Negeri 116 Jakarta memainkan peran krusial dalam upaya mengurangi tawuran pelajar melalui pendekatan yang mendalam dan komprehensif. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, Pak NA menuturkan bahwa

“BK itu sebetulnya intinya membantu mencari data sampai yang tidak bisa dicari oleh kesiswaan. Kadang-kadang kan kulitnya saja. Kalau BK itu sampai ke dalam-dalam, sampai ke *home visit*, sampai ke keluarga, sampai apa saja sebetulnya. Kenapa anak ini kok sering terlambat, anak ini tawuran,..”

Layanan BK berfokus pada deteksi dan penanganan masalah yang mendasar pada peserta didik. BK tidak hanya memantau perilaku peserta didik di lingkungan sekolah, tetapi juga melakukan *home visit* dan berkomunikasi dengan keluarga untuk memahami dan mengatasi akar penyebab masalah. Selain itu, BK berperan aktif dalam mengawasi indikasi peserta didik yang mungkin terlibat dalam tawuran serta memberikan penanganan yang cepat dan tepat ketika insiden tawuran terjadi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa tindakan preventif dan intervensi dilakukan secara efektif, mengurangi kemungkinan terjadinya tawuran.

Keterlibatan BK dalam memantau, menganalisis, dan memberikan dukungan kepada peserta didik yang berpotensi terlibat dalam tawuran berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Melalui upaya preventif dan penanganan yang efektif, BK membantu mengurangi kejadian tawuran serta mendukung pembentukan karakter peserta didik yang lebih baik. Dengan demikian, BK merupakan komponen integral dalam strategi keseluruhan SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencapai tujuan pendidikan dan membangun karakter yang positif di kalangan peserta didik.

4.2.1.5. Pihak-pihak yang Berperan dalam Mengurangi Tawuran Pelajar

Dalam menegakkan tata tertib untuk mengurangi kasus tawuran pelajar SMP Negeri 116 Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak di antaranya adalah orang tua peserta didik, sekolah, masyarakat sekitar,

dan pihak berwajib. Hal ini dilakukan agar sekolah berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Sesuai dengan Bu NO yang mengutarakan bahwa

“...sekolah udah ngadain kerja sama dengan lingkungan ya, dengan RT/RW di setempat, kemudian dengan sama-sama *security* kan. Terus dengan BIMAS, BIMAS RW sini, Sama kepolisian juga udah. Jadi kalau misalnya ada kejadian, tawuran atau apa, kita langsung telpon polisi-polisi...”

Ini menunjukkan komitmen sekolah untuk melibatkan berbagai pihak dalam penanganan kasus tawuran secara cepat dan efisien. Selanjutnya, Bu G menambahkan,

“Kami melibatkan wali kelas dalam proses pemberitahuan jika siswa terlibat tawuran. Namun, penanganan kasus tawuran, terutama yang melibatkan kejadian eksternal, ditangani oleh BK dan kesiswaan. Wali kelas tidak langsung menangani kasus tersebut tetapi memberikan informasi yang diperlukan.”

Hal ini menegaskan bahwa wali kelas memiliki peran dalam melaporkan kasus tetapi tidak terlibat langsung dalam penanganannya. Pak NA juga menjelaskan,

“Kami melibatkan Guru BK, kesiswaan, dan wali kelas dalam penanganan tawuran. Penjaga keamanan berfungsi sebagai pengawas dan informan, memberikan informasi tentang aktivitas mencurigakan. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Tindakan sepenuhnya diambil oleh pihak yang lebih tinggi, seperti Kepala Sekolah, jika kasusnya berulang.”

Ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh namun keputusan akhir dan penanganan kasus yang lebih serius berada di tangan Kepala Sekolah. Secara keseluruhan, keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan pendekatan komprehensif SMP Negeri 116 Jakarta dalam mengatasi tawuran pelajar. Dengan melibatkan lingkungan sekitar, pihak berwajib, serta internal sekolah, upaya pencegahan dan penanganan tawuran dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

4.2.1.6. Tahapan Penanganan Pelanggaran

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, SMP Negeri 116 Jakarta menerapkan tahapan penanganan yang sistematis dalam menangani pelanggaran tata tertib, termasuk kasus tawuran pelajar. Sekolah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran ringan seperti masalah kerapian dan kelengkapan seragam sekolah biasanya dikenakan teguran lisan oleh wali kelas. Namun, untuk pelanggaran yang lebih serius seperti terindikasi merokok, membawa narkoba, melakukan tindak kekerasan lainnya seperti tawuran dan perundungan, proses penanganannya melibatkan pembinaan dan konseling yang lebih mendalam. Bu NO menjelaskan,

“Karena kita pakai prosedur nih. Pertama pasti penanganan pertama dari Wali kelas dulu. Mungkin kalau Wali kelas agak tidak sanggup atau bagaimana. Mungkin kita minta bantuan. Mungkin minta bantuan antar Wali kelas yang mau bantuin. Atau kalau sudah tidak sanggup baru BK turun tangan. Kalau dia naik tingkat lagi baru wakil kesiswaan yang turun tangan.”

Ini menunjukkan bahwa proses penanganan dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu wali kelas, dan dapat melibatkan pihak lain seperti BK atau wakil kesiswaan jika pelanggaran semakin berat atau berulang. Pak F, sebagai wali kelas, menambahkan,

“Sekolah ada bertahap, tahapannya itu pertama dari berapa kali ada berapa kali dia melakukan, dari pertama tentunya peringatan dan nasihat, dua, pemanggilan orang tua dan membuat pernyataan, tiga, pemanggilan orang tua dan biasanya dapat peringatan yang lebih tegas.”

Pernyataan ini menjelaskan urutan tindakan disipliner, mulai dari peringatan awal hingga pemanggilan orang tua dan sanksi yang lebih tegas jika pelanggaran berulang. Pak F juga mencatat adanya kemungkinan sanksi tertinggi berupa pencabutan KJP (Kartu Jakarta Pintar) sesuai anjuran pemerintah, meskipun belum pernah diterapkan secara formal. Bu G, selaku wakil kepala sekolah, menambahkan,

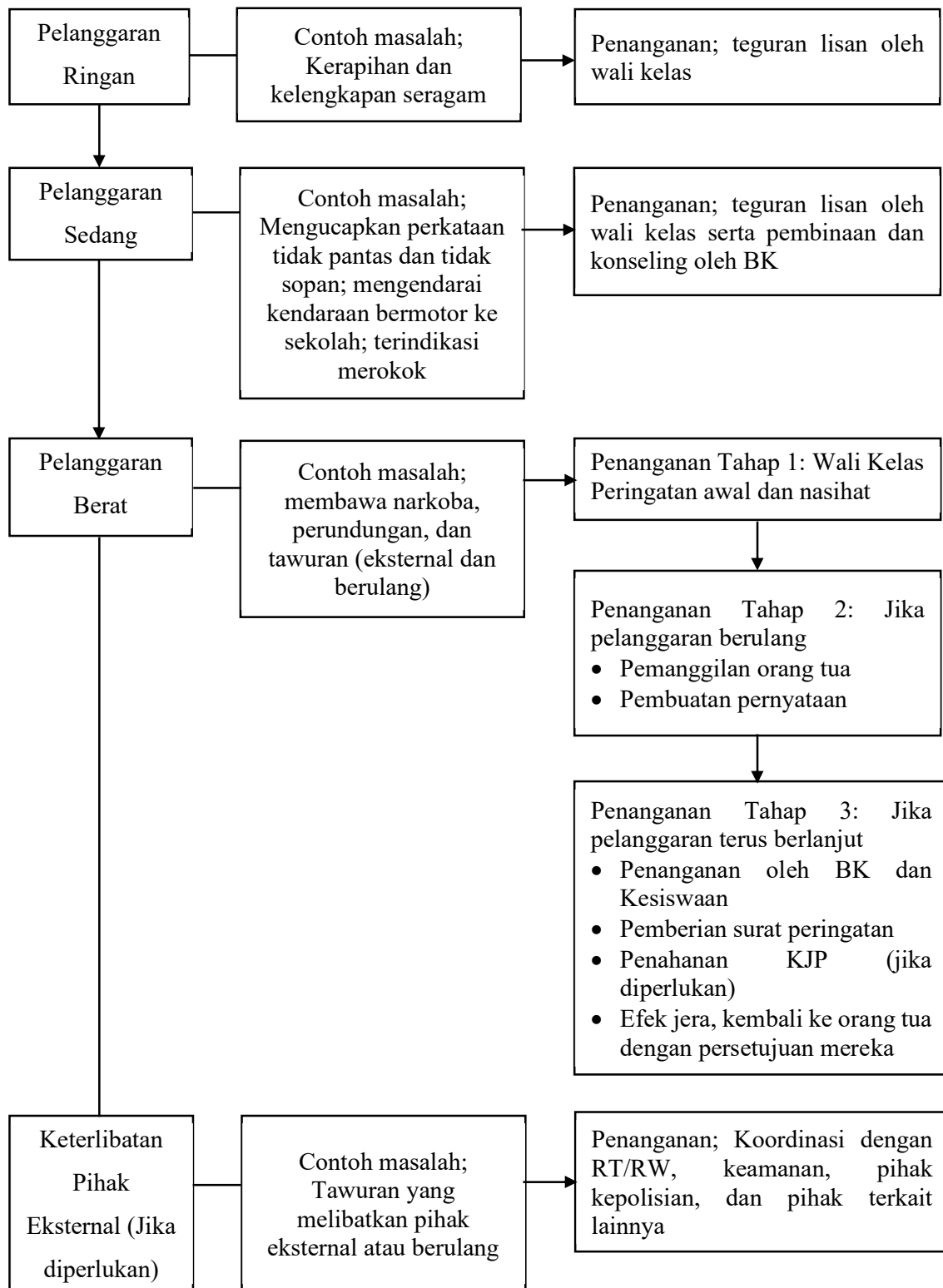
“Kita melibatkan di sini, pastinya wali kelas ya. Wali kelas kita beri tahu dulu kalau siswa yang bersangkutan terlibat tawuran. Karena ini sudah tawuran itu sifatnya eksternal dari luar, jadi tidak ditangani

langsung oleh wali kelas. Tapi sudah ditangani oleh BK dan kesiswaan.”

Ini menggarisbawahi bahwa kasus tawuran, yang dianggap lebih serius dan eksternal, ditangani oleh BK dan kesiswaan. Bu G juga menjelaskan bahwa tindakan lanjut termasuk surat peringatan, pemanggilan orang tua, dan, jika diperlukan, penahanan KJP untuk memberikan efek jera sebelum kembali ke tangan orang tua dengan persetujuan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, tahapan penanganan pelanggaran di SMP Negeri 116 Jakarta dilakukan dengan pendekatan bertahap yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan cara ini, diharapkan peserta didik dapat memahami bahwa tawuran bukan hanya tindakan yang merugikan bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain, serta memberikan dampak negatif terhadap komunitas sekolah secara keseluruhan.

Berikut adalah bagan alur tahapan penanganan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta sesuai dengan penjelasan di atas:



Gambar 4. 12. Bagan Alur Tahapan Penanganan Pelanggaran

4.2.2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta

Penanganan kasus tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan sekolah yang lebih sistematis dan berbasis hukum. Kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan untuk mengendalikan perilaku negatif siswa tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Sub bab ini akan memaparkan temuan penelitian yang fokus pada efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam menurunkan angka tawuran pelajar serta dampaknya terhadap perilaku dan perkembangan karakter peserta didik. Selain itu, sub bab ini juga akan mengidentifikasi kebijakan yang paling berpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut.

Sejalan dengan temuan ini, beberapa pihak di sekolah memberikan pandangan mereka mengenai bagaimana kebijakan yang diterapkan telah berpengaruh terhadap penurunan angka tawuran di kalangan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 19 narasumber, 15 orang menyatakan bahwa kebijakan sudah efektif, sedangkan 4 orang lainnya menganggap belum sepenuhnya efektif. Pak F, salah satu wali kelas, mengungkapkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar dengan menyatakan bahwa

“Iya, dengan tidak adanya kasus tawuran itu, itu adalah satu tolak ukur, tidak ada, jarang ditemukan anak yang berkerumun atau nongkrong ya setelah pulang sekolah itu sudah jelas menunjukkan keberhasilan dari kebijakan.”

Pak F menekankan bahwa tidak adanya kasus tawuran merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan kebijakan sekolah dalam menanggulangi perilaku negatif siswa. Ia menyebutkan bahwa jarangya siswa yang berkumpul atau nongkrong setelah pulang sekolah merupakan tanda lain dari efektivitas kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan yang diterapkan telah berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam perilaku siswa, mengurangi potensi terjadinya tawuran, dan mendorong

disiplin yang lebih baik di kalangan peserta didik. Pernyataan Pak F ini juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Pak AH, Wakil Kepala Sekolah. Ia mempertegas efektivitas kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran dengan menyatakan

“Nah, sudah efektif. Dengan terbukti tidak adanya tawuran lagi di tahun 2023, pokoknya itu saja, sudah tidak ada tawuran lagi. Dan ini juga karena adanya sekolah komunitas, kebijakannya, itu juga termasuk pembinaan kompetensi, apa ya, kerja sama ya. Namanya komunitas belajar. Itu akan membangun, karakter yang positif terhadap peserta didik di sekitar sekolah. Kan begitu.”

Pak AH menjelaskan bahwa kebijakan sekolah telah terbukti efektif dalam menghilangkan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta, khususnya pada tahun 2023. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya tercapai melalui penerapan peraturan yang ketat, tetapi juga berkat adanya program "sekolah komunitas." Program ini, yang dikenal sebagai "komunitas belajar," berperan penting dalam membangun karakter positif di kalangan siswa, memperkuat kerja sama, dan mengembangkan kompetensi yang mendorong lingkungan belajar yang kondusif.

Selain dari perspektif pihak sekolah, penting juga untuk memahami bagaimana para peserta didik melihat dan merasakan efektivitas kebijakan sekolah ini. Oleh karena itu, berikut adalah pandangan beberapa siswa mengenai implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap perilaku mereka sehari-hari. Peserta didik R menuturkan bahwa “Kurang. Ya, percuma, orang-orang itu kan nakal-nakal semua. Kalo dijelasin juga, yaudah, *i dont care*.” R menyatakan ketidakpuasannya terhadap efektivitas kebijakan, menganggap bahwa upaya sekolah sia-sia karena menurutnya beberapa siswa masih saja berperilaku negatif meski telah diberikan penjelasan. Sementara itu, HH, seorang siswa lainnya, berpendapat bahwa

“Kurang, kurangnya, menurutku pengawasan sama kurangnya patroli luar sekolah, walaupun ada, tapi sedikit. Biasanya juga bukan *security* nya juga, sama Pak Naim doang biasanya.”

HH menganggap bahwa kebijakan sekolah masih kurang efektif terutama dalam hal pengawasan dan patroli di luar lingkungan sekolah. Di sisi lain, AAR, siswa kelas 8 dan Ketua OSIS, memiliki pandangan yang lebih positif. Ia menyatakan bahwa

“Menurut saya udah , sudah efektif. Anak-anak juga sudah, sekarang memang, benar-benar kurang banget. Pak Naim juga udah terang-terangan ngomong kalau pagi, alhamdulillah sekarang sekolah kita juga udah nggak ada lagi yang gituan. Kalau masih ada juga langsung ditangepin dengan garcep. Udah nggak ada sih. Udah emang efektif banget lah”

AAR menilai kebijakan sekolah sudah sangat efektif dalam mengurangi tawuran pelajar, menekankan peran penting Pak Naim dalam menegakkan disiplin. Namun, AN, Wakil Ketua OSIS dan siswa kelas 8, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa

“Efektif, itu efektif. Tapi itu, dia itu, orang bebal begitu, udah apa ya, jadinya udah bawaan dari dia sendiri gitu pengen begitu, sudah, terlalu apa ya, kecanduan gitu buat kayak begitu. Mungkin kalo dari sekolahnya mungkin, udah enggak, tapi ya dari temen-temen dari lingkungan rumah. Karena aku juga suka ngeliatin sw, tuh temen aku, si Eki begitu. Masih ikut-ikutan tawuran, gak ada jera nya itu, masih ikut-ikutan. Kadang tuh aku tuh bingung orang-orang kayak begitu. Mereka itu, mereka lagi tawuran, terus sempet-sempetnya di videoin, ngerti gak sih? kamu tau gak sih videoin kayak, ayok maju, weh mundur, ayo. Sambil memegang HP, memegang senjata, maju-mundur, begitu, terus di edit, bener...”

AN menyoroti bahwa meskipun kebijakan sekolah efektif, ada faktor eksternal dari lingkungan rumah dan teman-teman yang tetap mempengaruhi perilaku negatif siswa. GR, seorang siswa kelas 8 yang juga sekretaris OSIS, menambahkan bahwa “Kalau dari situ sih efektifnya tergantung orangnya. Takut atau gak. Buat yang memang. Takutnya karena Pak Naim sih...”

GR menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan juga bergantung pada ketakutan siswa terhadap sosok disiplin seperti Pak Naim, yang menjadi faktor pengendalian. Temuan di atas menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar narasumber merasa kebijakan sekolah telah berjalan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus tawuran sejak tahun 2023, yang menandakan keberhasilan kebijakan sekolah dalam menciptakan perubahan signifikan terhadap perilaku peserta didik.

Dari hasil penelitian, terdapat kebijakan tertentu yang terbukti sangat berpengaruh dalam mengurangi kasus tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Kebijakan tersebut mencakup pencabutan Kartu Jakarta Pintar

(KJP) dan pemberian sanksi DO (*drop out*) kepada peserta didik yang terlibat dalam tawuran. Kebijakan ini terbukti efektif karena menimbulkan dampak signifikan pada peserta didik dan orang tua mereka.

Hasil wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki efek jera yang kuat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peserta didik R, mengatakan bahwa

"Kebijakan tentang ada pencabutan KJP, dan men DO setiap pelajar yang mengikuti tawuran. Adanya kebijakan ini setiap orang tua pasti tidak mau anaknya di DO dan di cabut KJP, maka setiap orang tua pasti selalu memerhatikan anaknya."

Selain itu peserta didik HHM menambahkan bahwa "Do mutlak pastinya sangat membuat mereka takut tapi beberapa anak tidak peduli karena mereka kira itu tidak serius padahal kan asli" Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan pencabutan KJP dan DO tidak hanya memberikan efek jera kepada peserta didik, tetapi juga mendorong orang tua untuk lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak mereka. Dengan adanya risiko yang jelas dan dampak langsung pada kesejahteraan anak, orang tua cenderung lebih peduli terhadap perilaku anak mereka di sekolah. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa penegakan aturan yang tegas, jika disertai dengan keterlibatan orang tua, dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam menurunkan angka tawuran pelajar.

Selain itu, penerapan sanksi penahanan sementara Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga terbukti efektif dalam memberikan efek jera kepada peserta didik. Bu NO menyatakan bahwa sanksi ini membuat orang tua ikut berperan dalam mengawasi perilaku anak mereka, dengan mengatakan bahwa

"Untuk sementara, iya. Efek sanksi dari penarikan KJP sementara. Boleh lah. Maksud saya anak-anak agak jera. Minimal orang tuanya ikut ngomel, ya kan? Karena duitnya ditahan. Kalau engga, biasanya mungkin ngambil sehari udah. Tapi kalo ini engga. Karena berasa banget kalau orang tua ga bisa ngambil duit."

Berdasarkan pernyataan Bu NO tersebut, sanksi penahanan sementara dana KJP memiliki pengaruh dalam memberikan efek jera pada peserta didik dan meningkatkan keterlibatan serta pengawasan orang tua terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam kegiatan tawuran. Selain itu,

perhatian dan pendampingan oleh guru juga berperan penting dalam keberhasilan kebijakan sekolah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak NA, seorang wali kelas bahwa

“Kalau saya Ini sangat efektif sih, karena anak itu bisa diperhatikan, mendapat perhatian karena yang kita tahu kan mereka kenapa. Kalau ditanya kenapa mereka bisa terlibat, masa mereka ya jadi kita juga paham. Mereka merasa diperhatikan. Sangat efektif. Dan saya juga kebetulan memang masuk dan tahu anak yang dimaksudkan itu, karena saya Wali kelas ini di kelas 8 saat itu. Tapi kesini semakin guru banyak yang terlibat langsung memahami dan tentunya melakukan motivasi Alhamdulillah anak itu, makanya Saya bilang tadi, mereka setelah kelas 9 kayaknya adem saja, dan merasa, mereka kan masalahnya mungkin di rumah ya, butuh perhatian kalau guru juga di sekolah merasa abai, mungkin akan semakin mereka mungkin sampai semakin lulus juga akan semakin mereka habit mereka. Tapi alhamdulillah sejauh ini, karena saya juga Wali kelasnya dan merasa sering dipanggil untuk pendampingan, ketika mereka di sini dipanggil oleh guru BK walaupun mereka masuk di ruang Kurikulum. Alhamdulillah jadi sudah sangat ngerasanya sudah sangat efektif.”

Pendampingan oleh guru tidak hanya memberikan perhatian yang diperlukan oleh peserta didik, tetapi juga memberikan motivasi yang mendorong perubahan perilaku, terutama bagi peserta didik yang pernah terlibat dalam tawuran. Pak F, seorang wali kelas lainnya, memberikan pandangan yang lebih tegas mengenai sanksi yang diterapkan. Menurut beliau

“Ya, kalau untuk efektif namanya perkembangan kan, semakin tegas suatu sanksi semakin bisa dia jera. Menurut saya ya, kalau selama ini ya, Alhamdulillah mereka sudah cukup jera. Tapi alangkah baiknya kalau sampai terjadi nih, suatu kapan, berulang-ulang harusnya ada sanksi dibolehkan dia di kembalikan ke orang tua, selain skor ya, alias di dikeluarkan, pindah sekolah atau bagaimana. Apalagi yang pentolannya, biangnya bahasa ini, apa ya pelopornya. Karena membuang yang satu atau menyingkirkan yang satu menyelamatkan yang 600 lebih, daripada mempertahankan satu itu akan terbawa semua dan juga tentunya, efek jera buat yang lain buat, membuat dia berpikir.”

Meskipun sanksi yang telah diterapkan cukup efektif, Pak F menekankan perlunya sanksi yang lebih tegas, terutama terhadap peserta didik yang berperan sebagai pemrakarsa tawuran, untuk menghilangkan akar masalah secara menyeluruh.

Meskipun kebijakan sekolah sudah terbukti efektif, masih ada peserta didik yang tidak sepenuhnya memahami kebijakan dan tata tertib yang berlaku. Hal ini terlihat dari wawancara dengan beberapa peserta didik. Misalnya, MFR, peserta didik kelas 9, mengatakan, “Kalo kebijakan sih aku kurang tahu, paling anak-anak OSIS tahu.” Sementara itu, HH, peserta didik kelas 9 lainnya, hanya mengetahui sanksi yang diterapkan, “Tahu, ada di depan satpam itu ada tulisan akibat-akibat tawuran, di dekat pos nya, di atasnya, jika terlibat tawuran, akibatnya.”

Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh R, peserta didik kelas 9 lainnya, yang menyatakan secara singkat, “Paling KJP dicabut, terus sama diskors.” serta RRS yang menambahkan bahwa

“Kebijakannya, ada, paling cuma disuruh, kek, setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah, kagak boleh main, gak boleh nongkrong-nongkrong gitu, dipantau sama guru begitu. Guru nya ngikutin begitu, kek mantau.”

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian peserta didik lebih fokus pada sanksi yang mereka dapatkan jika melanggar tata tertib, sementara pemahaman mereka terhadap kebijakan secara keseluruhan masih terbatas. Namun, tidak semua peserta didik memiliki pemahaman yang terbatas. Beberapa peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan dan program yang diterapkan sekolah. Misalnya, TR, peserta didik kelas 9, mengingat seminar yang diadakan oleh pihak kepolisian, “Tahu. Pernah ada seminar dari kepolisian, dari Tanjung Priok.”

Selain itu, GR, peserta didik kelas 8 dan sekretaris OSIS, menjelaskan lebih detail tentang kebijakan sekolah,

“Di sini, yang di tangga sini, kita kayak ada undang-undangnya gitu. Terus kayak gak tahu di nomor berapa bagian berapa. Tapi ada yang tentang tawuran gitu sih. Kayak bakal kena sanksi. Terus kalau program, mungkin kayak... Himbauan aja sih. Setiap hari, setiap Jumat. Setiap Jumat kelas pulang cepat. Kamis juga kelas 7-8 pulang cepat. Suka dihimbau juga. Setiap Senam. Senam anak cowok. Suka dihimbau itu. Setiap dua minggu sekali. Terus, setiap ada acara gitu. Kayak, hari guru kemarin. Ada yang bahas juga. Dari kayak polisi. TNI juga ada, TNI, polisi juga ada yang bahas itu. Jadi kayak kita paling, yang memang lagi ngumpul semuanya ada. Di lapangan atau kayak di satu forum. Itu juga diangkat”

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta sudah menunjukkan efektivitas. Penurunan angka kasus tawuran hingga 0 dalam kurun waktu 3 tahun adalah bukti keberhasilan ini. Namun, kebijakan ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau aktivitas peserta didik di luar sekolah. Kerja sama dari orang tua, masyarakat, pihak berwajib, dan pemerintah tetap diperlukan untuk memberantas aksi tawuran secara menyeluruh.

4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta

4.2.3.1. Faktor Pendukung

Dalam penerapan kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta, faktor pendukung memainkan peran yang sangat penting. Faktor-faktor ini memperkuat efektivitas kebijakan dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan wawancara dengan informan, beberapa faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah kerja sama yang solid antara sekolah, masyarakat, dan pihak berwajib.

Kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pihak berwajib merupakan faktor utama dalam mendukung implementasi kebijakan. Bu NO mengungkapkan bahwa

“Sekolah udah ngadain kerja sama dengan lingkungan ya, dengan RT/RW di setempat, kemudian dengan sama-sama security kan. Terus dengan Bimas, Bimas RW sini, Sama kepolisian juga udah.”

Pernyataan ini didukung oleh Wakil Kepala Sekolah Bu G yang menambahkan

“...karena kita sekolah, masyarakat, pihak kepolisian itu konsen ya. Sejak dipasang sepandu peringatan ya, jadi bagi siswa yang masih mengikuti tawuran kan dia sudah tahu sanksi-sanksi yang akan diberikan.”

Kerja sama ini juga melibatkan orang tua peserta didik dalam pembinaan pencegahan tawuran. Bu G menjelaskan

“Biasanya keterlibatan orang tua itu, kita hanya memberi pembekalan ya, pembekalan kepada orang tua dari mulai setiap tahun ajaran baru ya, setiap tingkatan dari kelas 7, 8 dan 9. Kita tidak punya program khusus untuk misalkan *parenting day*, tidak punya, tapi kita lebih kepada pembekalan setahun sekali, setelah awal tahun ajaran baru masuk, apabila ada siswanya atau putranya terlibat dalam tawuran, baru orang tuanya kita adakan pemanggilan.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta adalah adanya kerja sama yang solid antara sekolah, masyarakat, pihak berwajib, dan orang tua. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta ditunjang oleh upaya pembekalan kepada orang tua dan penerapan peraturan yang ketat.

Selanjutnya, dalam memahami keberhasilan kebijakan ini, penting untuk memperhatikan bagaimana seluruh warga sekolah berperan aktif dalam pelaksanaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak NA bahwa

“Yang pasti melibatkan Guru BK kemudian kesiswaan dan wali kelas. penjaga keamanan pengawasan saja, misalnya mereka di mata-matai, ke mana nih yang kita curigai, mereka cuma ini saja, Informan saja. Sebatas informan tapi tidak ada kewenangan, tindakan sepenuhnya, paling tinggi itu ke Pak kurikulum. Tapi kalau Kepala sekolah karena ada ini satu, duanya itu penanganannya tadi, tapi kalau sudah ketiga kali baru itu Kepala sekolah ya karena sudah tugas dan fungsinya kan.”

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. Peran aktif seluruh warga sekolah, termasuk Guru BK, kesiswaan, dan wali kelas, terbukti penting meskipun mereka tidak memiliki kewenangan penuh dalam tindakan. Kontribusi mereka sebagai informan dalam memantau dan melaporkan aktivitas siswa merupakan bagian integral dari upaya pengendalian tawuran. Selanjutnya, kerja sama dengan orang tua dan masyarakat juga merupakan faktor penting. Pak F selaku wali kelas menambahkan bahwa

“ Ya, kerja sama yang baik antara komponen sekolah dan masyarakat serta aparat keamanan dan juga pemerintah. Kenapa saya katakan demikian, contoh, si A menjadi pentolan, sudah berkali-kali diingatkan di sekolah masih begitu, kan harus dikeluarkan, sebaiknya gitu menurut saya untuk efek jera. Tapi, kalau sama pemerintah gak boleh ya, ya kan

akhirnya, kan gak apa-apa gak dikeluarkan misalnya. Atau, sekolah ini tegas, tapi masyarakat diem saja, contoh ngeliat tawuran, gak lapor atau anak nongkrong kan, awalnya tawuran itu kan nongkrong, masyarakat membiarkan. Itu berarti kan gak ada perhatian, gak ada kerja sama. Kalau dia langsung foto, cari tahu sekolah di mana. kirim ke sekolah foto itu ya nah, ada kan, apalagi nongkrong di sekitar sini kan, masih ketahu, dekat dari sini. Itu kerja sama. Nah, orang tua juga sama ketika anaknya, belum pulang pada waktunya cepet nanya wali kelas. itu lah ya kan supaya tidak terjadi tawuran, jadi tahu karena kemana-mana. Jadi itulah, adanya kerja sama yang baik sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan.”

Bu G sebagai wakil kepala sekolah menuturkan bahwa

“...sepanjang kita ada usaha dan upaya. Yang penting kita mengikuti aja aturan atau regulasinya, kita untuk mencegah terjadinya kita tawuran, kita harus melibatkan BIMAS. Apabila kita mendengarkan informasi, ada indikasi tawuran, kita langsung cepat respon, cepat tanggap, sehingga dari pihak Polsek atau BIMAS itu sendiri cepat ke TKP.”

Kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua, masyarakat, serta aparat keamanan dan pemerintah juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas kebijakan ini. Pak F menekankan pentingnya kerja sama ini dengan mengingatkan bahwa tanpa adanya kolaborasi yang solid, misalnya dalam hal pelaporan kejadian tawuran atau pengawasan aktivitas anak di luar sekolah, kebijakan yang ada tidak akan berjalan optimal. Selain itu, Bu G menunjukkan bahwa upaya pencegahan juga melibatkan respon cepat terhadap indikasi tawuran, dengan dukungan dari pihak Polsek atau BIMAS.

Menurut Pak F faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah yaitu “...adanya kerja sama yang baik sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan.” Himbuan dari dinas, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019, merupakan pendorong utama. Bu NO berpendapat bahwa

“Pendorong utamanya pasti himbuan dari dinas. Otomatis ya. Itu pendorongnya. Terus. Kayaknya rata-rata itu deh. Selebihnya dari tahun ke tahun namanya tawuran semua juga gak ada setuju. Tapi ga ada. Pendorong utamanya itu doang kayaknya.”

Menurut pendapat Pak F dan Bu NO selaku wali kelas, faktor pendorong implementasi kebijakan dalam mengurangi tawuran pelajar

merupakan himbauan dinas serta adanya kerja sama dari berbagai pihak yaitu sekolah, orang tua, masyarakat, pihak berwajib, dan pemerintah. Selain itu, Pak NA berpendapat bahwa

“Semuanya kan mengacu pada tata tertib sekolah ya, peraturan yang sudah dibuat dari mereka sudah tanda tangan disepakati yang diketahui oleh orang tua dan itu juga yang menjadi komitmen kuat kayaknya, sekalipun nggak semua dihapal, tapi sebenarnya mereka pernah ingat ya atau pernah berjanji bahwa ada aturan yang mereka harus implementasikan demi menjaga ketertiban di sekolah maupun di luar. Dan di setiap upacara juga mereka punya janji, janji siswa nah itu yang secara langsung mungkin ya, karena itu dibaca setiap hari senin sekalipun nggak sepenuhnya dipahami, tapi saya rasa itu juga cukup berpengaruh dalam memberi *warning* kepada mereka sekadar menginformasikan wah ada loh ada ya, batasan yang kalian boleh, yang kalian boleh dan tidak boleh, lakukan baik di dalam sekolah, maupun di luar sekolah.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, faktor pendorong utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi himbauan dari dinas pendidikan seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019, serta adanya komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Spanduk dan poster mengenai sanksi bagi pelaku tawuran yang dipasang di lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal juga memainkan peran penting dalam mengingatkan peserta didik mengenai larangan tawuran.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan pendorong tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Kerja sama yang solid, komitmen terhadap aturan, serta respons cepat terhadap indikasi tawuran merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi seluruh siswa.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan pendorong tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Kerja sama yang solid, komitmen terhadap aturan, serta respons cepat terhadap indikasi tawuran merupakan

kunci utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi seluruh siswa.

Sebagai penutup, dalam melanjutkan pembahasan mengenai faktor penghambat, penting untuk memahami tantangan-tantangan yang mungkin menghadapi implementasi kebijakan, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

4.2.3.2. Faktor Penghambat

Dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta, selain faktor pendukung yang mempermudah pelaksanaan kebijakan, terdapat juga kendala yang perlu diatasi agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Identifikasi faktor penghambat ini sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat.

Salah satu faktor penghambat utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap peserta didik. Pak NA mengungkapkan bahwa

“Kalau penghambatnya sejauh ini kalau yang saya pahami, kalau penghambat terkait dengan penghambatnya ya mungkin pengawasan aja jadi itu yang bikin kadang yang namanya anak kan, selalu ada cara untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali kita ya, jadi pengawasan aja kan yang mungkin tidak sepenuhnya efektif, apalagi cuma melibatkan beberapa bagian dari bidang-bidang yang ada di sekolah, anak itu kadang kita kurang ini dari kurang record begitu...”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak sepenuhnya efektif, terutama dalam memantau perilaku peserta didik di luar lingkungan sekolah, merupakan kendala signifikan dalam implementasi kebijakan. Sekolah menghadapi tantangan dalam mengatur dan mendisiplinkan siswa ketika mereka berada di luar area sekolah, di mana pihak sekolah tidak memiliki wewenang penuh. Bu NO menambahkan bahwa penghambat utama bukan berasal dari dalam sekolah, melainkan faktor eksternal seperti alumni. Beliau menjelaskan bahwa

“Ga ada. Kalo di sekolah gak ada ya. Karena hampir semua guru, semua komponen di sekolah, semua tidak setuju adanya tawuran. Jadi kalo dibilang penghambat ga ada. Ga ada penghambat. Oh penghambat utama ada Alumni. Kita tidak bisa mengikat alumni itu kan? Kalo kebijakan sekolah sih ga ada. Yang menghambat ga ada. Tapi kalo dari luar itu alumni. Kita cuman rata-rata dari luar doang. Yang agak sulit dikunci. Walaupun ada ikatan alumni 116 tapi kan anak-anak yang baru keluar itu, yang masuk SMK itu belum masuk alumni 116 doang. Jadi alumni yang ada di ikatan itu bukan anak-anak yang baru. Rata-rata yang udah tua-tua. Jauh kan? Rata-rata belum, ga dimasuk mungkin karena mungkin juga orang alumni yang merasa mereka belum penting, apa gimana jadi kan ga dimasukin ke grup. Malah yang ikut tauran itu ya emang mereka baru lulus gitu lah. Yang biangnya itu.”

Menurut Bu NO, alumni yang tidak terikat dengan peraturan sekolah dan tidak tergabung dalam ikatan alumni resmi sering kali menjadi faktor penghambat. Alumni yang baru lulus, terutama yang tidak terdaftar dalam kelompok alumni resmi, dapat menjadi pemrakarsa tawuran pelajar. Beberapa narasumber lainnya, seperti Pak F dan Pak AH, berpendapat bahwa tidak ada penghambat yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Pak F mengatakan, “Kalau untuk saat ini, itu tidak ada, tidak ada sih.” Pak AH selaku kepala sekolah bidang kurikulum juga menyatakan

“Penghambat? Hambatannya, gak ada kayaknya ya. Jadi, hambatannya paling ini ya, tapi kalo manggil orang tua, andaikan dulu itu manggil orang tua, tapi juga dateng. Gak ada, gak ada hambatan lah.”

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bu G selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan “Insyaallah sih kayaknya gak ada semua, berkerjasama dengan baiknya seperti ini.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Selain itu, faktor eksternal seperti alumni yang tidak terikat dengan peraturan sekolah juga menjadi kendala signifikan. Meskipun beberapa narasumber tidak mengidentifikasi penghambat lain, penting untuk memperhatikan

tantangan yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah pengawasan dan keterlibatan alumni dalam upaya pencegahan tawuran.

Dengan memahami dan menangani faktor-faktor penghambat ini, diharapkan kebijakan pengurangan tawuran dapat diterapkan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi keamanan dan ketertiban di sekolah.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam temuan-temuan dari penelitian mengenai peran kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Pembahasan dimulai dengan menggambarkan fenomena tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta, termasuk intensitas kejadian, pihak-pihak yang terlibat, dan faktor-faktor relevan yang mempengaruhi situasi tersebut. Fokus utama pembahasan kemudian beralih kepada analisis kebijakan sekolah yang telah diimplementasikan, efektivitasnya dalam mengatasi tawuran, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

SMP Negeri 116 Jakarta, yang terletak di Sunter Permai Raya, Jakarta, memiliki latar belakang sebagai sekolah yang dahulu dikenal dengan citra buruk akibat sering terlibat tawuran pelajar. Namun, upaya-upaya reformasi yang dilakukan oleh pihak sekolah telah membawa perubahan signifikan, sehingga kasus tawuran yang melibatkan peserta didik mengalami penurunan drastis hingga mencapai angka nol sejak tahun 2021 hingga 2023. Fenomena tawuran pelajar, yang sebelumnya didorong oleh dendam dan perselisihan antar sekolah (Setyawan, 2014), kini menunjukkan penurunan, meskipun masih terdapat laporan kasus tawuran di luar lingkungan sekolah yang tidak terjangkau oleh kebijakan internal sekolah.

Dalam kerangka teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis Coser, konflik sosial muncul sebagai hasil dari ketegangan dan pertentangan

antar kelompok sosial dalam masyarakat (Tualeka, 2017). Teori ini relevan dalam memahami dinamika tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta, di mana ketegangan antar kelompok pelajar dan faktor-faktor sosial eksternal berkontribusi terhadap peristiwa tawuran. Ahmad Fauzan Shiddiq dalam penelitiannya mengenai tawuran pelajar mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi keterlibatan remaja dalam tawuran: faktor internal, keluarga, sekolah, dan lingkungan (Shiddiq, 2021). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal, seperti dorongan emosi dan kebutuhan akan pengakuan sosial, serta faktor lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung, berperan signifikan dalam terjadinya tawuran.

Meskipun faktor sekolah saat ini lebih berfokus pada penyediaan kegiatan positif melalui program ekstrakurikuler, faktor eksternal tetap memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan. Misalnya, ajakan dari alumni dan solidaritas kelompok di lingkungan tempat tinggal yang memiliki pengaruh buruk masih dapat memicu tawuran. (Malihah, Maftuh, & Amalia, 2014) menyebutkan bahwa solidaritas dalam kelompok, yang sering kali dipicu oleh kedekatan lokasi dan minat yang sama, dapat mengarah pada konflik dengan kelompok lain, terutama dalam lingkungan yang penuh persaingan dan permusuhan.

Selanjutnya, pembahasan ini akan menganalisis secara rinci kebijakan sekolah yang telah diimplementasikan, efektivitas kebijakan sekolah dalam mengatasi tawuran dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Pembahasan ini juga akan membahas bagaimana kebijakan yang diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta berhasil mereduksi kasus tawuran pelajar dan mengatasi tantangan yang muncul, termasuk pengaruh dari faktor eksternal yang masih mempengaruhi peserta didik.

4.3.1. Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar

Kebijakan sekolah merujuk pada keputusan dan aturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan untuk mengatur dan mengelola kegiatan internal

serta eksternal, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Di SMP Negeri 116 Jakarta, kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum hingga tata tertib, dengan fokus khusus pada pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar. Kebijakan ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman operasional sehari-hari tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kultur sekolah yang mendukung nilai-nilai positif dan mencegah perilaku negatif seperti tawuran.

Menurut Syafaruddin (2008) yang dikutip dalam (Setyawan, 2014), kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang berasal dari kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan dan melibatkan keputusan serta kerja sama dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan, seperti dewan sekolah dan administrator. Duke dan Canady (Setyawan, 2014) menegaskan bahwa kebijakan sekolah adalah hasil keputusan yang melibatkan individu atau kelompok dengan kewenangan hukum, serta melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan. (Samsudi & Hosaini, 2020) menjelaskan bahwa kebijakan sekolah merupakan pernyataan mengenai tujuan dan petunjuk untuk mencapainya, dengan proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk menguji keefektifan dan implementasinya dalam praktik sekolah. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa kebijakan sekolah adalah serangkaian keputusan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik, efektif, dan efisien dalam mendukung pembelajaran dan pencapaian sasaran pendidikan.

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar, kebijakan sekolah memainkan peran yang sangat penting. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil mencakup perumusan kebijakan yang melibatkan identifikasi informasi mengenai kondisi masa depan berdasarkan data saat ini, untuk mengembangkan alternatif kebijakan yang efektif (Setyawan, 2014). Pembentukan aturan dan tata tertib yang jelas mengenai perilaku dan konflik antar peserta didik, termasuk larangan tawuran dan kekerasan, dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan

di sekolah (Samsudi & Hosaini, 2020). Selain itu, program pendidikan dan penyuluhan yang melibatkan guru, konselor, dan pihak terkait untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif tawuran dan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan sekolah juga sangat penting (Rangkuti & Maksum, 2019). Meningkatkan pengawasan di area-area rawan tawuran dengan melibatkan guru dan staf sekolah bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya tawuran (Setyawan, 2014). Keterlibatan orang tua dalam penanganan tawuran juga penting, karena partisipasi keluarga dapat mendukung keberhasilan kebijakan sekolah (Rangkuti & Maksum, 2019). Terakhir, penerapan sanksi tegas bagi pelajar yang terlibat dalam tawuran diperlukan untuk menegakkan disiplin dan mencegah terulangnya perilaku negatif (Samsudi & Hosaini, 2020). Melalui penerapan kebijakan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan SMP Negeri 116 Jakarta dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan bebas dari tawuran pelajar. Implementasi kebijakan ini harus didukung oleh pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebelum penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019, penanganan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta didominasi oleh pendekatan internal sekolah yang terbatas. Pada masa lalu, kebijakan penanganan tawuran lebih menekankan pada sanksi administratif dan tindakan preventif yang tidak melibatkan penegakan hukum secara langsung. Pendekatan ini sering kali kurang efektif karena tidak mampu memberikan efek jera yang cukup signifikan bagi pelaku tawuran. Keterbatasan sumber daya sekolah serta kurangnya koordinasi dengan pihak berwajib turut memperburuk situasi, yang menyebabkan penanganan tawuran tidak optimal dan seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan (Setyawan, 2014).

Dengan diberlakukannya KUHP pada tahun 2020, terdapat penguatan dalam penanganan tawuran melalui dasar hukum yang lebih jelas. Pasal-

pasal KUHP yang relevan, seperti Pasal 170 (tindakan kekerasan terhadap orang), Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 355 (penganiayaan berat), Pasal 358 (penganiayaan ringan), serta Pasal 489 (pengancaman), memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk menangani kasus tawuran. Pasal-pasal ini memperkuat wewenang aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tawuran dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara institusi pendidikan dan pihak berwajib (Wahyuni, 2022). Implementasi KUHP mendukung upaya sekolah dalam memperkuat kebijakan internalnya, sejalan dengan prinsip kebijakan sekolah ramah anak yang menekankan pada penegakan hukum yang adil dan efektif (Rangkuti & Maksum, 2019).

Seiring dengan perubahan tersebut, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019 diperkenalkan untuk mendukung penegakan hukum lebih lanjut di tingkat sekolah. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penanganan tawuran pelajar dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat, dengan ancaman pencabutan Dana Bantuan Pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelaku tawuran oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan ini menghubungkan kebijakan internal sekolah dengan kebutuhan dasar hukum yang lebih kuat, serta responsif terhadap situasi kekerasan di sekolah. Pengaturan ini selaras dengan prinsip pencegahan dan penanggulangan tawuran yang digariskan dalam Peraturan Gubernur, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat pendidikan termasuk peserta didik, pendidik, dan orang tua (Sari, 2023).

Namun, meskipun KUHP dan Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Penegakan hukum yang lebih ketat dapat memicu pergeseran dalam dinamika kekerasan di sekolah, yang memerlukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan. Penerapan sanksi hukum harus diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif dan pencegahan yang holistik, mengingat pentingnya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan kebijakan sekolah ramah anak (Rangkuti & Maksum, 2019).

Dalam konteks kebijakan ini, Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (Anarta, Fauzi, Rahmadhani, & Santoso, 2021) menawarkan kerangka penting untuk memahami bagaimana kebijakan sekolah dapat mempengaruhi perilaku pelajar. Hirschi menyatakan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat cenderung lebih patuh terhadap norma sosial. Ikatan sosial ini mencakup hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Di SMP Negeri 116 Jakarta, kebijakan yang memperkuat ikatan sosial antara peserta didik dan institusi pendidikan—melalui kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler—dapat membantu mengurangi kemungkinan terlibat dalam tawuran.

Menurut Hirschi (Latief & Zulherawan, 2020), terdapat empat unsur utama dalam teori kontrol sosial yang berkontribusi pada kepatuhan terhadap norma sosial. Pertama, attachment mengacu pada kapasitas seseorang untuk menghayati norma-norma sosial. Individu yang memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat cenderung menghargai norma dan aturan yang berlaku. Kedua, commitment melibatkan estimasi manfaat dan risiko dari perilaku menyimpang. Individu yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki reputasi baik cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk mematuhi norma. Ketiga, involvement mengacu pada anggapan bahwa individu yang sibuk dengan berbagai aktivitas konvensional tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Terakhir, belief berkaitan dengan keyakinan terhadap aturan sosial dan norma moral. Individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap norma sosial akan lebih cenderung mematuhi aturan.

Dalam penerapan kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta, kebijakan yang dirancang untuk memperkuat ikatan sosial ini selaras dengan konsep kontrol sosial yang dijelaskan oleh Hirschi. Dengan memperkenalkan program pembiasaan dan ekstrakurikuler yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas yang positif, sekolah berupaya untuk memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kecenderungan pelajar untuk terlibat dalam tawuran (Yuliyanti, 2023). Selanjutnya, kajian pustaka juga menunjukkan bahwa implementasi kontrol sosial dalam konteks sekolah dapat

mencakup berbagai jenis kontrol seperti preventif, represif, dan gabungan (Yuliah, 2020). Kontrol sosial preventif bertujuan untuk mencegah penyimpangan sebelum terjadi, sementara kontrol sosial represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi untuk memulihkan keharmonisan. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelajar untuk menghindari perilaku menyimpang dan terlibat dalam aktivitas yang lebih produktif.

Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip teori kontrol sosial, diharapkan dapat efektif dalam mengurangi tawuran pelajar dan mempromosikan lingkungan sekolah yang lebih kondusif.

Contoh konkret penerapan Teori Kontrol Sosial di SMP Negeri 116 Jakarta adalah kegiatan pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk memperkuat ikatan sosial peserta didik. Program “Pembiasaan Positif” yang diterapkan di sekolah mencakup rutinitas harian yang melibatkan kegiatan seperti pengembangan karakter melalui program mentoring, kegiatan sosial dalam bentuk kerja bakti, dan kegiatan kelas seperti diskusi kelompok mengenai nilai-nilai positif. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk budaya positif di sekolah dan memperkuat hubungan antara peserta didik dengan lingkungan sekolah mereka.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memperkuat hubungan sosial di sekolah. Misalnya, peserta didik yang aktif terlibat dalam program “Pembiasaan Positif” dan kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan sekolah dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan teman dan guru mereka. Hal ini berkontribusi pada pengurangan frekuensi tawuran. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan dalam pengawasan dan keterlibatan orang tua yang belum optimal.

Misalnya, program “Pembiasaan Positif” yang melibatkan rutinitas harian dan kegiatan seperti kerja bakti dan diskusi kelompok tentang nilai-nilai positif dirancang untuk membentuk kultur sekolah yang positif. Kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra menyediakan kesempatan bagi

peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerja sama tim, yang mendukung teori Hirschi tentang penguatan ikatan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang terlibat aktif dalam kegiatan ini menunjukkan penurunan keterlibatan dalam tawuran, mendukung efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks teori kontrol sosial.

Teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III sangat relevan dalam memahami dinamika penerapan kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta. Edwards III menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana kebijakan), dan struktur birokrasi (Yuliah, 2020). Dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta, penerapan teori ini terlihat jelas dalam praktik sehari-hari. Komunikasi antar pihak terkait dilakukan melalui koordinasi rutin dan pembentukan tim implementasi kebijakan. Kerja sama yang erat antara sekolah, orang tua, dan pihak berwajib merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal sikap pelaksana kebijakan dan koordinasi antara berbagai pihak. Hal ini mencerminkan penekanan Edwards III bahwa komunikasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang memadai, disposisi yang positif dari pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang jelas adalah elemen-elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Yuliah, 2020). Selain itu, teori implementasi kebijakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn juga memberikan perspektif tambahan, yang menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk penerapan kebijakan yang efektif mencakup kondisi eksternal yang mendukung, alokasi sumber daya yang cukup, serta komunikasi dan koordinasi yang baik (Yuliah, 2020). Penerapan prinsip-prinsip ini di SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan upaya yang serius dalam mengatasi tantangan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi tawuran pelajar secara efektif.

Contoh konkret penerapan Teori Implementasi Kebijakan dapat dilihat dalam kerja sama yang erat antara SMP Negeri 116 Jakarta dengan pihak berwajib dan organisasi masyarakat. Misalnya, sekolah menjalin kerja sama dengan kepolisian setempat untuk memberikan pelatihan mengenai penanganan tawuran dan pencegahan kekerasan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan penegakan tata tertib dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar kebijakan merupakan bagian dari strategi implementasi yang dilakukan. Meskipun upaya ini ada, tantangan praktis seperti kurangnya penegakan tata tertib yang konsisten dan koordinasi yang tidak selalu efektif dengan pihak berwajib menjadi hambatan yang perlu diatasi. Evaluasi terhadap kebijakan ini terintegrasi dalam evaluasi penanggulangan kekerasan saat ANBK. Meskipun ANBK dilaksanakan secara berkala, frekuensi evaluasi yang kurang sering untuk mengikuti perkembangan efektivitas kebijakan tetap menjadi isu penting.

KUHP memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk penanganan tawuran, dengan pasal-pasal seperti Pasal 170 dan 351 memberikan landasan untuk penegakan hukum yang lebih tegas. Integrasi KUHP dalam kebijakan sekolah mendukung teori-teori tersebut dengan memberikan dukungan hukum yang diperlukan untuk menegakkan aturan dan sanksi terhadap pelaku tawuran. Selain itu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019 memperkuat dasar hukum dan mengatur tentang pencabutan Dana Bantuan Pendidikan KJP bagi pelaku tawuran, menunjukkan keterkaitan dengan kebutuhan dasar hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap situasi kekerasan di sekolah.

Setelah memahami pengaruh ikatan sosial dalam mengurangi tawuran pelajar, penting untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor lain memengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini termasuk komunikasi yang efektif, disposisi pelaksana kebijakan, serta dukungan eksternal seperti keterlibatan orang tua dan pihak berwajib. Monitoring dan evaluasi berkala memainkan peran krusial dalam mengembangkan dan menilai efektivitas kebijakan. Pengumpulan data mengenai frekuensi tawuran, efektivitas sanksi, serta umpan balik dari peserta didik, orang tua,

dan staf sekolah akan membantu menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ini tidak hanya fokus pada penguatan ikatan sosial di dalam sekolah tetapi juga memperhitungkan pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi perilaku peserta didik.

Dalam kajian pustaka di Bab II, (Setyawan, 2014) menyoroti pentingnya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan kepolisian dalam implementasi kebijakan untuk mengatasi tawuran pelajar. Temuan penelitian Setyawan menyatakan bahwa kebijakan sekolah yang mencakup tata tertib, layanan bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler, sangat bergantung pada dukungan eksternal dan kerja sama berbagai pihak. Hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan (Yuliah, 2020).

(Utami, 2017) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah dalam menangani kenakalan remaja melibatkan komitmen tinggi dari semua warga sekolah dan orang tua. Penelitian ini menyebutkan bahwa upaya kuratif, represif, dan preventif perlu diimbangi dengan dukungan yang optimal dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Ini mendukung temuan bahwa kebijakan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, serta evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan (Subarsono, 2005, dikutip dalam (Setyawan, 2014)).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SMP Negeri 116 Jakarta telah menerapkan kebijakan yang sesuai, tantangan besar masih ada dalam hal sumber daya dan dukungan eksternal. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik yang mencakup penegakan tata tertib dan sanksi yang lebih tegas serta peningkatan keterlibatan orang tua untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Sebagai tambahan, penelitian (Sisca & Alhakim, 2022) yang menggunakan teori ikatan sosial Hirschi menggarisbawahi bahwa lemahnya keterikatan dengan keluarga, sekolah, dan komunitas merupakan faktor signifikan dalam kenakalan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menguatkan ikatan sosial di dalam dan luar sekolah berpotensi menurunkan tingkat tawuran. Temuan ini konsisten dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pada pentingnya komunikasi dan disposisi pelaksana kebijakan dalam mengatasi masalah (Yuliah, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasi tawuran pelajar serta menyoroti kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan penyesuaian terus-menerus berdasarkan evaluasi dan umpan balik yang diperoleh.

Penelitian ini memperkuat temuan dari peneliti terdahulu yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis komunitas dan pendekatan preventif dalam menangani tawuran pelajar. Sebagaimana dikemukakan oleh (Setyawan, 2014) dan (Utami, 2017), kebijakan yang melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terbukti efektif dalam mengurangi kenakalan remaja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 116 Jakarta telah menerapkan kebijakan yang mengutamakan penguatan ikatan sosial dan penegakan hukum, sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dibahas oleh George C. Edwards III (Yuliah, 2020), yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, meskipun kebijakan yang ada sudah menunjukkan efektivitas dalam membentuk karakter peserta didik dan mengurangi tawuran, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan dalam implementasinya, seperti kurangnya pengawasan dan dukungan orang tua. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Daliana & Rasyid, 2020) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan koordinasi dengan

pihak eksternal merupakan faktor pendukung yang penting namun sering kali menghadapi kendala. Dengan demikian, pendekatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika lokal sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan tawuran di masa depan.

Demi menghadapi tantangan tersebut, disarankan agar SMP Negeri 116 Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk peningkatan pengawasan tidak hanya peserta didik tetapi juga meluas pada alumni yang terindikasi menjadi pelopor aksi tawuran pelajar serta memperkuat dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Rekomendasi ini sejalan dengan panduan implementasi kebijakan dari (Setyawan, 2014) yang menyarankan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal. Selain itu, untuk mengatasi masalah peningkatan pengawasan dan dukungan orang tua, perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, orang tua, dan pihak berwajib, sesuai dengan temuan dari (Utami, 2017) dan (Sisca & Alhakim, 2022) yang menunjukkan bahwa komunikasi dan kolaborasi yang efektif adalah kunci dalam keberhasilan kebijakan.

Penting juga untuk mengadopsi pendekatan preventif dan kuratif yang lebih komprehensif, seperti yang diusulkan oleh (Awlokita, 2017), untuk mengurangi tawuran pelajar. Ini mencakup peningkatan program pendidikan karakter dan resosialisasi yang dapat mencegah keterlibatan kembali dalam tawuran. Terakhir, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, agar kebijakan tetap relevan dan efektif, seperti yang ditekankan dalam teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III (Yuliah, 2020). Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan sekolah yang lebih efektif di masa depan, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan tawuran pelajar.

Berdasarkan teori Mulat mengenai kontrol sosial (Yuliah, 2020), SMP Negeri 116 Jakarta mengimplementasikan berbagai kebijakan yang meliputi kontrol sosial preventif dan represif. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kebijakan yang diterapkan di sekolah:

4.3.1.1. Tata Tertib

Tata tertib sekolah di SMP Negeri 116 Jakarta berperan penting sebagai instrumen kontrol sosial, yang menggabungkan pendekatan preventif dan represif dalam menangani perilaku menyimpang, seperti tawuran pelajar. Menurut Hirschi dalam teori kontrol sosial, tata tertib ini bertujuan memperkuat ikatan sosial antara peserta didik dan sekolah untuk mengurangi kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang (Anarta, Fauzi, Rahmadhani, & Santoso, 2021). Penerapan tata tertib yang mencakup aturan yang jelas dan sanksi yang tegas bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan yang mendorong perubahan perilaku peserta didik melalui penerapan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas..

Secara konkret, penerapan tata tertib di SMP Negeri 116 Jakarta melibatkan beberapa langkah, termasuk kewajiban untuk mematuhi seragam sekolah, kehadiran, dan kerapian diri. Larangan terhadap penggunaan HP dan tindakan asusila juga merupakan bagian dari tata tertib. Sanksi yang diterapkan bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga penahanan kartu KJP (Kartu Jakarta Pintar) selama tiga bulan untuk pelanggaran berat, termasuk tawuran pelajar. Sanksi-sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Meskipun tata tertib telah diterapkan dengan baik dari segi struktur dan komunikasi, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh George Edward III, efektivitas tata tertib sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana,

dan struktur birokrasi (Hidayat, Idris, & Masjaya, 2017). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tata tertib telah diterapkan dengan baik dari segi struktur dan komunikasi, terdapat kendala dalam sumber daya, seperti pengawasan yang memadai dan keterlibatan orang tua yang belum optimal.

Sebagai contoh, pencatatan poin pelanggaran yang diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai pelanggaran yang dilakukan peserta didik secara sistematis, implementasi ini seringkali terganggu oleh keterbatasan sumber daya. Kurangnya staf pengawas yang cukup untuk memantau kepatuhan terhadap tata tertib dan keterlibatan orang tua yang minim dalam proses disiplin, dapat mengurangi efektivitas tata tertib dalam mencegah tawuran pelajar.

Dalam praktek, penerapan sanksi seperti penahanan KJP merupakan contoh konkret dari upaya untuk menyeimbangkan hukuman dengan pendekatan pembinaan. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberi kesempatan bagi peserta didik untuk memperbaiki perilaku mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan kontrol sosial berbasis tata tertib, bila diterapkan secara konsisten, dapat efektif dalam mengurangi perilaku menyimpang (Supartono, et al., 2024). Ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan kesempatan untuk perubahan perilaku, meskipun ada pelanggaran.

Secara keseluruhan, tata tertib di SMP Negeri 116 Jakarta berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam mengurangi tawuran pelajar. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, perlu dilakukan penyesuaian strategis dalam pelaksanaan kebijakan ini. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara sekolah, keluarga, dan pihak berwajib sangat penting. Penyesuaian dalam pengawasan dan

peningkatan keterlibatan orang tua dapat memperkuat implementasi tata tertib dan meningkatkan efektivitas dalam mengurangi perilaku menyimpang.

4.3.1.2. Kegiatan Pembiasaan

SMP Negeri 116 Jakarta menerapkan berbagai kegiatan pembiasaan sebagai bagian dari upaya pengendalian sosial yang bersifat preventif, selain peraturan dan sanksi yang diatur dalam tata tertib sekolah. Kegiatan pembiasaan ini menggabungkan tiga bentuk kontrol sosial: persuasif, kompulsif, dan koersif, yang semuanya bertujuan untuk membentuk karakter positif peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

1. Upacara Bendera (Senin)

Upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab pada peserta didik. Melalui pengulangan dan penekanan pada nilai-nilai kebangsaan serta penghormatan terhadap simbol negara, kegiatan ini secara persuasif memperkuat ikatan sosial peserta didik dengan sekolah dan negara, sejalan dengan teori kontrol sosial Hirschi (Anarta, Fauzi, Rahmadhani, & Santoso, 2021). Pembiasaan ini berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan perilaku peserta didik, terutama dalam membangun rasa kebersamaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

2. Selasa Ceria

Selasa Ceria adalah kegiatan yang berfokus pada pengembangan kreativitas peserta didik melalui berbagai aktivitas seni dan musik. Kegiatan ini menciptakan suasana yang mendukung eksplorasi minat dan bakat peserta didik, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial persuasif dan kompulsif. Di SMP Negeri 116 Jakarta, kegiatan ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan

mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang melalui keterlibatan aktif dalam aktivitas yang mereka sukai.

3. Pramuka, Literasi, Numerasi (Rabu)

Hari Rabu diisi dengan kegiatan Pramuka, Literasi, dan Numerasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran akademik tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter. Pramuka, misalnya, mengajarkan keterampilan kepemimpinan dan kerja sama, sementara program Literasi dan Numerasi mendukung pengembangan kemampuan akademik dasar. Berdasarkan kajian pustaka, kegiatan-kegiatan ini secara langsung mendukung teori Hirschi, di mana keterlibatan dalam aktivitas positif dapat memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kemungkinan perilaku menyimpang (Setyawan, 2014). Di SMP Negeri 116 Jakarta, kegiatan ini menunjukkan hasil positif dalam pengurangan perilaku negatif peserta didik, terutama dalam hal peningkatan disiplin dan rasa tanggung jawab.

4. Senam Bugar / Kebersihan Kelas (Kamis)

Pada hari Kamis, peserta didik mengikuti kegiatan Senam Bugar atau Kebersihan Kelas. Senam Bugar dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kebugaran, sementara Kebersihan Kelas berfokus pada tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan belajar. Kegiatan ini mendukung teori kontrol sosial dengan cara mengintegrasikan norma-norma kesehatan dan kebersihan ke dalam rutinitas harian peserta didik, yang secara tidak langsung memperkuat ikatan sosial melalui tanggung jawab bersama. Kendati demikian, beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya untuk pelatihan guru dan keterlibatan orang tua masih menjadi tantangan dalam implementasi yang optimal (Hidayat, Idris, & Masjaya, 2017).

5. Tadarus dan Kebaktian (Jumat)

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada hari Jumat, seperti Tadarus bagi peserta didik Muslim dan Kebaktian bagi

peserta didik Kristiani, berfungsi sebagai penguatan spiritual dan moral. Kegiatan ini relevan dengan teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya ikatan emosional dan spiritual dalam mengurangi perilaku menyimpang. Di SMP Negeri 116 Jakarta, kegiatan ini telah terbukti efektif dalam membentuk perilaku positif, namun juga menghadapi kendala dalam hal sumber daya dan dukungan eksternal, terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan tokoh agama dan masyarakat setempat.

Salah satu kegiatan pembiasaan yang memiliki pengaruh besar dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta adalah upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber, upacara bendera dianggap sangat efektif karena adanya himbauan yang disampaikan secara terus-menerus oleh kepala sekolah atau pembina upacara dalam pidato mereka. Himbauan tersebut mencakup ajakan untuk menjauhi aksi tawuran, menjaga nama baik sekolah, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin di kalangan peserta didik. Himbauan yang berulang ini menjadi pengingat yang kuat bagi peserta didik akan konsekuensi negatif dari tawuran, sehingga membantu menekan angka kejadian tawuran di lingkungan sekolah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 116 Jakarta telah berhasil mengurangi perilaku menyimpang di kalangan peserta didik, sejalan dengan teori Hirschi yang menyatakan bahwa ikatan sosial yang kuat dapat mencegah perilaku devian. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya keterlibatan orang tua perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Maulana, 2020) dan (Setyawan, 2014), yang menekankan pentingnya komitmen seluruh warga sekolah dan keterlibatan orang tua dalam mendukung keberhasilan kebijakan sekolah. Selain itu, dukungan dari kontrol sosial formal dan informal

seperti yang dikemukakan oleh (Supartono, et al., 2024) juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kegiatan pembiasaan.

Dalam penerapan kegiatan pembiasaan, kendala yang dihadapi SMP Negeri 116 Jakarta terutama berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut (Hidayat, Idris, & Masjaya, 2017). Meskipun sekolah telah berhasil dalam hal struktur dan komunikasi, keterbatasan sumber daya seperti pelatihan guru dan keterlibatan orang tua menjadi kendala yang signifikan. Transisi ini membantu kita memahami bagaimana teori Hirschi tentang kontrol sosial juga dapat diterapkan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi kegiatan pembiasaan ini.

Berdasarkan temuan penelitian ini, peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 116 Jakarta diperlukan. Hal ini mencakup pelatihan yang lebih intensif bagi guru, peningkatan komunikasi dengan orang tua, serta koordinasi yang lebih baik dengan pihak eksternal seperti tokoh agama dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pembiasaan diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas harian, tetapi juga menjadi mekanisme yang efektif dalam membentuk perilaku positif peserta didik, sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh sekolah dan masyarakat.

4.3.1.3. Program Ekstrakurikuler

Penelitian ini menemukan bahwa program ekstrakurikuler di SMP Negeri 116 Jakarta memainkan peran penting dalam mengurangi tawuran pelajar dengan menyediakan alternatif positif bagi peserta didik. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward, keberhasilan program ini dapat dianalisis melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan peserta didik, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk kegiatan ekstrakurikuler,

menunjukkan bahwa SMP Negeri 116 Jakarta telah memenuhi beberapa aspek kunci dari teori ini. Namun, pemenuhan aspek ini perlu dilihat secara kritis, mengingat bahwa kesuksesan komunikasi dan sumber daya belum tentu menjamin perubahan yang berkelanjutan pada disposisi peserta didik.

Tantangan yang lebih mendalam ditemukan dalam variabel disposisi, yaitu tingkat keterlibatan dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program ekstrakurikuler. Misalnya, meskipun Paskibra menjadi ekstrakurikuler yang paling diminati, beberapa peserta didik memilihnya hanya karena tekanan teman sebaya atau karena dianggap sebagai kegiatan wajib, bukan karena ketertarikan intrinsik. Hal ini menimbulkan masalah karena keterlibatan yang tidak didasarkan pada motivasi pribadi cenderung tidak bertahan lama, yang terlihat dari fluktuasi partisipasi peserta didik. Situasi ini menyoroti kelemahan dalam pendekatan yang terlalu mengandalkan insentif eksternal atau kepatuhan tanpa membangun minat sejati peserta didik.

Pendekatan yang hanya mengandalkan struktur komunikasi dan sumber daya tanpa memperhatikan disposisi intrinsik peserta didik berisiko membuat program ekstrakurikuler menjadi kurang efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sekolah perlu mengadopsi strategi yang lebih holistik, seperti melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya terlibat secara formal tetapi juga merasakan manfaat emosional dan sosial yang mendalam dari partisipasi mereka.

Selanjutnya, teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, yang menekankan pentingnya ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas, relevan dalam konteks ini. Program ekstrakurikuler yang beragam di SMP Negeri 116 Jakarta membantu memperkuat ikatan sosial peserta didik dengan sekolah dan

komunitasnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi perilaku delinkuen. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Sisca & Alhakim, 2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya keterikatan sosial adalah faktor signifikan dalam kenakalan remaja. Dengan menyediakan kegiatan positif, sekolah tidak hanya mengisi waktu luang peserta didik tetapi juga memperkuat keterikatan sosial mereka.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Supartono, et al., 2024), yang menekankan pentingnya dukungan kontrol sosial formal dan informal dalam mengurangi tawuran. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Daliana & Rasyid, 2020) dan (Utami, 2017), yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai upaya seperti kuratif, represif, dan preventif, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, dapat memperkuat efektivitas kebijakan sekolah. Namun, penelitian ini mengusulkan bahwa pendekatan berbasis program ekstrakurikuler dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan aturan dan sanksi.

Penekanan pada program ekstrakurikuler sebagai solusi utama membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Setyawan, 2014) dan (Maulana, 2020)) yang lebih fokus pada pembuatan tata tertib dan tindakan preventif serta kuratif yang lebih langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa program ekstrakurikuler juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mengurangi tawuran. Perbedaan ini muncul karena pendekatan yang diambil di SMP Negeri 116 Jakarta lebih berorientasi pada pengembangan minat dan bakat peserta didik sebagai cara untuk mencegah perilaku negatif, dibandingkan dengan sekadar mengandalkan aturan dan sanksi.

Secara keseluruhan, implementasi program ekstrakurikuler di SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan kemajuan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan positif. Namun, untuk

mencapai hasil yang optimal, perlu ada evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program ini, terutama dalam hal motivasi intrinsik peserta didik dan bagaimana program ini benar-benar membentuk ikatan sosial yang kuat. Jika tidak, upaya yang dilakukan bisa berisiko menjadi superfisial dan tidak memberikan dampak jangka panjang yang diharapkan.

4.3.1.4. Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan pendekatan holistik dan komprehensif yang sangat penting dalam upaya mengurangi tawuran pelajar. Program BK di sekolah ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pengembangan pribadi, sosial, dan perencanaan karier peserta didik. Program ini sesuai dengan temuan yang menunjukkan bahwa layanan konseling yang baik dapat memperkuat karakter peserta didik dan mencegah perilaku negatif, termasuk tawuran ((Awlokita, 2017); (Supartono, et al., 2024)). Secara khusus, temuan ini sejalan dengan program BK di SMP Negeri 116 Jakarta yang dirancang untuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, mencakup bimbingan individual, kelompok, serta penanganan kasus yang cepat dan efektif.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di SMP Negeri 116 Jakarta, komunikasi yang baik antara layanan BK dan peserta didik, serta antara BK dan keluarga, sangat krusial dalam deteksi dan penanganan masalah. Misalnya, dalam kasus pelanggaran tata tertib, guru BK secara proaktif berkomunikasi dengan keluarga dan melakukan *home visit* untuk memahami latar belakang masalah yang dihadapi peserta didik, sebagaimana diungkapkan oleh Pak NA, "BK itu sebetulnya intinya membantu mencari data sampai yang tidak bisa

dicari oleh kesiswaan... sampai ke home visit, sampai ke keluarga..." Program BK yang dirancang dengan berbagai materi dan metode pengajaran beragam mencerminkan penggunaan sumber daya yang efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Disposisi atau sikap konselor yang proaktif, meskipun sangat positif, masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi, yang dapat menghambat efektivitas layanan. Ini serupa dengan temuan dalam penelitian oleh (Daliana & Rasyid, 2020) dan (Utami, 2017) tentang tantangan dalam implementasi kebijakan sekolah.

Setelah menganalisis efektivitas layanan BK berdasarkan teori implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan juga aspek sosial yang lebih luas, seperti yang diuraikan dalam teori kontrol sosial Hirschi. Kedua teori ini saling melengkapi dalam memahami bagaimana kebijakan sekolah dan ikatan sosial dapat bersama-sama mencegah perilaku menyimpang seperti tawuran pelajar.

Teori kontrol sosial Hirschi, yang menekankan pentingnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam mencegah perilaku delinkuen, juga relevan dalam konteks layanan BK di SMP Negeri 116 Jakarta. Hirschi berargumen bahwa ikatan yang kuat dengan institusi sosial dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Layanan BK di SMP Negeri 116 Jakarta berupaya memperkuat ikatan ini dengan menyediakan ruang konsultasi yang aman, mengadakan workshop keterampilan hidup, serta melakukan intervensi yang cepat dan efektif ketika ada tanda-tanda peserta didik terlibat dalam perilaku negatif. Contoh konkret dari data lapangan menunjukkan bahwa BK memainkan peran penting dalam mendeteksi dan menangani peserta didik yang berisiko tinggi terlibat tawuran, dan upaya ini efektif dalam menurunkan jumlah insiden tawuran di sekolah.

Pendekatan yang diterapkan oleh layanan BK di SMP Negeri 116 Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai strategi preventif, tetapi juga

sebagai sarana untuk membangun karakter peserta didik yang kuat dan berintegritas. Dengan menghubungkan teori kontrol sosial dan implementasi kebijakan, dapat dilihat bahwa kedua teori ini saling melengkapi dalam menganalisis efektivitas layanan BK. Misalnya, implementasi kebijakan yang efektif memperkuat komunikasi dan alokasi sumber daya, sementara kontrol sosial memperkuat ikatan antara peserta didik dan institusi sosial seperti sekolah dan keluarga.

Dalam membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu, temuan ini konsisten dengan hasil yang dipaparkan oleh (Supartono, et al., 2024), yang menekankan pentingnya kebijakan sekolah yang tegas serta dukungan kontrol sosial untuk mengurangi tawuran. Penelitian sebelumnya oleh (Setyawan, 2014) dan (Maulana, 2020) juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengatasi tawuran bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pihak serta implementasi yang efektif. Layanan BK di SMP Negeri 116 Jakarta, dengan pendekatan yang menyeluruh dan integratif, sejalan dengan temuan-temuan ini dan menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan dukungan sosial yang kuat dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Namun, masih ada tantangan dalam implementasi layanan BK, seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, serta beban kerja yang tinggi bagi guru BK. Tantangan ini menghambat efektivitas layanan BK dan memerlukan solusi seperti peningkatan dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan ini. Dampaknya, layanan BK mungkin tidak dapat memberikan dukungan optimal kepada semua peserta didik yang membutuhkan, yang berpotensi menurunkan efektivitas program dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya layanan BK sebagai komponen integral dalam strategi pengurangan tawuran pelajar. Melalui pendekatan yang mendalam dan beragam, serta dukungan yang kuat dari pihak sekolah dan keluarga,

BK berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis. Ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dan kontrol sosial, serta hasil dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kebijakan sekolah yang efektif dan dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi kejadian tawuran pelajar dan kenakalan remaja.

4.3.1.5. Pihak – pihak yang Berperan dalam Mengurangi Tawuran Pelajar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam mengurangi tawuran pelajar, SMP Negeri 116 Jakarta melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang terlibat meliputi orang tua, masyarakat sekitar, pihak berwajib, dan berbagai komponen internal sekolah seperti wali kelas, Bimbingan Konseling (BK), staf kesiswaan, serta wakil kepala sekolah. Kerja sama antara berbagai pihak ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh George Edward, peran berbagai pihak ini mencerminkan pentingnya komunikasi, sumber daya, dan disposisi dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang baik antara sekolah dan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas tata tertib yang diterapkan. Sumber daya, baik berupa dukungan manusia maupun material, dari pihak-pihak terkait juga berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap positif dari semua pihak dalam mendukung kebijakan sekolah sangat penting dalam memastikan bahwa tindakan pencegahan tawuran dapat dilaksanakan dengan baik.

Teori kontrol sosial Hirschi juga relevan dalam konteks ini. Hirschi berargumen bahwa ikatan sosial yang kuat dengan berbagai institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mengurangi kemungkinan perilaku delinkuen. Peran orang tua dan masyarakat sekitar dalam mendukung kebijakan sekolah memperkuat

ikatan sosial ini. Partisipasi aktif orang tua dan komunitas dalam mengawasi dan mendukung kegiatan sekolah dapat memperkuat keterikatan peserta didik dengan lingkungan sosial mereka, yang pada gilirannya mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tawuran.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian oleh (Delvira, 2020) dan (Setyawan, 2014) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak berwajib, sangat penting dalam menangani tawuran pelajar. Keduanya menekankan pentingnya kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pihak berwajib dalam mengatasi masalah tawuran. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh (Suparsono, et al., 2024) yang menekankan bahwa dukungan dari kontrol sosial formal dan informal dapat membantu mengurangi kejadian tawuran.

Penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti keterlibatan aktif dari berbagai komponen internal sekolah dan bagaimana kerja sama yang efektif antara pihak internal dan eksternal dapat mengatasi kasus tawuran. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam menangani masalah tawuran pelajar dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran berbagai pihak dalam pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan bahwa pendekatan *multi-stakeholder* yang melibatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak berwajib sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pengembangan peserta didik.

4.3.1.6. Tahapan Penanganan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 116 Jakarta menerapkan tahapan penanganan pelanggaran yang sistematis dan berjenjang. Proses ini dimulai dari langkah awal oleh wali kelas, yang

memberikan peringatan dan konseling awal kepada peserta didik yang terlibat dalam pelanggaran. Jika pelanggaran tersebut berulang atau dianggap serius, wali kelas akan merujuk kasus tersebut ke Bimbingan Konseling (BK) untuk evaluasi mendalam. BK bertugas memberikan konseling kepada peserta didik untuk memahami dampak dari perilaku mereka dan melibatkan orang tua jika diperlukan. Jika tindakan dari BK tidak memadai atau jika kasus memerlukan penanganan lebih lanjut, wakil kepala sekolah akan terlibat dalam pengambilan keputusan akhir, termasuk sanksi yang lebih berat seperti penahanan KJP atau pemanggilan orang tua.

Pendekatan bertahap ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam teori implementasi kebijakan oleh George Edward, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal ini, komunikasi yang jelas antara wali kelas, BK, dan wakil kepala sekolah memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani sesuai dengan tingkat keseriusannya. Struktur birokrasi yang jelas membantu mengorganisir proses penanganan pelanggaran, sementara disposisi positif dari semua pihak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara adil dan efektif.

Dalam konteks teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, tahapan penanganan pelanggaran ini berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan keterikatan peserta didik dengan sekolah. Hirschi berpendapat bahwa ikatan yang kuat dengan institusi sosial dapat mengurangi perilaku delinkuen. Dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku melalui tahapan yang berjenjang, SMP Negeri 116 Jakarta berupaya memperkuat keterikatan peserta didik dengan sekolah dan membantu mereka memahami dampak negatif dari perilaku seperti tawuran. Pendekatan ini selaras dengan upaya untuk memperbaiki ikatan sosial dan mengurangi kenakalan remaja.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan pentingnya pendekatan bertahap dalam penanganan pelanggaran. (Daliana & Rasyid, 2020) dan (Utami, 2017)

menunjukkan bahwa pendekatan terstruktur yang melibatkan berbagai langkah intervensi, seperti pemanggilan orang tua dan pemberian sanksi, dapat efektif dalam menangani kenakalan remaja. Penelitian oleh (Setyawan, 2014) dan (Maulana, 2020) juga menekankan pentingnya tindakan disipliner yang berjenjang untuk memastikan pelanggaran diatasi secara efektif dan adil. Penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti proses penanganan pelanggaran yang mencakup tindakan preventif, seperti peringatan awal dan konseling, serta tindakan lebih lanjut seperti pemanggilan orang tua dan penahanan KJP jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan peserta didik memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat, mencerminkan upaya sekolah untuk mendidik peserta didik dan memberikan mereka kesempatan untuk memahami dampak dari tindakan mereka.

Penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti proses penanganan pelanggaran yang mencakup tindakan preventif, seperti peringatan awal dan konseling, serta tindakan lebih lanjut seperti pemanggilan orang tua dan penahanan KJP jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan peserta didik memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Ini mencerminkan upaya sekolah untuk mendidik peserta didik dan memberikan mereka kesempatan untuk memahami dampak dari tindakan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori implementasi kebijakan dan kontrol sosial.

Secara keseluruhan, tahapan penanganan pelanggaran di SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan pendekatan yang sistematis dan bertahap dalam menangani kasus tawuran dan pelanggaran lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mengikuti prosedur yang terstruktur, sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pengembangan karakter peserta didik. Pendekatan ini konsisten dengan teori-teori relevan dan praktik-praktik terbaik yang diidentifikasi dalam penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa tahapan

penanganan yang berjenjang tidak hanya efektif dalam mengatasi pelanggaran tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter peserta didik.

4.3.2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta

Penanganan kasus tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta telah mengalami perubahan signifikan melalui penerapan kebijakan-kebijakan sekolah yang lebih sistematis dan berbasis hukum. Kebijakan ini tidak hanya dirancang untuk mengendalikan perilaku negatif peserta didik tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Penurunan angka tawuran hingga nol sejak tahun 2023 menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan tersebut. Namun, untuk memahami sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam konteks yang lebih luas, diperlukan analisis lebih dalam terkait implementasi teori kontrol sosial dan teori implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan oleh George Edward III menjadi kerangka penting dalam menilai efektivitas kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta. Edward III menyebutkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan anti-tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan, yang merupakan salah satu variabel kunci, berjalan dengan relatif baik. Pengakuan dari wali kelas dan wakil kepala sekolah mengenai keberhasilan kebijakan menandakan bahwa informasi mengenai kebijakan ini telah sampai ke tingkat manajemen sekolah dengan efektif. Namun, tantangan signifikan muncul dalam hal pemahaman dan pengawasan di kalangan peserta didik. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam penegakan aturan dan komunikasi langsung di lapangan. Ketidakhahaman peserta didik terhadap kebijakan dapat menandakan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana

meskipun kebijakan sudah ada, proses penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan tidak selalu optimal.

Dalam analisis implementasi kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta, ditemukan beberapa kasus khusus di mana kekurangan sumber daya dan struktur birokrasi yang tidak efektif menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebagai contoh, keterbatasan dana dan tenaga pengawas telah mempengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan anti-tawuran. Kesenjangan ini berdampak pada pemahaman dan penerimaan kebijakan di kalangan peserta didik. Hasil wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa ketidakpahaman mereka terhadap kebijakan sering kali disebabkan oleh sosialisasi yang tidak memadai dan komunikasi yang kurang efektif, memperlihatkan adanya jurang antara kebijakan yang diterapkan dan pemahaman siswa. Kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun SMP Negeri 116 Jakarta telah berusaha menerapkan kebijakan dengan mengikuti prinsip-prinsip komunikasi yang baik, masih ada kekurangan dalam hal pemantauan dan penguatan di tingkat peserta didik. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan bukan hanya pengiriman informasi yang tepat tetapi juga pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama peserta didik, benar-benar memahami dan mematuhi kebijakan yang ada. Struktur birokrasi dan sumber daya yang memadai menjadi penting dalam hal ini, karena mereka mendukung penegakan aturan dan memberikan dorongan tambahan untuk pengawasan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan perbaikan pada aspek komunikasi yang lebih mendalam, dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses sosialisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kebijakan dapat diterapkan dengan konsisten dan menyeluruh.

Dalam konteks ini, teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi menekankan bahwa ikatan sosial yang kuat antara individu dan kelompok sosial dapat mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang. Implementasi teori ini terlihat dalam kebijakan sekolah yang berusaha

memperkuat ikatan sosial melalui program-program seperti "sekolah komunitas" dan keterlibatan orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan teori Hirschi, di mana ikatan yang kuat dengan sekolah dan komunitas diharapkan dapat mencegah perilaku devian seperti tawuran. Ikatan sosial yang kuat terbukti mengurangi frekuensi tawuran, seperti yang terlihat dari peningkatan partisipasi dalam program "sekolah komunitas" dan keterlibatan orang tua. Data menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan sekolah dan terlibat secara aktif dengan kegiatan sekolah cenderung lebih jarang terlibat dalam tawuran dibandingkan dengan mereka yang kurang terhubung secara sosial. Namun, faktor eksternal seperti tekanan teman sebaya dan kondisi sosial-ekonomi di luar sekolah masih menjadi tantangan signifikan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa kebijakan sekolah saat ini belum sepenuhnya mengatasi pengaruh negatif dari luar, seperti pengaruh buruk dari teman sebaya atau ketidakstabilan sosial di lingkungan rumah. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, seperti program dukungan komunitas, masih terdapat kekurangan dalam menangani faktor-faktor eksternal ini secara menyeluruh. Hal ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan tersebut efektif dalam memperkuat ikatan sosial di dalam lingkungan sekolah, faktor-faktor eksternal tetap menjadi tantangan signifikan. Pengaruh lingkungan luar sekolah, seperti tekanan dari teman sebaya dan kondisi sosial-ekonomi di luar sekolah, dapat merusak upaya tersebut dan mempengaruhi perilaku peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya holistik dan hanya mencakup aspek internal tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh konteks eksternal yang juga berperan penting.

Untuk mencapai efektivitas yang lebih baik dalam pencegahan perilaku tawuran, diperlukan perancangan intervensi yang tidak hanya fokus pada penguatan ikatan sosial di dalam sekolah tetapi juga memperhatikan dan mengatasi pengaruh eksternal yang mempengaruhi perilaku peserta didik. Misalnya, integrasi program dukungan komunitas yang melibatkan keluarga dan lingkungan sosial peserta didik secara lebih

aktif dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berdampak dalam mengurangi perilaku menyimpang. Pendekatan ini dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan dengan menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas dan mengurangi risiko pengaruh negatif dari lingkungan luar sekolah.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu mengungkapkan kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan terhadap kebijakan sekolah. Penelitian (Awlokita, 2017) menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai religius dan resolusi konflik untuk mengatasi tawuran pelajar. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis pada pengembangan karakter dan pembinaan positif memberikan dampak yang signifikan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perlu lebih memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku peserta didik, seperti lingkungan rumah dan teman-teman mereka, yang sejalan dengan temuan (Supartono, et al., 2024) yang mengidentifikasi solidaritas kelompok dan pembalasan dendam sebagai faktor pendorong tawuran. Internalisasi nilai-nilai religius dan resolusi konflik adalah pendekatan yang terbukti efektif dalam pengembangan karakter peserta didik. Namun, penelitian ini menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harus mencakup strategi untuk mengatasi pengaruh lingkungan luar sekolah agar lebih komprehensif dan efektif.

Penelitian (Daliana & Rasyid, 2020) juga relevan dalam konteks ini, terutama dalam hal melibatkan semua komponen sekolah dan koordinasi dengan pihak eksternal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sekolah telah diimplementasikan dengan baik, masih ada kendala yang harus diatasi, seperti sumber daya yang terbatas dan perbedaan penanganan masalah antar pendidik. Ini mencerminkan tantangan yang sama yang dihadapi SMP Negeri 116 Jakarta, di mana efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh variabel-variabel internal dan eksternal. Keterlibatan semua komponen sekolah dan koordinasi dengan

pihak eksternal penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan penanganan di antara pendidik menunjukkan bahwa pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan dan hasil kebijakan sekolah. Penelitian oleh Setyawan (2014) menekankan pentingnya koordinasi antara sekolah, masyarakat, dan kepolisian dalam menangani tawuran pelajar. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kerja sama antara sekolah dan orang tua serta pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mengurangi tawuran. Namun, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan menyoroti efektivitas sanksi tegas seperti penahanan KJP dan kebijakan DO (*drop out*) dalam memberikan efek jera kepada peserta didik, yang mendorong keterlibatan orang tua secara lebih aktif. Koordinasi antara sekolah, masyarakat, dan kepolisian merupakan faktor penting dalam mengatasi tawuran pelajar. Sanksi tegas seperti penahanan KJP dan kebijakan DO menunjukkan efektivitas dalam memberikan efek jera, tetapi juga perlu diimbangi dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan hasil yang positif.

Di sisi lain, penelitian oleh Utami (2017) menekankan pada pentingnya pendekatan kuratif dan preventif dalam mengatasi kenakalan remaja. Temuan penelitian ini mendukung pendekatan tersebut, namun juga menambahkan bahwa tantangan eksternal seperti pengaruh dari lingkungan luar sekolah masih menjadi kendala besar dalam memastikan efektivitas kebijakan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan sekolah harus disertai dengan dukungan eksternal dari keluarga dan masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal. Pendekatan kuratif dan preventif penting dalam menangani kenakalan remaja, namun tantangan eksternal tetap menjadi kendala yang signifikan. Hal ini menekankan perlunya dukungan dari keluarga dan

masyarakat untuk melengkapi kebijakan sekolah dan mencapai hasil yang lebih baik.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan pentingnya sanksi tegas dan keterlibatan orang tua dalam mendukung kebijakan sekolah, serta menegaskan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menanggulangi tawuran pelajar. Posisi penelitian ini dalam konteks penelitian terdahulu adalah sebagai penguat dan pelengkap, yang menambah pemahaman tentang bagaimana teori kontrol sosial dan implementasi kebijakan dapat diadaptasi untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Penelitian ini menawarkan perspektif baru terutama dalam hal bagaimana sanksi tegas dapat memperkuat efektivitas kebijakan sekolah, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam penelitian terkait. Perbedaan ini mempengaruhi interpretasi hasil penelitian dengan menekankan perlunya kebijakan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Meskipun kebijakan sekolah di SMP Negeri 116 Jakarta telah berhasil mengurangi tawuran pelajar secara signifikan, tantangan seperti pengawasan, komunikasi, dan pengaruh eksternal masih memerlukan perhatian lebih. Pengawasan yang lebih ketat, komunikasi yang lebih baik, serta keterlibatan yang lebih besar dari orang tua dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan efektivitas kebijakan ini. Selain itu, perlunya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan guna menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah di SMP Negeri 116 Jakarta telah mencapai hasil yang positif dalam mengurangi tawuran pelajar. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan yang ada, terutama dalam hal pengawasan, komunikasi, dan pemahaman kebijakan di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan lebih lanjut dalam strategi implementasi kebijakan, termasuk memperkuat peran orang tua, meningkatkan

keterlibatan masyarakat, dan memperbaiki komunikasi antara pihak sekolah dan peserta didik. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak memiliki potensi untuk mengurangi perilaku tawuran secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan perlunya sanksi tegas dan keterlibatan orang tua, serta menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk mengatasi tawuran pelajar dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Temuan penelitian ini dapat memengaruhi kebijakan di masa depan dengan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan. Langkah-langkah spesifik yang bisa diambil meliputi perbaikan dalam struktur birokrasi untuk meningkatkan respons terhadap insiden tawuran, penguatan komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada siswa, serta pengembangan strategi untuk mengatasi pengaruh eksternal yang merugikan. Dengan demikian, kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dan meningkatkan efektivitas pencegahan tawuran pelajar.

4.3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta

4.3.3.1. Faktor Pendukung

Dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta, faktor pendukung memainkan peran yang sangat penting. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara sekolah, masyarakat, pihak berwajib, dan orang tua. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward dan teori kontrol sosial Travis Hirschi, faktor-faktor pendukung ini mencakup komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi yang mendukung, dan struktur birokrasi yang sesuai.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta, faktor komunikasi dan kerja sama antara berbagai pihak telah terbukti sebagai elemen kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan pengurangan tawuran. Kerja sama yang solid antara sekolah, masyarakat, dan pihak berwajib, seperti yang diungkapkan oleh Bu NO dan Wakil Kepala Sekolah Bu G, menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan sinergi antar komponen dapat memperkuat kebijakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa komunikasi yang efektif juga memerlukan saluran dan mekanisme yang jelas untuk memastikan informasi dan instruksi diterima dan dipahami dengan baik oleh semua pihak. Dalam hal ini, Bu G menekankan pentingnya respon cepat terhadap indikasi tawuran dengan dukungan dari Polsek atau BIMAS, yang mencerminkan bagaimana sumber daya dan disposisi yang tepat—seperti kesiapan dan responsivitas pihak berwajib—berperan penting dalam implementasi kebijakan.

Namun, ketika menganalisis struktur birokrasi, terdapat dinamika yang lebih kompleks. Penjelasan Pak NA mengenai peran Guru BK, kesiswaan, dan wali kelas sebagai informan dalam memantau aktivitas peserta didik menunjukkan bahwa struktur ini mendukung pemantauan dan pengendalian tawuran. Struktur ini mencerminkan adanya upaya untuk memastikan pemantauan yang terus-menerus dan responsif terhadap masalah tawuran. Namun, keterbatasan yang dihadapi, seperti kurangnya kewenangan penuh yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan teori Edward. Struktur birokrasi yang tidak sepenuhnya efektif dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tindakan yang diperlukan untuk menangani kasus tawuran dengan tepat.

Temuan ini mendukung teori Edward dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penyesuaian di

seluruh aspek yang terlibat. Penguatan kewenangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian tawuran, seperti Guru BK dan kesiswaan, serta penambahan pelatihan dan dukungan sumber daya, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Penyesuaian dalam struktur birokrasi ini tidak hanya akan memperbaiki respon terhadap tawuran, tetapi juga akan memperkuat sinergi antara semua pihak yang terlibat, menjadikan kebijakan pengurangan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta lebih efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, teori kontrol sosial Travis Hirschi memberikan perspektif penting mengenai bagaimana ikatan sosial dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. Hirschi berargumen bahwa ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mengurangi perilaku delinkuen. Temuan penelitian yang menunjukkan peran penting dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pencegahan tawuran sejalan dengan teori ini. Ketika orang tua dan masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan dan pembinaan anak-anak, seperti yang diungkapkan oleh Pak F dan Bu G, hal ini memperkuat ikatan sosial dan berkontribusi pada pengurangan tawuran. Keterlibatan ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan mendukung aturan yang diterapkan di sekolah.

Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik, tetapi juga memperkuat ikatan antara individu dan institusi yang mendukung aturan sekolah. Hirschi menyatakan bahwa ikatan yang kuat dengan lembaga-lembaga sosial—seperti sekolah dan keluarga—akan mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta, keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat dalam pembinaan serta pelaporan insiden tawuran menunjukkan bagaimana penguatan ikatan sosial dapat memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan sekolah. Selain itu, keterlibatan ini menciptakan norma sosial yang mendukung perilaku positif dan menegakkan aturan dengan lebih konsisten, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas kebijakan pengurangan tawuran.

Dengan demikian, teori Hirschi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta sangat bergantung pada kekuatan ikatan sosial yang terjalin antara keluarga, sekolah, dan komunitas. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung dan memperkuat aturan yang diterapkan di sekolah tidak hanya mengurangi peluang tawuran tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan perilaku siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan ikatan sosial merupakan strategi efektif dalam mengatasi masalah tawuran, sesuai dengan prinsip-prinsip teori kontrol sosial Hirschi.

Namun, penting juga untuk mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menentukan posisi penelitian ini dan menjelaskan kontribusi unik yang diberikan. Penelitian oleh (Supartono, et al., 2024) dan (Sisca & Alhakim, 2022) menekankan bahwa baik kontrol sosial formal maupun informal, serta keterlibatan berbagai pihak, merupakan faktor utama dalam mengurangi tawuran pelajar. Temuan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pihak berwajib dalam mengatasi masalah tawuran, dan sejalan dengan penelitian yang menekankan perlunya komitmen kolektif untuk efektivitas kebijakan.

Namun, penelitian oleh (Awlokita, 2017) menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengusulkan pendekatan resolusi konflik dan internalisasi nilai-nilai religius sebagai strategi untuk menangani tawuran. Pendekatan ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai kultural dan religius dalam proses penanganan tawuran, yang menekankan dimensi kultural dan normatif dalam mengatasi perilaku delinkuen. Pendekatan ini berbeda dari fokus kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta, yang lebih mengutamakan struktur formal dan kerja sama antara berbagai pihak.

Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menekankan bagaimana struktur formal dan kerja sama di SMP Negeri 116 Jakarta tidak hanya melibatkan kebijakan yang ada, tetapi juga

mengintegrasikan upaya pencegahan berbasis komunitas dan partisipasi aktif dari orang tua. Dengan mengkaji secara mendalam peran setiap elemen—seperti keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta respons cepat dari pihak keamanan—penelitian ini menyoroti bagaimana sinergi antara berbagai pihak dapat memperkuat implementasi kebijakan. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kombinasi kontrol sosial formal dan informal, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen komunitas, berfungsi secara bersamaan untuk mengurangi tawuran pelajar secara efektif.

Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan dengan menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan penyesuaian dalam struktur birokrasi dan komunikasi antar pihak. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam kewenangan dan struktur pelaksanaan, penelitian ini menawarkan solusi praktis yang dapat memperbaiki kelemahan yang ada dalam implementasi kebijakan. Ini memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan mengenai bagaimana memperkuat struktur dan kerja sama untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam mengatasi tawuran pelajar. Secara keseluruhan, penelitian ini melengkapi dan memperluas temuan penelitian terdahulu dengan menambahkan dimensi baru dalam pengelolaan tawuran pelajar, menggabungkan kontrol sosial formal dan informal, serta menggarisbawahi pentingnya keterlibatan komunitas dalam memperkuat kebijakan yang ada.

Untuk memperbaiki kelemahan yang diidentifikasi dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta, beberapa langkah konkret dan strategis sangat diperlukan. Salah satu langkah utama adalah memperkuat kewenangan dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengendalian tawuran. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan tambahan bagi Guru BK dan kesiswaan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus tawuran secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup

strategi manajerial dan psikologis dalam menangani konflik serta teknik komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Dengan meningkatkan keterampilan mereka, diharapkan Guru BK dan kesiswaan dapat lebih proaktif dalam deteksi dini dan penyelesaian kasus tawuran.

Selain itu, memperluas program keterlibatan orang tua dan masyarakat merupakan langkah penting. Program ini bisa berupa *workshop* atau seminar tentang pencegahan tawuran dan peran orang tua dalam menjaga perilaku anak-anak mereka. Peningkatan dukungan dari pihak berwajib, seperti Polsek dan Bimas, juga merupakan elemen krusial. Ini bisa melibatkan pertemuan rutin antara pihak sekolah dan aparat keamanan untuk membahas situasi terkini dan merumuskan strategi bersama dalam menangani kasus tawuran. Misalnya, penguatan komunikasi antara sekolah dan pihak berwajib untuk respons cepat terhadap indikasi tawuran dapat meningkatkan efektivitas pencegahan.

Sebagai penutup, keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta sangat bergantung pada sinergi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Kerja sama yang solid antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak berwajib, serta komitmen yang konsisten terhadap aturan dan respon cepat terhadap indikasi tawuran, merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung ini dan mengatasi kelemahan yang teridentifikasi—seperti meningkatkan kewenangan dan keterampilan pihak terkait, serta memperluas keterlibatan komunitas—kebijakan di masa depan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif ini diharapkan tidak hanya mengurangi frekuensi tawuran, tetapi juga membangun budaya keamanan dan saling menghormati di lingkungan sekolah.

4.3.3.2. Faktor Penghambat

Dalam penelitian ini, faktor penghambat yang diidentifikasi dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP

Negeri 116 Jakarta memerlukan analisis mendalam untuk memahami tantangan yang dihadapi dan strategi yang mungkin diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, faktor penghambat utama meliputi pengawasan terhadap peserta didik yang tidak sepenuhnya efektif dan keterlibatan alumni yang tidak terikat dengan peraturan sekolah. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mekanisme pengawasan serta memperkuat kontrol terhadap alumni sebagai langkah strategis dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III memberikan kerangka analitis yang sangat berguna untuk memahami faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta. Edward menyebutkan empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta, kekurangan dalam aspek-aspek ini secara signifikan mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Komunikasi yang buruk atau tidak efektif di antara berbagai bagian di sekolah dapat menyebabkan misinformasi dan ketidakpahaman mengenai tujuan serta pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus SMP Negeri 116 Jakarta, keterbatasan dalam komunikasi internal mungkin menghambat koordinasi antara staf pengajar, petugas keamanan, dan pihak administrasi. Hal ini berdampak pada penerapan kebijakan yang tidak konsisten dan pemantauan yang kurang optimal. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana informasi dan instruksi dapat diteruskan dan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

Kekurangan sumber daya, baik dari segi personel maupun alat pengawasan, merupakan masalah signifikan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. SMP Negeri 116 Jakarta menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah staf yang terlatih dan peralatan yang memadai untuk pengawasan. Kurangnya investasi dalam pelatihan staf

dan teknologi pengawasan modern mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif dan penanganan masalah yang lambat. Edward menekankan bahwa alokasi sumber daya yang tepat adalah kunci untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan cenderung gagal memenuhi tujuan yang diharapkan.

Disposisi atau sikap dari individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga berperan penting. Dalam konteks ini, disposisi para guru, staf keamanan, dan pihak administrasi sekolah dalam menghadapi dan menangani tawuran pelajar mempengaruhi efektivitas kebijakan. Jika ada ketidakpuasan atau kurangnya motivasi di antara staf, hal ini dapat menghambat upaya pengawasan dan penegakan kebijakan. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki sikap yang mendukung dan berkomitmen terhadap tujuan kebijakan.

Struktur birokrasi yang tidak memadai dapat menghambat implementasi kebijakan dengan menciptakan birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Di SMP Negeri 116 Jakarta, struktur birokrasi yang kurang efektif mungkin menyebabkan kekurangan koordinasi antara berbagai bagian, seperti administrasi dan unit pengawasan. Edward menggarisbawahi pentingnya memiliki struktur birokrasi yang mendukung alur kerja yang efisien dan responsif. Tanpa struktur yang baik, pengambilan keputusan menjadi lambat dan pengawasan menjadi tidak efektif.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan teori Edward menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan di SMP Negeri 116 Jakarta tidak hanya terkait dengan masalah pengawasan itu sendiri tetapi juga dengan aspek komunikasi, alokasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada semua aspek ini. Hal ini melibatkan peningkatan komunikasi antar bagian, penyediaan sumber daya yang memadai,

pengembangan disposisi positif di antara staf, dan penyederhanaan struktur birokrasi. Dengan mengatasi faktor-faktor ini secara komprehensif, diharapkan implementasi kebijakan pengurangan tawuran dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan sekolah.

Teori kontrol sosial Travis Hirschi menawarkan perspektif yang mendalam mengenai peran ikatan sosial dalam mengurangi perilaku delinkuen dan dapat diterapkan secara relevan dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta, khususnya terkait dengan keterlibatan alumni. Hirschi berargumen bahwa ikatan sosial yang kuat—terutama dengan keluarga, sekolah, dan komunitas—dapat bertindak sebagai penghambat terhadap perilaku menyimpang. Dalam hal ini, keterlibatan alumni yang tidak terikat dengan peraturan sekolah menunjukkan kelemahan dalam ikatan sosial yang dapat memperburuk masalah tawuran pelajar.

Alumni yang baru lulus dan tidak terdaftar dalam kelompok alumni resmi sering kali mengalami keterputusan dari norma dan aturan yang berlaku di sekolah. Keterputusan ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab dan keterhubungan mereka dengan komunitas sekolah, sehingga mengurangi pengaruh positif yang biasanya dihasilkan dari ikatan sosial yang kuat. Hirschi mengemukakan bahwa ikatan yang lemah dengan institusi seperti sekolah dapat memperbesar kemungkinan perilaku delinkuen. Dalam kasus SMP Negeri 116 Jakarta, alumni yang tidak merasa terhubung atau tidak terlibat dengan aturan sekolah mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan, seperti tawuran pelajar. Ini menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat tidak hanya harus dibangun selama masa pendidikan tetapi juga harus dipertahankan setelah siswa lulus.

Menyadari kelemahan dalam ikatan sosial alumni menekankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat antara sekolah dan alumni. Hirschi menekankan pentingnya integrasi sosial dalam mencegah perilaku

menyimpang. Dalam konteks ini, SMP Negeri 116 Jakarta perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya melibatkan alumni dalam kegiatan sekolah tetapi juga dalam upaya pencegahan tawuran. Membangun platform resmi, seperti kelompok alumni atau forum diskusi, serta mengadakan acara rutin seperti reuni dan seminar, dapat membantu memperkuat keterhubungan alumni dengan sekolah. Dengan memperkuat ikatan ini, alumni yang aktif dapat berperan sebagai agen perubahan positif dan mendukung kebijakan pengurangan tawuran.

Mengintegrasikan alumni dalam struktur dukungan sosial sekolah tidak hanya membantu mengurangi jarak antara alumni dan sekolah, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan tawuran. Alumni yang merasa terhubung dan bertanggung jawab cenderung lebih mendukung kebijakan yang diterapkan dan dapat berkontribusi pada program pencegahan tawuran. Hirschi menyoroti bahwa pencegahan perilaku delinkuen memerlukan dukungan dari semua bagian komunitas, termasuk mereka yang telah meninggalkan institusi pendidikan formal. Oleh karena itu, kebijakan yang menyertakan alumni sebagai bagian dari strategi pengurangan tawuran akan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Secara keseluruhan, penerapan teori kontrol sosial Hirschi dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta menunjukkan bahwa memperkuat ikatan sosial dengan alumni adalah langkah krusial dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Mengembangkan strategi yang melibatkan alumni dalam upaya pencegahan tawuran dan memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan norma dan aturan sekolah dapat memperkuat efektivitas kebijakan dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman.

Penelitian ini berusaha untuk memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar dengan menempatkan temuan pada posisi yang strategis dalam konteks

penelitian terdahulu. Studi oleh (Supartono, et al., 2024) yang menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dan dukungan kontrol sosial formal dan informal memberikan dasar yang kuat untuk memahami faktor-faktor penghambat seperti pengawasan yang lemah dan keterlibatan alumni. Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengawasan dan kontrol sosial memainkan peran kunci dalam keberhasilan kebijakan. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggabungkan analisis mendalam mengenai struktur birokrasi dan sumber daya dalam konteks SMP Negeri 116 Jakarta, menawarkan wawasan yang lebih rinci tentang bagaimana kekurangan dalam aspek-aspek ini mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, penelitian (Awlokita, 2017) dan (Daliana & Rasyid, 2020) yang menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan semua pihak dalam menangani tawuran pelajar memperkuat argumen bahwa keterlibatan berbagai komponen sekolah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan kebijakan. Penelitian ini melanjutkan dan memperdalam diskusi ini dengan menyoroti kebutuhan untuk memperkuat ikatan sosial dengan alumni sebagai bagian dari strategi yang lebih komprehensif. Perspektif baru dari penelitian ini menekankan perlunya integrasi antara kebijakan sekolah dan dukungan dari komunitas, termasuk alumni, untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi tawuran pelajar.

Penelitian terdahulu mempengaruhi interpretasi penelitian ini dengan memberikan kerangka acuan yang relevan untuk menganalisis bagaimana berbagai faktor, seperti pengawasan dan keterlibatan alumni, mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dengan membangun dari temuan-temuan ini, penelitian ini mampu mengidentifikasi dan menyoroti kekurangan dalam implementasi kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam studi-studi sebelumnya. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam menangani tawuran pelajar, yang mencakup penguatan ikatan

sosial dengan alumni serta peningkatan koordinasi dan sumber daya dalam struktur birokrasi sekolah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskusi yang ada tetapi juga memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi di masa depan.

Dari perspektif ini, penelitian ini mengonfirmasi pentingnya memperbaiki pengawasan internal dan memperkuat kontrol sosial eksternal, khususnya terkait dengan keterlibatan alumni. Untuk mengatasi kelemahan dalam pengawasan, beberapa langkah konkret perlu diterapkan. Misalnya, memberikan pelatihan tambahan bagi Guru BK dan kesiswaan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani kasus tawuran sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup teknik-teknik pengawasan yang canggih, pemahaman tentang dinamika perilaku remaja, serta penggunaan alat-alat teknologi modern seperti sistem pemantauan digital dan aplikasi pelaporan insiden.

Untuk meningkatkan keterlibatan alumni, langkah-langkah berikut ini dapat dipertimbangkan. Membangun platform resmi, seperti kelompok alumni atau forum diskusi yang terhubung dengan kegiatan sekolah, serta menyelenggarakan acara rutin seperti reuni atau seminar, dapat memperkuat hubungan mereka dengan sekolah dan memotivasi mereka untuk berkontribusi pada program-program pencegahan tawuran. Selain itu, melibatkan alumni dalam aktivitas sekolah, seperti kegiatan mentoring atau sebagai pembicara dalam acara edukasi, dapat memperkuat rasa tanggung jawab mereka terhadap komunitas sekolah.

Analisis dampak potensial dari perbaikan pengawasan dan keterlibatan alumni menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih efektif memungkinkan deteksi dan penanganan potensi konflik lebih awal, sementara keterlibatan alumni yang lebih baik dapat memperkuat jaringan dukungan sosial dan mengurangi kemungkinan tawuran. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sekolah dengan sistem pengawasan yang baik dan keterlibatan alumni yang kuat memiliki tingkat kekerasan

yang lebih rendah, mendukung penerapan strategi ini untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Untuk penelitian selanjutnya, fokus pada evaluasi mendalam terhadap implementasi solusi yang telah diterapkan sangat dianjurkan. Penelitian dapat mengeksplorasi dampak spesifik dari pelatihan tambahan bagi staf sekolah dan efektivitas program keterlibatan alumni dalam mengurangi tawuran. Studi longitudinal yang memantau perubahan dalam pengawasan dan keterlibatan alumni dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan berharga tentang keberhasilan dan kelemahan strategi yang diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif di masa depan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan implementasi kebijakan pengurangan tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

4.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil dan interpretasi temuan. Pertama, keterbatasan dalam pengumpulan data menjadi tantangan utama, terutama terkait dengan waktu yang terbatas untuk melakukan wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini mengadopsi pendekatan triangulasi data dan *member checking*, yang memungkinkan validasi temuan dari berbagai sumber dan perspektif untuk meningkatkan keakuratan informasi. Kedua, meskipun observasi non-partisipatif digunakan untuk menganalisis kebijakan, metode ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap interaksi dan dinamika internal yang mendalam antara pemangku kepentingan di SMP Negeri 116 Jakarta. Sebagai langkah mitigasi, data tambahan dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai informan, termasuk wakil kepala sekolah, guru, dan siswa, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. SMP Negeri 116 Jakarta telah menerapkan kebijakan yang komprehensif dalam mencegah dan menangani kasus tawuran pelajar. Kebijakan ini mencakup tata tertib sekolah yang jelas, kegiatan pembiasaan, program ekstrakurikuler, dan layanan bimbingan konseling (BK). Penanganan pelanggaran oleh peserta didik dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, dengan fokus pada pembinaan dan perubahan perilaku peserta didik agar sanksi yang diberikan bersifat mendidik.
2. Secara keseluruhan, kebijakan sekolah di SMP Negeri 116 Jakarta telah efektif dalam mengurangi kasus tawuran pelajar, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kebijakan ini telah berhasil menurunkan angka kasus tawuran hingga mencapai nol, terutama melalui kerja sama antara sekolah, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pihak berwajib. Namun, kebijakan ini hanya berlaku di lingkungan sekolah, sehingga aktivitas peserta didik di luar sekolah tidak sepenuhnya terjangkau oleh peraturan sekolah.
3. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya himbauan dari dinas, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019, serta program preventif yang mencakup kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler. Namun, faktor penghambatnya meliputi pengawasan yang kurang ketat terhadap indikasi aksi tawuran dan terbatasnya wewenang sekolah dalam mengendalikan aktivitas alumni yang memicu tawuran. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat kontrol sosial guna lebih mengoptimalkan kebijakan yang telah diterapkan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu:

1. Integrasi Kebijakan Sekolah dalam Pendidikan IPS; penelitian ini menunjukkan pentingnya kebijakan sekolah dalam mendukung pembelajaran nilai-nilai sosial seperti toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Implikasi ini dapat diterapkan dengan mengintegrasikan kebijakan yang efektif ke dalam program pembelajaran IPS, sehingga siswa dapat belajar dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.
2. Penguatan Ikatan Sosial melalui Program Pendidikan; penguatan ikatan sosial antara siswa, sekolah, keluarga, dan komunitas dapat membantu mengurangi perilaku delinkuen. Implikasinya, guru IPS dapat mengembangkan program pembelajaran yang berfokus pada penguatan ikatan sosial siswa dengan lingkungan mereka, misalnya melalui proyek-proyek sosial, kerja kelompok, dan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan.
3. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan Sekolah; penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan sekolah secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah tawuran dan mendukung pendidikan karakter. Implikasi ini dapat mendorong pengembangan kurikulum IPS yang dinamis, di mana siswa diajak untuk terlibat dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan sekolah.
4. Pengajaran tentang Peran Institusi Sosial; penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya peran institusi sosial dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks pendidikan IPS, hal ini dapat diterapkan dengan mengajarkan siswa tentang peran berbagai institusi sosial, seperti keluarga dan komunitas, serta pentingnya kontribusi positif terhadap lingkungan sosial mereka.
5. Pengembangan Kurikulum yang Mendukung Karakter Positif; berdasarkan temuan penelitian, ada kebutuhan untuk mengembangkan kurikulum IPS yang tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga mendukung pembentukan karakter positif. Guru IPS dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk

menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, yang mendorong siswa untuk hidup harmonis dan menghindari perilaku kekerasan.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, berikut ini adalah rekomendasi yang diberikan kepada pengambil kebijakan, pengguna temuan, dan peneliti selanjutnya:

5.3.1. Bagi Pengambil Kebijakan

1. Perkuat Pengawasan; pengambil kebijakan di sekolah perlu memperkuat pengawasan terhadap peserta didik yang menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dalam tawuran. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan peningkatan jumlah petugas keamanan dan pengawasan serta penerapan teknologi pemantauan yang lebih canggih.
2. Penambahan Guru BK; disarankan untuk menambah jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) agar proses pencegahan dan penanganan pelanggaran bisa dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, mengingat pentingnya peran BK dalam mendeteksi dan menangani permasalahan siswa.
3. Komunikasi Intensif dengan Orang Tua; sekolah harus meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tua peserta didik melalui pertemuan rutin dan program *parenting*. Hal ini penting agar orang tua lebih terlibat dan memahami perilaku serta perkembangan anak-anak mereka di sekolah.
4. Sosialisasi Peraturan Sekolah; sekolah perlu meningkatkan sosialisasi terkait peraturan dan tata tertib sekolah kepada seluruh peserta didik secara berkala, sehingga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang ada dapat lebih ditingkatkan.
5. Pembentukan Ikatan Alumni; disarankan untuk membentuk ikatan alumni yang kuat dengan tujuan memberikan pengawasan dan pengarahan kepada para alumni agar mereka tidak menjadi pemicu perilaku negatif bagi peserta didik yang masih aktif di sekolah.

6. Evaluasi Berkala Kebijakan; pengambil kebijakan di sekolah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

5.3.2. Bagi Pengguna Temuan

1. Implementasi Kebijakan Preventif; pengguna temuan, termasuk guru dan staf sekolah, sebaiknya menerapkan kebijakan-kebijakan preventif yang telah terbukti efektif dalam mengurangi tawuran pelajar, seperti memperkuat kegiatan ekstrakurikuler dan program pembiasaan yang dapat mengalihkan energi peserta didik ke aktivitas positif.
2. Penerapan Teknologi dalam Pengawasan; guru dan staf di sekolah dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pengawasan, seperti menggunakan sistem pemantauan digital dan aplikasi untuk pelaporan insiden, guna meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan mencegah tindakan tawuran.
3. Kerja sama dengan Masyarakat dan Aparat Keamanan; disarankan agar pengguna temuan ini memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan setempat dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif di sekitar sekolah, sehingga peserta didik lebih terlindungi dari pengaruh negatif eksternal.

5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan yang diharapkan dapat dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.

1. Pendalaman Fenomena Tawuran; peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami fenomena tawuran di kalangan pelajar secara lebih komprehensif,

termasuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku peserta didik.

2. Perluasan Subjek Penelitian; disarankan agar penelitian berikutnya memperluas cakupan subjek penelitian, tidak terbatas pada satu sekolah saja, melainkan melibatkan beberapa sekolah dengan karakteristik berbeda untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai efektivitas kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran.
3. Evaluasi Jangka Panjang; peneliti selanjutnya sebaiknya juga mempertimbangkan untuk melakukan studi longitudinal guna mengevaluasi efektivitas kebijakan sekolah dalam jangka panjang, serta untuk mengidentifikasi perubahan perilaku peserta didik seiring dengan perkembangan kebijakan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Ibrahim, R. (2001). *Pembinaan Perilaku Sosial Melalui Pendidikan Jasmani: Prinsip-Prinsip dan Metode*. Bantul: Direktorat Jenderal Olahraga.
- Jumiyati, S. (2022). Langkah-Langkah Dasar Penelitian Kualitatif. Dalam M. W. Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (hal. 29-41). Get Press.
- Neuman, W. L. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Robandi, B., Syaripudin, T., Suyitno, Y., Nuryani, P., Hendriyani, A., Kurniasih, . . . Somarya, D. (2023). *Landasan Pendidikan*. Bandung: UPI Press.
- Sapriya. (2022). *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wekke, I. S., & dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Wianto, P. (2022). *Studi Fenomenologi Perilaku Sosial Siswa Terhadap Program Pendidikan Gratis*. Malang: Media Nusa Creative.

Jurnal

- Amelia, C. (2019). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*.
- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* .

- Arifin, H. N. (2021). Respon Siswa Terhadap Pembelajaran dalam Jaringan Masa Pandemi COVID-19 di Madrasah Aliyah Al-Amin Tabanan. *Widya Balina*, 5(1), 1 - 12.
- Daliana, R., & Rasyid, A. (2020). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di SMA Muhammadiyah 9 Rawabening Oku Timur. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*.
- Djamaluddin, A. (2014). Filsafat Pendidikan. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*.
- Endayani, H. (2018). Sejarah dan Konsep Pendidikan IPS. *Ittihad*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*.
- Hidayat, R., Idris, A., & Masjaya. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau . *Jurnal Administrative Reform* .
- Hilmi, M. Z. (2017). Implementasi Pendidikan IPS dalam Pembelajaran IPS di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mandala Pendidikan*.
- Latief, S. A., & Zulherawan, M. (2020). Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency). *Sisi Lain Realita*, 5 (1) 43-45.
- Malihah, E., Maftuh, B., & Amalia, R. (2014). *Tawuran Pelajar: Solidarity in the Student Group and its Influence on Brawl Behaviour*. *Komunitas*, 6(2), 212-221.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Nurjanah , P. R. (2014). Peran guru Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tawuran Remaja antar Sekolah: Studi di SMKN 2 Kota Serang dan SMK PGRI 2 Kota Serang . *Jurnal Al-Shifa*, 229-258 .

- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak. *Journal of Public Sector Innovations*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim| Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (2), 197-208.
- Samsudi, W., & Hosaini. (2020). Kebijakan Sekolah dalam Mengaplikasikan Pembelajaran Berbasis Digital di Era Industri 4.0. *Edukai: Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Sisca, M., & Alhakim, A. (2022). Analysis Of Juvenile Delinquency Based On Travis Hirschi's Social. *Legal Brief*.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*.
- Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 (4) .
- Triandiva, M. (2023). Dampak Tawuran antar Pelajar di SMKN 1 Budi Utomo Jakarta. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*.
- Tualeka, M. W. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Jurnal Al-Hikmah*.
- Utami, F. (2017). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*.
- Winata, K. A., Zaqiah, Q. Y., Supiana, & Helmawati. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi. *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30 (2) 137-140.

Skripsi

- Maulana, M. F. (2020). *Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di MA NU 05 Gemuh*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Setyawan, H. (2014). *Kebijakan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran antar Pelajar Di SMA Negeri*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Simarmata, I. P. (2023). *Perancangan Sekolah Menengah Atas di Saribudook (Tema: Green Arsitektur)*. Universitas Quality Berastagi.
- Widiyawati, N. (2018). *Prediksi Siswa SD Negeri Mohjosari Mantup Lamongan Berdasarkan Hasil Lolos Seleksi di SMP Negeri Menggunakan Metode Naive Bayes*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Yuliyanti, D. (2023). *Lembaga Pendidikan dan Kontrol Sosial (Studi Pada SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Undang - Undang

- DKI Jakarta. (2019). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan*. Pemerintah DKI Jakarta: Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Website

- Afgani, M. W. (2011). *Landasan sosial Budaya*. Diambil kembali dari http://www.geocities.ws/m_win_afgani/.
- Afif, M. A. (2022, Juni 24). *KPAI Soroti Maraknya Tawuran Antar Remaja di Tengah Pandemi*. Diambil kembali dari MetroTV News.com:

<https://www.metrotvnews.com/play/NleC0LvO-kpai-soroti-maraknya-tawuran-antar-remaja-di-tengah-pandemi>.

Ahdiat, A. (2023, 05 23). *Tawuran Bakal Masuk SKCK, Ini Tren Tawuran Pelajar di Indonesia*. Diambil kembali dari databooks.kudata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/tawuran-bakal-masuk-skck-ini-tren-tawuran-pelajar-di-indonesia>.

JPNN. (2023, 11 19). *Kombes Gidion Bentuk Satgas Baru, Pelaku Tawuran Siap-Siap Saja*. Diambil kembali dari JPNN.com: <https://www.jpnn.com/news/kombes-gidion-bentuk-satgas-baru-pelaku-tawuran-siap-siap-saja>

Mudjia , R. (2011). Diambil kembali dari Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>.


Sari, A. M. (2023, 08 26). *Ancaman Bagi Pelaku Tawuran Antar Pelajar*. Diambil kembali dari Opini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: <https://fahum.umsu.ac.id/ancaman-bagi-pelaku-tawuran-antar-pelajar/>.

Shiddiq, A. F. (2021). *Maraknya Tawuran Antar Pelajar Yang Dapat Merusak Persatuan Dan Kesatuan NKRI*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xauhc>.

LAMPIRAN I

Lampiran Administrasi Penelitian

Lampiran 1. 1 SK Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR: 5239/UN40.F2/HK.04/2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

| | |
|---------------|--|
| Memperhatikan | : 1. Usulan Program Studi Pendidikan IPS No: 289/UN40.F2.5/KM.00.1/2023 tentang Penetapan Dosen dan Mahasiswa Bimbingan Skripsi. 2. Surat Edaran Rektor no: 019 Tahun 2020 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Darurat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19); |
| Menimbang | : 1. Bahwa untuk meningkatkan layanan bimbingan skripsi kepada para mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dipandang perlu untuk mengasikan Dosen Pembimbing Skripsi di Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia; 2. Bahwa kegiatan bimbingan skripsi terhadap mahasiswa yang kuliah di Departemen/Program Studi merupakan salah satu kewajiban Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Para Dosen Pembimbing Skripsi berhak memperoleh angka kredit menurut peraturan yang berlaku; 3. Bahwa sehubungan dengan butir satu dan dua di atas dipandang perlu untuk menerbitkan surat Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia mengenai Dosen Pembimbing Skripsi di lingkungan Departemen dan Program Studi serta menetapkan nama-nama mahasiswa yang dibimbingnya. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5336); 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4586); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.9946); |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWAUPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No.52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
11. Keputusan Rektor Nomor : 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan UPI 2021;
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2021 – 2025;

MEMUTUSKAN:

- Kestu : Menetapkan Perbaikan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia untuk mahasiswa tahun Angkatan 2020 dengan daftar nama-nama tercantum dalam lampiran surat ini;
- Kedua : **Menugaskan Kepada :**
1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi Pendidikan IPS dalam kegiatan bimbingan skripsi di lingkungan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
 2. Ketua Program Studi Pendidikan IPS untuk mengawasi keterlaksanaan proses kegiatan bimbingan skripsi Dosen dengan para mahasiswa yang dibimbingnya.

3. Tim Dosen Pembimbing Skripsi untuk melakukan kegiatan bimbingan skripsi terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan waktu bimbingan paling lama satu semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang, dengan catatan tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.

Ketiga :



Surat Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan catatan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di :
Bandung, 26 Oktober 2023


AGUS MULYANA

| | | | | |
|----|---------|--|---|---|
| 62 | 2010002 | Putri Setiani | Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Permukiman Terhadap Pembangunan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Di Desa Cihudeung Kec. Parongpong | Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd. Dwi Iman Mutaqin, M.H |
| 63 | 2004698 | Rahma Aprilia | Perilaku Sosial Peserta Didik SMP Negeri 116 Jakarta: Studi Kasus Dalam Lingkungan Sekolah | Prof. Dr. Bunyanin Mafuh, M.Pd., M Drs. Jupri, M.T. |
| 64 | 2010130 | Rakheira Prima Putri | Interaksi Sosial Komunitas Pemulung dalam Membangun Solidaritas di Kota Bandung | Dr. A. Budhi Salira, M.Si. Muhammad Nur, M.Pd. |
| 65 | 2007609 | Rena Nurlatifah | Dampak Fear Of Missing Out (FOMO) Pada Media Sosial Instagram Terhadap Kemampuan Mengambil Keputusan Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia | Dr. Hj. Neiny Ratmaningsih, M.Pd. Dr. Ade Budhi Salira, M.Si. |
| 66 | 2009406 | Retno Dewi Setyaningrum | Pendidikan Karakter dalam Pembinaan Kemandirian dan Sosialisasi terhadap Anak Disabilitas Intelektual : Studi Kasus di SLB C Sumberasari | Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd. Dr. Dina Siti Logayah, M.Pd. |
| 67 | 2006330 | Ribka Mentari Kusuma Wardani Phefferkorn | Hubungan Kecerdasan Sosial dan <i>Fear of Missing Out</i> Terhadap Kepuasan Hidup Mahasiswa PPS UPI | Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed Drs. Asep Mulyadi, M.Pd. |
| 68 | 2008496 | Ridho Mujahid Islahi | Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i> Sebagai Upaya Penanaman Nilai <i>Social Responsibility</i> Siswa Sekolah Alam Bandung | Dr. Neiny Ratmaningsih, M.Pd Mina Holilah, M.Pd |
| 69 | 2009384 | Rina Setiawati | Implementasi Media Pembelajaran Monopoli 3D dalam Pelajaran IPS untuk Mengembangkan Kreativitas Peserta Didik di SMPN 7 Bandung | Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd. Diana Noor Anggraini, M.Pd. |
| 70 | 2000670 | Rundiawati | Upaya meningkatkan kecerdasan siswa melalui materi Ekologi Menggunakan Media Kolase dalam pembelajaran IPS | Prof. Dr. H. Dadang Sundawa, M.Pd. Drs. Asep Mulyadi, M.Pd |
| 71 | 2009872 | Rizkia Budi Utami | Penerapan Model Pembelajaran <i>Discovery Learning</i> Untuk Meningkatkan Cara Berpikir Kritis Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 1 Bandung | Prof. Dr. Bunyanin Mafuh, MA., M.I Dr. Dina Siti Logayah, S.Pd., M.Pd. |
| 72 | 2008427 | Rusnana | Pengaruh Keberadaan Aplikasi Belanja <i>Online Shopee</i> terhadap Peningkatan Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2020-2023) | Dr. Acep Supriadi, M.Pd., M.A.P. Drs. Faqih Samlawi, MA. |

Lampiran 1. 2. Surat Permohonan Izin Mengadakan Penelitian

| | |
|--|--|
|  | <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Jalan. Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154 Telepon. (022) 2013163 Pesawat. 25001-25003, 25005, 25008, 25094 Fax. (022) 2004985 Laman : www.fpiips.upi.edu - email: fpiips@upi.edu</p> |
| Nomor : 0660/UN40.A2.1/PT.01.04/2024 | 05 Februari 2024 |
| Lampiran : - | |
| Perihal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian | |
| Kepada Yth. Kepala Sekolah/Wakil Bidang Kesiswaan/ Bimbingan Konseling SMP Negeri 116 Jakarta di Tempat | |
| Dengan Hormat, | |
| Bersama Surat ini kami sampaikan mahasiswa Program Sarjana (S-1) dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia menerangkan bahwa | |
| Nama | : Rahma Aprilia |
| NIM | : 2004698 |
| Jurusan/Program | : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| Jenjang | : S1 |
| Mahasiswa tersebut di atas bermaksud melakukan penelitian ke Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bagi mahasiswa calon Sarjana Pendidikan/Non Pendidikan yang menyusun skripsi dengan judul skripsi : | |
| Peran Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar (Studi Kasus SMP Negeri 116 Jakarta) | |
| Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. | |
| a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Prof. Dr. H. Mamat Rohimat, M.Pd NIP. 19610511986011002 | |

Lampiran 1. 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 116 JAKARTA
Jl. Sunter Permai Raya Sunte Agung, Telp. 6408125/64717875 Fax, 021
6408125
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA


SURAT KETERANGAN
No. 56/PK.01.02


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP Negeri 116 Jakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Rahma Aprilia
NIM : 2004698
Jurusan/ Program : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Jenjang : SI
Nama Universitas : Universitas Pendidikan Indonesia

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 116 Jakarta.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Februari 2024
Kepala SMP Negeri 116 Jakarta

Dr. DJOKO SASONGKO, M.Si
NIP/NRK : 196412151996031003/ 162983



LAMPIRAN II

Lampiran Instrumen Penelitian

Lampiran 2. 1. Pedoman Observasi dan Dokumentasi

PEDOMAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI

PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN

PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA

Tanggal Observasi :

Lokasi Observasi :

| No. | Aspek yang Diamati | Indikator yang Dicari | Hasil Pengamatan |
|-----|----------------------------|---|------------------|
| 1 | Kondisi Lingkungan Sekolah | 1. Fasilitas Fisik <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kelas, termasuk meja, kursi, dan papan tulis. • Ketersediaan dan kondisi fasilitas umum seperti toilet, kantin, dan perpustakaan. | |
| | | 2. Kebersihan dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan petugas keamanan sekolah dan pengawasan mereka. • Kondisi pagar, pintu, dan sistem | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>keamanan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan area sekolah, termasuk halaman, koridor, dan area parkir. | |
| | | <p>3. Interaksi Siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku siswa di lingkungan sekolah, apakah terdapat tanda-tanda konflik atau tawuran. • Kehadiran kelompok atau geng yang berpotensi terlibat dalam tawuran pelajar. • Tingkat keramahan dan hubungan sosial antar siswa di lingkungan sekolah. | |
| | | <p>4. Pengawasan Guru dan Staf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pengawasan guru dan staf terhadap siswa di | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>lingkungan sekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respons dan interaksi mereka terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan tawuran. | |
| | | <p>5. Kegiatan Ekstrakurikuler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. • Pelaksanaan dan efektivitas kegiatan ekstrakurikuler tersebut. | |
| | | <p>6. Lingkungan Sekitar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan sekitar sekolah yang mungkin mempengaruhi terjadinya tawuran pelajar. • Hubungan sekolah dengan masyarakat | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | sekitar dalam penanggulangan tawuran. | |
| 2 | Kebijakan Sekolah | 3. Kebijakan Pencegahan 4. Kebijakan Penanganan Kasus Tawuran 5. Kebijakan Pembinaan Siswa 6. Kebijakan Pendidikan Nilai dan Etika 7. Kebijakan Kerja Sama dengan Orang Tua dan Masyarakat | |
| 3 | Implementasi dan Efektivitas Kebijakan | 3. Kehadiran dan Partisipasi 4. Aktivitas dan Prosedur 5. Peran dan Tanggung Jawab 6. Respon dan Pelaksanaan 7. Dukungan dan Sumber Daya 8. Perubahan dan Dampak | |

Lampiran 2. 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN
PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA

Tanggal Wawancara :

| Identitas Informan | |
|---|--|
| Nama | |
| Jabatan | |
| Daftar Pertanyaan | |
| 20. Konflik apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 21. Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 22. Pada tahun berapa saja pernah terjadi kasus tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 23. Berapa jumlah kasus tawuran yang pernah terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 24. Apakah terdapat perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dari tahun ke tahun? | |
| 25. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 26. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 27. Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 28. Kebijakan apa saja yang dibuat oleh sekolah dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 29. Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |

30. Adakah faktor pendukung/pendorong implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?
31. Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?
32. Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?
33. Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
34. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?
35. Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?
36. Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pertanyaan Pendukung

16. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mempromosikan pendekatan preventif dalam mengurangi tawuran pelajar?
17. Bagaimana kebijakan tersebut mengatur tentang pencegahan konflik dan peningkatan kesadaran siswa akan pentingnya kerukunan?
18. Bagaimana sekolah menangani kasus tawuran pelajar yang terjadi di dalam atau di sekitar lingkungan sekolah?
19. Apakah ada kebijakan yang mengatur tindakan disiplin dan sanksi bagi siswa yang terlibat dalam tawuran?
20. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mendorong pembinaan karakter dan sikap positif siswa?
21. Bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam upaya mengurangi tawuran pelajar?
22. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang menekankan pendidikan nilai dan etika kepada siswa?

23. Bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam upaya mengurangi tawuran pelajar dan meningkatkan kesadaran moral siswa?
24. Bagaimana sekolah melibatkan orang tua siswa dalam penanggulangan tawuran pelajar?
25. Apakah ada kebijakan yang mengatur kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif?

Lampiran 2. 3. Pedoman Wawancara Peserta Didik

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK
PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN
PELAJAR DI SMP NEGERI 116 Jakarta

Tanggal Wawancara :

| Identitas Informan | |
|--|--|
| Nama | |
| Kelas | |
| Daftar Pertanyaan | |
| 17. Konflik apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 18. Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 19. Seberapa sering tawuran pelajar terjadi? | |
| 20. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 21. Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 22. Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? | |
| 23. Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 24. Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? | |
| 25. Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar? | |
| 26. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar? | |

Lampiran 2. 4 Catatan Hasil Observasi

Tanggal Observasi : 05 – 02 – 2024

Lokasi Observasi : SMP Negeri 116 Jakarta

| No. | Aspek yang Diamati | Indikator yang Dicari | Hasil Pengamatan |
|-----|----------------------------|---|---|
| 1 | Kondisi Lingkungan Sekolah | <p>Fasilitas Fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kelas, termasuk meja, kursi, dan papan tulis. • Ketersediaan dan kondisi fasilitas umum seperti toilet, kantin, dan perpustakaan. | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 18 ruang kelas yang tersebar di 2 lantai sekolah • Kondisi kelas bersih dan rapi dengan meja dan kursi kayu coklat tebal. Dan peralatan kelas seperti papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, dll cukup terawat dan lengkap. • Kondisi toilet peserta didik perempuan dan laki-laki cukup terawat dan bersih serta memiliki lokasi yang berjauhan antara toilet satu dengan yang lainnya. • Kantin yang luas, bersih, dan sehat. Di sekolah ini terdapat larangan menggunakan botol dan tempat makan plastik sehingga tidak memiliki sampah plastik botol. • Perpustakaan berada di lantai satu. • Terdapat musala, tempat berwudhu, ruang parkir, taman, lapangan yang cukup luas, pos |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>petugas keamanan, ruang OSIS, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara keseluruhan sarana dan prasarana di sekolah ini sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. |
| | | <p>Kebersihan dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan petugas keamanan sekolah dan pengawasan mereka. • Kondisi pagar, pintu, dan sistem keamanan lainnya. • Kebersihan area sekolah, termasuk halaman, koridor, dan area parkir. | <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah bersih dan nyaman dengan tanaman dan pepohonan yang rindang. • Terdapat pengawasan yang cukup dari petugas keamanan baik melalui patroli langsung maupun melalui cctv sekolah. • Memiliki satu gerbang untuk akses keluar – masuk sekolah sehingga memudahkan pengawasan. • Tidak ditemukan sampah berserakan dan lantai koridor yang sangat bersih. • Area parkir cukup terbatas. |
| | | <p>Interaksi Siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku siswa di lingkungan sekolah, apakah terdapat tanda-tanda konflik atau tawuran. | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik memiliki kebiasaan yang sangat baik, sopan santun terjaga, dan ramah satu sama lain. • Terdapat indikasi kehadiran kelompok yang berpotensi terlibat dalam tawuran pelajar di luar sekolah. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran kelompok atau geng yang berpotensi terlibat dalam tawuran pelajar. • Tingkat keramahan dan hubungan sosial antar siswa di lingkungan sekolah. | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik terlihat sangat ramah dan sopan terhadap satu sama lain, guru, maupun staf sekolah lain. • Di samping keramahan dan perilaku positif peserta didik, masih ditemukan beberapa konflik kecil yang terjadi antara kelompok peserta didik. |
| | | <p>Pengawasan Guru dan Staf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pengawasan guru dan staf terhadap siswa di lingkungan sekolah. • Respons dan interaksi mereka terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan tawuran. | <ul style="list-style-type: none"> • Guru dan staf sekolah melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap perilaku peserta didik di sekolah untuk menghindari indikasi terjadinya konflik baik kecil maupun besar. • Jika terdapat konflik, wali kelas merupakan pihak yang pertama melakukan penanganan dan pembinaan terhadap peserta didik yang memiliki masalah. • Selanjutnya, guru BK akan menindaklanjuti permasalahan yang sudah di luar wewenang wali kelas. • Setelah BK, Wakil Kepala Sekolah Bidang kesiswaan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | akan melakukan tindak lanjut permasalahan yang terjadi. |
| | | <p>Kegiatan Ekstrakurikuler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. • Pelaksanaan dan efektivitas kegiatan ekstrakurikuler tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat total 20 ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. • Setiap peserta didik diwajibkan untuk mengikuti setidaknya 1 ekstrakurikuler dan disarankan untuk mengikuti 3 kegiatan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat. • Ekstrakurikuler sangat efektif untuk menyalurkan potensi, bakat, minat, dan energi peserta didik sehingga mereka memiliki kegiatan positif yang dapat mereka lakukan dan bermanfaat untuk masa depan mereka. |
| | | <p>Lingkungan Sekitar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan sekitar sekolah yang mungkin mempengaruhi terjadinya tawuran pelajar. • Hubungan sekolah dengan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • SMP Negeri 116 Jakarta terletak di lokasi yang sangat strategis dan mudah di akses dengan angkutan umum dan bis sekolah. • Sekolah ini terletak berdekatan dengan rumah warga, rumah dinas pendidikan, sekolah dasar, rumah sakit, Jakarta Internasional Stadium, halte |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| | | <p>sekitar dalam penanggulangan tawuran.</p> | <p>transjakarta, lembaga sekolah lain, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan lokasi yang strategis, berdekatan dengan sekolah lain, serta memiliki jalur pulang yang sama dengan peserta didik sekolah lain menjadikan lingkungan sekitar sekolah rawan terjadi tawuran pelajar. • Sekolah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. • Tidak hanya masyarakat di sekitar sekolah, SMP Negeri 116 Jakarta juga memiliki kerja sama dengan sekolah lain yang berdekatan dengan lokasi sekolah serta pihak kepolisian setempat dan TNI untuk membantu mencegah dan menanggulangi tawuran pelajar. |
| 2 | Kebijakan Sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pencegahan • Kebijakan Penanganan Kasus Tawuran | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan sekolah yang diterapkan mengenai tawuran pelajar tercakup dalam tata tertib sekolah. • Dalam mencegah tawuran, telah dilaksanakan program |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pembinaan Siswa • Kebijakan Pendidikan Nilai dan Etika • Kebijakan Kerja Sama dengan Orang Tua dan Masyarakat | <p>ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan, sosialisasi, dll.</p> |
| 3 | Implementasi dan Efektivitas Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dan Partisipasi • Aktivitas dan Prosedur • Peran dan Tanggung Jawab • Respon dan Pelaksanaan • Dukungan dan Sumber Daya • Perubahan dan Dampak | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik cenderung aktif dalam kehadiran dan partisipasi kegiatan di sekolah • Terdapat kerja sama yang erat dalam penerapan kebijakan sekolah oleh pihak sekolah • Prosedur yang jelas dan tegas dalam menerapkan kebijakan sekolah • Setiap tenaga pendidikan dan pendidik memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kebijakan sekolah dan aktif dalam penerapannya • Efektivitas kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar terlihat dari angka kasus tawuran yang terus menurun setiap tahunnya. |

Lampiran 2. 5. Transkrip Wawancara Narasumber

Lampiran 2.5. 1. Transkrip Wawancara Wakil Kepala Sekolah

Tanggal Wawancara : 12-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|---|
| Nama | Gustiana |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Miss Gusti | : Sejak tahun 2016 di SMP 116 dan menjadi kesiswaan pada tahun 2019. |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Miss Gusti | : Konflik ya, kalau konflik pelajar itu, SMP itu memang rentan banyak konflik ya? Pertama, konflik internal dan konflik eksternal. Mungkin kalau konflik eksternal itu, konflik di mana datangnya dari luar ya? Ya, istilahnya yang sering kita dengar dengan istilah tawuran pelajar, ya kan? Itu dari eksternal. Tapi kalau konflik internal pun ada, itu konflik antar sesama teman. Yang sering, sekarang kita angkat, bullying dan intoleransi, seperti itu lah. Jadi ya yang paling menjadi pondasi persoalan yang dialami oleh banyak masyarakat, ya itu konflik eksternal ya, tawuran pelajar ya, sampai melibatkan banyak di hak kayanya. Itu dari sekolah, masyarakat, bahkan kepolisian. |
| Peneliti | : Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Miss Gusti | : Kayanya sih, sepertinya sudah berkurang ya, karena kita sekolah, masyarakat, pihak kepolisian itu konsen ya. Sejak dipasang sepandu peringatan ya, jadi bagi siswa yang masih mengikuti tawuran kan dia sudah tahu sanksi-sanksi yang akan diberikan. Sepertinya berkurang sih, sedikit berkurang. Karena kemarin mungkin masih banyak, karena siswa itu kan baru masuk kembali ke sekolah. Baru lagi diberikan arahan dari pihak sekolah, seperti itu. |
| Peneliti | : Berapa jumlah kasus tawuran yang pernah terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |

Miss Gusti : Kalau menurut saya sih, kalau untuk 116 itu tidak terlalu banyak kasusnya. Jadi kalau untuk berapa pakai jumlah sih saya mungkin tidak terlalu ingat ya. Tapi pakai rata-rata aja kayaknya agak berkurang, sudah tidak terlalu banyak.

Peneliti : Apakah terdapat perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dari tahun ke tahun?

Miss Gusti : Karena saya bertugas sebagai kesiswaan itu dari mulai 2019, terus COVID, 2020, 2021 kita masuk kembali. Baru masuk itu agak mengalami lonjakan lah ya, wajar menurut saya karena dia artinya belum dapat arahan lagi dari sekolah. Masuk ke 2022 ke 2023 sih agak berkurang.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Miss Gusti : Kita melibatkan di sini, pastinya wali kelas ya. Wali kelas kita beri tahu dulu kalau siswa yang bersangkutan terlibat tawuran. Karena ini sudah tawuran itu sifatnya eksternal dari luar, jadi tidak ditangani langsung oleh wali kelas. Tapi udah ditangani oleh BK dan kesiswaan. Jadi mereka mendapatkan penanganan khusus dan sanksi pastinya.

Peneliti : Untuk sanksi itu sendiri, sanksinya berupa selain pencabutan KJP, adakah kursi atau kayak DO?

Miss Gusti : Enggak, kalau kita belum sampai ke situ, kita masih memberikan surat peringatan. Surat peringatan, pemanggilan orang tua, terus surat peringatan. Kalau memang sudah tingkatnya sampai penanganan kepada pihak berwajib, baru kita menahan, bukan pencabutan, tapi di sini baru tahapannya penahanan KJP. Dari kurang waktu 3 bulan. Sudah selesai dari itu, untuk memberikan efek jera yah, baru kita kembalikan. Atas persetujuan orang tua pastinya.

Peneliti : Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mempromosikan pendekatan preventif dalam mengurangi tawuran pelajar?

Miss Gusti : Kita biasanya memberikan pengarahan, kalau saya sih khususnya di bidang kesiswaan. Selain pengarahan, saya punya hari khusus, hari Rabu. Tapi saya lebih kepada menitik beratkan membangun karakter. Pembangunan karakter, karena seribu pengarahan, kalau kita tidak ada *output*

dari pembangunan karakter itu kan percuma. Terlalu diberikan arahan banyak-banyak. Akhirnya mereka jenuh dengan pengarahan. Lebih baik kita full kegiatan yang ada di sini, dengan terselenggaranya sampai kita punya 17 ekstrakurikuler. Mereka tentu masing-masing wajib memiliki 3 ekstrakurikuler. Dengan banyak keterlibatan di ekstrakurikuler, mereka punya kesibukan, energinya tersalurkan. Bahkan mereka dapat prestasi, sehingga *output* yang keluar itu menjadi karakter yang baik. Ketika dia sudah memiliki karakter yang baik, tanpa pengarahan pun, mereka akan menjauhi hal-hal yang negatif nantinya.

Peneliti : Untuk partisipasi eskul ini, dari seluruh siswa itu, semuanya ikut eskul atau adakah yang tidak ikut berpartisipasi?

Miss Gusti : Diharapkan semua siswa harus wajib ikut eskul. Karena saya sebagai wakil bidang kesiswaan, itu meminta data dari masing-masing wali kelas, untuk keterlibatan eskul. Ada pun, siswa itu berangkat ikut eskul karena dorongan motivasi sendiri, dari dalam atau karena pertemanan. Biasanya kalau datang dari motivasi dari dalam diri, mereka pasti akan *stay* terus. Bahkan bisa sampai berprestasi. Tapi kalau hanya ikut-ikutan dari pertemanan, biasanya tidak awet seperti itu. Tetapi target kita, arahnya tetap mewajibkan semua siswa punya ikut eskul.

Peneliti : Apakah ada kebijakan yang mengatur tindakan disiplin dan sanksi bagi siswa yang terlibat dalam tawuran?

Miss Gusti : Ya, kalau itu sih artinya dengan tata tertib ya. Pastinya tata tertib, dia mulai tata tertib dateng, dia tata tertib di kelas, dan ada di situ tindak apa namanya, apa, hal-hal yang tidak semesti di mana dia harus lakukan, dan itu ada di tata tertib semua aturan itu.

Peneliti : Bagaimana sekolah melibatkan orang tua siswa dalam penanggulangan tawuran pelajar?

Miss Gusti : Biasanya keterlibatan orang tua itu, kita hanya memberi pembekalan ya, pembekalan kepada orang tua dari mulai setiap tahun ajaran baru ya, setiap tingkatan dari kelas 7, 8 dan 9. Kita tidak punya program khusus untuk misalkan *parenting day*, tidak punya, tapi kita lebih kepada pembekalan setahun

sekali, setelah awal tahun ajaran baru masuk, apabila ada siswanya atau putranya terlibat dalam tawuran, baru orang tuanya kita adakan pemanggilan.

Peneliti : Apakah ada kebijakan yang mengatur kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif?

Miss Gusti : Kita ada dengan BIMAS, Bimbingan Masyarakat sekitar. RW.ya kan, pasti Pak RW dari BIMAS dan Polsek, tingkatannya.

Peneliti : Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Miss Gusti : Inshaallah sih efektif ya, sepanjang kita ada usaha dan upaya. Yang penting kita mengikuti aja aturan atau regulasinya, kita untuk mencegah terjadinya kita tawuran, kita harus melibatkan BIMAS. Apabila kita mendengarkan informasi, ada indikasi tawuran, kita langsung cepat respon, cepat tanggap, sehingga dari pihak Polsek atau BIMAS itu sendiri cepat ke TKP. Seperti itu sih tindak lanjutnya saya terkadang.

Peneliti : Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Miss Gusti : Inshaallah sih kayaknya gak ada semua, berkerjasama dengan baiknya seperti ini

Peneliti : Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?

Miss Gusti : Ya, sama-sama, mengetahui kebijakan-kebijakan itu. Ketika kita semua elemen guru yang ada di sini mengetahui, bahwa apabila ada indikasi tawuran, kita bekerjasama, alur penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana, di situlah letak keterlibatan guru dalam mengimplementasikan kebijakan.

Peneliti : Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?

Miss Gusti : Kalau untuk program khusus itu enggak, tapi kita punya program LDKS. LDKS dan MPLS bagi siswa baru yang masuk kelas 7, itu MPLS yang kelas 8, 9 itu LDKS. LDKS di mana nanti kita masukkan muatannya, materi di situ artinya cegah tawuran atau dampak buruk dari tawuran, itu pasti kita akan masukin materi itu.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Miss Gusti : Pastinya ya. Pastinya ketika dia sudah mengetahui bahwa di sekolah ini ada aturan-aturan mainnya, ada tata tertibnya, dan ada sanksi-sanksi yang akan diberikannya, dan mereka mengerti dan paham dan tahu yang sudah kita sosialisasikan itu, artinya apabila mereka masih lakukan, berarti mereka melanggar. Artinya dari norma-norma tersebut. Ketika melanggar, pastinya ada aturan-aturan mainnya juga dari sekolah. Sepatutnya yang sepatutnya masih mendidiklah untuk mereka.

Peneliti : Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Miss Gusti : Sebenarnya ada. Itu kita pakai seperti tim SLP, seperti Laboratorium Sekolah Pancasila, kita sudah dipantau dan dievaluasi juga. Untuk memantau sejauh mana tingkat karakter siswa di sekolah ini.

Peneliti : Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Miss Gusti : Membangun karakter. Jadi apabila mereka sudah memiliki karakter yang baik, mereka sudah memiliki mental *agility* yang baik, ketahanan mental, dan dia sudah terlalu *purpose* untuk apa dia belajar, dia akan menghindari hal-hal yang buruk pastinya untuk dirinya.

Lampiran 2.5. 2. Transkrip Wawancara Wakil Kepala Sekolah

Tanggal Wawancara : 12-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Akhmad Fatoni |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Fatoni | : Sejak tahun 1992 di 116, sampai sekarang nggak pindah-pindah. |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Fatoni | : Konflik itu, biasanya ada internal dan eksternal, anak-anak ya. Yang internal, antara siswa, ya. Biasanya hanya karena bercanda, bercanda-canda, akhirnya si teman yang di candain gak terima, ya. Tapi diselesaikan secara damai oleh sekolah. Kalau yang eksternal, biasanya dengan, sebetulnya awalnya dari gang, dia tinggal di gang sebelah sekolah. Tapi sekolahnya di tempat yang berbeda. Dari situlah yang mengawali terjadinya tawuran. Tapi sudah lama, enggak kita, alhamdulillah, 116 sudah enggak ada tawuran. Karena memang ada perda, pergub, ya. Pergub tentang pelarangan tawuran, kan. Akan dicabut KJP itu sangat membantu sekali. Jadi, alhamdulillah. Memang anak-anak kita masa remaja, masa ingin menunjukkan jati diri, tapi rata-rata kan anak-anak itu suka negatif, ya. Ingin terkenal negatif. Jadi, terkenal tapi negatif itu yang namanya. Alhamdulillah, bisa dikendalikan dengan tim-tim, ya, Pak Naim, ya. Pak Fadil. Itu yang sangat membantu. Pak Panji, yang olahraga. Pak Panji juga masih baru. Tapi kan, orang olahraga itu kan biasanya lebih ini. Di sini, yang paling lama ya Pak Naim sama Dimas. Tapi Dimas kurang begitu <i>respect</i> dengan kenakalan. Tapi yang kalau ada, saya suruh keliling contohnya, kalau habis ulangan itu kan, ya, itu memang Pak Prpto, Keamanan, sama Pak Naim, saya kadang-kadang kalau itu <i>nge-bell</i> Pak Dimas. Kemarin saya juga saat ada kabar, kalau habis ulangan, biasanya itu kan ada berita-berita di WA itu, biasanya mengawali berita itu, terus kita langsung bergerak ke depan, kita tungguin, ya, tungguin biasanya posisinya depan JIS itu. Ya, pokoknya, anak itu biasanya suka naik losbak atau |

naik motor, gitu. Kalau sudah kita tungguin, kan kita lihat anak-anak kita juga, ambil posisi lah. Jadi nggak, nggak langsung melakukan reaksi kan, gitu. Tapi rata-rata begitu.

Peneliti : Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Fatoni : Jauh. Kalau sekarang kan betul-betul sudah tidak ada lah, ya. Karena itu tadi kalau situ mau hubungan antara peraturan PEMDA itu, ya, PEMDA tentang pencabutan KJP, tentang KJP, dan larangan Pergub tentang tawuran, itu sangat membantu terhadap penurunan tawuran, ya, gitu.

Kalau dulu-dulu tahun berapa, ya, sekitar Oh, ya, 2010-an kali juga masih ada tahun 2010-an kali juga masih ada. Tahun 2010-an itu kan tawuran masih sifatnya apa, ya, larangan, tapi belum. Ya, itu sebelum ada Pergub, tawuran masih ditangani secara internal aja. Pihak sekolah dengan sekolah yang lain, ya kalo dulu. Tapi kalau setelah adanya Pergub, itu sudah masing-masing sekolah sudah memberikan sosialisasi, sehingga dengan menangani anak internal aja sudah pada yang dia juga di sekolah, yang bersangkutan juga sudah ditangani internal. Kalau tahun-tahun sebelum adanya Pergub, kadang-kadang kita datang, ini itu panggil gurunya, contohnya nih, 140 nih deket, kita panggil, terus SMP 23 gitu. Karena anak-anak kita, anak-anak 116 itu kan banyak yang dari Ancol. Ya, terus ada yang pulang dari Ancol, anak 23 kan ada di stasiun Ancol, kan kadang-kadang begitu. Itu, zaman dulu, tapi kalau sekarang, setelah adanya peraturan Pergub tadi, itu sudah meminimalisir ya, sudah membuat anak-anak di sekolah lebih mudah mengarahkan, gitu. Lebih mudah memberikan petunjuk arah atau mungkin sosialisasi tentang tawuran tadi, tentang larangan tawuran.

Peneliti : Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mempromosikan pendekatan preventif dalam mengurangi tawuran pelajar?

Pak Fatoni : Oh iya, itu kan preventif. Maksudnya setiap ada isu pasti sudah di *briefing* atau di sekolah itu dikumpulkan. Jadi anak-anak itu kan. Sebenarnya pagi itu kan ada waktu pembiasaan ya. Nah, pembiasaan itu diberikan bahasanya sosialisasi, nggak benar. Kalau yang benar ya sudah peringatan gitu lah, iya, diberikan peringatan. Arahan ya, arahan aja lah, arahan-arahan tentang isu-isu

yang mungkin terjadi dengan tawuran, sehingga anak tidak melakukan atau tidak merespon ya. Anak tidak merespon adanya isu-isu tawuran, begitu.

Peneliti : Apakah ada kebijakan yang mengatur kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif?

Pak Fatoni : Oh, kalau MOU nggak ada, tapi kalau kerja sama yang sifatnya bersama-sama membangun yang positif namanya Sekolah Komunitas.. Sekolah Komunitas itu di 116, SMP Yampi, SMP Santo Lukas II, SMP di belakang itu namanya Cicilia 1 sama Tunas Bangsa. Jadi ada 5 sekolah ini namanya Sekolah Komunitas. Nah, tapi program itu untuk meningkatkan kompetensi baik siswa maupun guru. Ya, meningkatkan kompetensi atau meningkatkan kemampuan-kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik yang sifatnya membangun. Kalau tentang tawuran, ya tentu dari pembinaan seperti itu akan lebih mudah, kan gitu. Lebih mudah. Kita kan tangani dengan kerja sama-kerja sama sekolah-sekolah di sekitar kita. Ini kan di sekitar kita, Yampi di situ. Terus Santo Lukas di belakang ini kan. Cicilia di belakang sana. Ini hanya sekitar-sekitar ini. Nah, masing-masing sekolah ini membuat sebuah prestasi masing-masing. Jadi dengan kegiatan yang positif akan meminimalisir hal-hal yang negatif.

Di sini, di 116 itu dengan membuat cabang ekstrakurikuler sejumlah 18 cabang. Tapi kalau 17 itu, satu lagi namanya apa itu, bola lonceng itu apa itu? Satu ya, itu belum masuk, tapi dilaksanakan. Kayak baseball? Grebi apa? Grebi. Grebi. Ruby. Ruby. Ruby itu di kegiatan, ini belum ada. Tapi pelaksanaannya sudah ada. Tambahan lagi, karena pelatih olahraga itu sendiri dan kemarin sudah dapat juara satu, laki perempuan. Kebetulan ceritanya kesempatan ini diambil karena tidak ada sekolah yang sudah punya pelatih seperti Daniel. Iya, Ruby namanya. Ruby itu bolanya lonceng, gede, segede bola basket, tapi lonjong. Nah, itu. Nah, itu juara satu, kemarin tingkat apa ya? Kota atau tingkat apa itu? Itu Bu Gusti yang tahu. Jadi itu termasuk tambahan, tapi belum dimasukkan ke RKS di dalam programnya kesiswaan. Yang kedua juga ada kegiatan yang dipisah, yaitu rohis dengan marawis. Nah, jadi ceritanya itu di RKS ada bunyi rohis, tapi di kegiatan pelak sanaannya dibagi dua, rohisnya dipegang oleh Pak Naim dan Pak Samin, marawisnya yang dipegang oleh Ustadz dari Cilincing.

Jadi di sini kadang-kadang kan kepala sekolah, ya begitu, tapi yang jelas di lapangan itu beda-beda. Makanya, oh, cabangnya banyak. Kenapa dipisah? Ya memang kenapa, karena butuh anak-anak punya marawis supaya bisa. Tadi itu kan kalau yang latih Pak Samin, geduberangan, nggak jadi-jadi. Mainnya suaranya udah nggak benar, kan Itu ceritanya Ustadz Yamroni namanya. Ya, itu marawis Ustadz Yamroni kan punya channel. Itu yang bisa Ustadz Yamroni, benar deh. Ini sudah berjalan, sudah ada enam bulan lebih kan. Dari itu tahun ajaran ini aja sudah Ustadz Yamroni sudah mulai latih, kan gitu. Kemarin acara Maulid Nabi sudah tampil, pakai musik, pakai organ juga disambung origin, jadi sudah bagus. Berarti Ustadz Yamroni sudah ada kalau enam bulan lebih itu sudah ada. Tapi rohis juga jarang, rohis diambil oleh Pak Samin sama Pak Naim. Cuman ya memang nggak aktif, nggak begitu ya. Kadang-kadang memang repot gitu kan.

Peneliti : Untuk Ektrakurikuler ini kan banyak nih Pak. Semua siswanya itu wajib ikut dan mereka ikutin atau ada beberapa yang gak?

Pak Fatoni : Sebetulnya diarahkan karena di dalam kegiatan, apa namanya, pengembangan potensi. Setiap anak itu kan punya potensi. Potensi itulah difasilitasi dengan wadah-wadah ekstrakurikuler. Hanya kadang-kadang anak-anak ini ada yang alasannya orang tua nya nggak bisa balik lagi dan sebagainya. Tapi ya kayaknya sih mungkin nanti tanya persisnya berapa persen yang tidak ikut itu hanya berapa persen. Mayoritas bahkan satu anak bisa memilih tiga kal, tiga jenis ekstrakurikuler itu. Jadi betul-betul mewadahi aktivitas yang positif supaya tidak ke arah yang negatif seperti tawuran tadi.

Kita itu kebijakannya, sekolah dengan membuat banyak cabang ekstrakurikuler itu akan meminimalisir kegiatan yang negatif, iya kan? Kalau kegiatan ekstrakurikuler, energi-energinya itu terkuras di dalam ekstrakurikuler kan sudah terfokus seperti itu. Kalau nggak, ini tenaganya pada anak-anak agaknya negatif. Jadi anak-anak remaja. Jadi kita upayanya, upaya selain kegiatan, selain aturan, jadi selain peraturan Pergub juga dilakukan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan-pembiasaan, kegiatan agama, keagamaan itu selalu hingga meminimalisir terjadinya tawuran di sekolah.

Peneliti : Suka ada bimbingan begitu gak kalau misalnya ada anak yang bermasalah Pak?

Pak Fatoni : Ada BK-nya, anak yang bermasalah itu biasanya ditangani oleh guru BK, tapi seharusnya ditangani oleh kesiswaan. Di sini kadang-kadang miskomunikasi BK. BK ini... saya diluruskan. BK itu sebetulnya intinya membantu mencari data sampai yang tidak bisa dicari oleh kesiswaan. Kadang-kadang kan kulitnya saja. Kalau BK itu sampai ke dalam-dalam, sampai ke *home visit*, sampai ke keluarga, sampai apa saja sebetulnya. Kenapa anak ini kok sering terlambat, anak ini tawuran, anak ini gini, sebetulnya guru BK. Cuma kenapa kalau tahu langsung tancep ke BK itu salah. BK tidak boleh memvonis, langsung memvonis bahwa anak bersalah itu kesiswaan harusnya. Pembinaannya, setiap siswa yang bermasalah bagi dibina. Cuma pembinaannya yang bersifat pedagogis. Di sini tidak pernah mengeluarkan anak, tidak pernah berhenti atau merumahkan saja, tidak pernah. Merumahkan, jaman kamu, jaman kamu, ada skorsing, ada 3 hari, kadang seminggu, sekarang tidak ada, tidak boleh. Itu melanggar hak asasi, hak untuk mendapatkan pengajaran anak itu, tidak boleh. Di sini tidak pernah. Paling diperingatkan, kalau tidak maksimal mendekati titik akhir itu, yang sudah berulang-ulang sampai anak itu, biasanya surat pernyataan, menggunakan materai, tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah klimaks. Tapi kalau jaman-jaman kamu sekolah kan, sudah, kalau tawuran atau apa, di skorsing 3 hari, 1 minggu, sekarang tidak boleh, itu melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan. anak di skorsing bukannya malah benar, tambah main, jadi kurang bagus.

Peneliti : Kalau tidak ada skorsing, jadi mereka tetap belajar Pak?

Pak Fatoni : Memang, ya pengawasannya namanya pengawasan melekat dari langsung, contohnya anak sudah dibikin surat pernyataan, setiap reaksi kegiatan yang negatif, pasti dipantau, contohnya pas pelajaran apa-apa, nanti sudah ini. Tapi Alhamdulillah, kalau sampai sekarang ini, sudah lama tidak ada surat pernyataan, paling surat pernyataan tahun kemarin itu, tahun-tahun dulu, tahun lama, tahun dulu mungkin masih ada, tapi mungkin anaknya waktu kelas 8 kali, anak kelas sekarang kelas 9, ada Fiqih, sudah ketemu ya. Fiqih, sama, siapa namanya, yang Petet itu, kelas 9, sekarang 9E, 9F sama 9E, itu saja yang biang

kerok tadi, Alhamdulillah sekarang sudah gak. Sudah diem, pokoknya dengan dibikin surat tadi, paling surat pernyataan saja sudah, anak-anak sekarang cemen-cemen gak kayak kamu.

Iya, karena apa ya, itu dengan ancaman tadi, dengan ancaman-ancaman tadi, mungkin dicabut KJP, atau mungkin dengan kita juga selalu sering, kalau ada isu itu langsung, karena guru itu sekarang kan bisa buka, Facebook anak, atau Instagram-nya anak, bisa melihat, gelagat kegiatan anak di luar, biasanya pameran-pameran, clurit, ya, itu dulu kan ada yang juga, kamu megang itu, di mana kita punya teman, punya orang tua, itu ketahuan oleh guru, dengan melihat di Facebook, di Instagram, jadi, kita sudah lebih preventif daripada, kalau dulu kan tahu nya, kalau anak itu di operasi tas, sekarang jarang, operasi tas itu jarang, jaman-jaman dulu kan, kalau dulu itu, satu bulan itu pasti operasi, operasi tas, sekarang enggak pernah, sekarang, paling kalau itu tadi, habis ulangan itu, terakhir hari itu, terakhir ulangan itu, tapi juga, Alhamdulillah, paling yang ada, temu spidol, terus, kosmetik, itu perempuan, itu yang kaca, itu apa, gitu, sekarang sudah, anak-anak cemen semua, anak-anak mama, lebih banyak suka main HP, iya, dan juga mungkin itu, kesibukan pengaruh, itu juga bagus, kalau mau pengaruh, media sosial, atau HP itu, juga akan, iya, tapi ada negatif, ada positifnya sih, karena pengaruh dari situ, juga ada negatifnya, tapi kalau anak-anak yang ini kan, sibuk juga, dengan kegiatannya juga, ada positifnya, ada negatifnya begitu.

Peneliti : Bagaimana sekolah melibatkan orang tua siswa dalam penanggulangan tawuran pelajar?

Pak Fatoni : Ya, itu ada tim TPPK. Tim Penanggulangan, Pencegahan, apa ya, Kekerasan. Sekolah mempunyai Tim Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan. Awalnya kan, Profil Pelajar Pancasila ya. Profil Pelajar Pancasila yang mengindikasikan banyaknya sekolah-sekolah yang melakukan bullying terhadap anak. Sehingga anak-anak dulu kan kayak di SMP 42 ada yang loncat dari lantai 4.

Peneliti : Oh, iya. Itu bukan kecelakaan Pak?

Pak Fatoni : Bukan, itu kan, itu ceritanya, waktu mau upacara, anak itu gak ikut ya. Sembunyi, nah gurunya kan, mungkin udah tau kalau ada anak di lantai

empat, di lantai tiga, awalnya di lantai tiga, anak itu terus lari ke lantai empat. Mungkin gurunya teriak-teriak, mana? Cari, turun, tapi gak mau. Mungkin takut, akhirnya anak itu loncat

Peneliti : Aku pikir, dia terpeleset begitu loh Pak

Pak Fatoni : Karena dia sembunyi di belakang, ini kan ada Nako ya? Nah, nako, dia keluar. Kan begitu. Dia kemungkinan mau sembunyi di belakang, di bawah Nako, di bawah, pokoknya kan. Iya, ada teras atau atasnya teras yang gitu. Hanya itu mah, karena saya kan namanya tau anak-anak yang begitu, dia akan sembunyi. Nah, saat seperti itulah, guru mungkin teriak-teriak tadi, dia ketakutan, loncat. Oh, mungkin karena udah deket ini, sudah naik ini gurunya. Kemungkinan begitu, tapi yang jelas, anak itu pasti ketakutan.

Peneliti : Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Fatoni : Kamu sebutin kebijakannya apa saja.

Peneliti : Tadi ada, tata tertib, peraturan, terus, kebijakan itu kan bisa yang, kebijakan preventif seperti memberikan pembiasaan, terus kegiatan ekstrakurikuler untuk lebih banyak kegiatan positif, yang tim ini juga, Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan.

Pak Fatoni : Nah, sudah efektif. Dengan terbukti tidak adanya tawuran lagi di tahun 2023, pokoknya itu saja, sudah tidak ada tawuran lagi. Dan ini juga karena adanya sekolah komunitas, kebijakannya, itu juga termasuk pembinaan kompetensi, apa ya, kerja sama ya. Namanya komunitas belajar. Itu akan membangun, karakter yang positif terhadap peserta didik di sekitar sekolah. Kan begitu.

Peneliti : Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Pak Fatoni : Penghambat? Hambatannya, gak ada kayaknya ya. Jadi, hambatannya paling ini ya, tapi kalo manggil orang tua, andaikan dulu itu manggil orang tua, tapi juga dateng. Gak ada, gak ada hambatan lah. Kalo kita undang, dateng. Hanya bedanya, ini yang sering terjadi ya. Orang tua, dalam kasus, anak itu tetangga, terus tahu, orang tua nya si A itu punya karakter. Nah dari situ lah, karena dari RT dari keluarga itu mungkin merasa, tidak cocok. Nah

itu yang suka dibawa-bawa ke sekolah. Saya bilang, urusan bapak di rumah tangga ya urusan di rumah tangga. Selesain secara baik-baik. Urusan di sekolah kan anak, bukan bapak, dengan ibu. Memang itu lah, kadang-kadang terjadi, hambatannya lingkungan yang kurang kondusif, kadang-kadang gak selalu, kadang-kadang bisa mengganggu atau menghambat penyelesaian kasus. Nah itu, contohnya itu tadi. Dari beberapa kasus, atau dari sekian tahun baru menemukan satu. Karena memang, karakter sekarang, orang-orang keluarga itu, masih muda-muda ya. Bapakmu masih muda kan? Punya anak di sekolah sini juga, nah akhirnya timbul omongan yang blablabla dibesar-besarkan. Itu yang kadang-kadang kita ini, ini hambatannya ya. Sekolah sebetulnya tidak mau tahu urusan di keluarga, bukan ranahnya. Saya juga, hya pernah, tapi dari sekian, baru sekali, beberapa kali.

Peneliti : Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?

Pak Fatoni : Peranan gurunya, sangat adanya kerjasama lah perannya perannya, saling, apa namanya perannya sangat penting ya kolaborasi, perhatian ya memperhatikan terhadap perilaku, perilaku awal ya, perilaku awal tindakan negatif anak-anak, jadi maksudnya guru-guru itu kan sekarang bukan semata-mata mengacar ya tapi lebih ke karakter lebih ke sifat-sifat anak ya walau apa nggak boleh melakukan hal yang sifatnya menghukum kan tapi tetap diawasi makanya di sini nggak boleh bawa HP. Di sini kalau ada anak yang bawa HP ya sifatnya harus di monitor bukan berarti anak-anak itu steril nggak ada yang bawa, pasti ada yang bawa tapi di monitor oleh wali kelas, oleh gurunya itu selalu dimonitor. jadi dengan kebijakan di antaranya adalah tidak boleh membawa HP itu akan apa namanya bapak ibu guru-guru lebih merespon, lebih memperhatikan terhadap anak-anaknya jadi kalau anak bawa HP kan jadinya guru-guru nya ,ada apa kan begitu, kalau ada satu dua anak yang lagi membuka HP kan jadi anak-anak kan pada pasti ada perilaku yang ada apa kan begitu, ada anak yang anteng jadi kan ada apa, ada yang pada ribut-ribut, ada apa jadinya lebih apa ya namanya lebih peka ya terhadap perilaku-perilaku anak baik itu perilaku yang mengarah ke hal-hal yang negatif

Peneliti : Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?

Pak Fatoni : Mencegah tawuran, adanya ya, sebetulnya kalau pelajaran terintegrasi dalam mata pelajaran adanya, bahasanya gini, tidak ada mata pelajaran khusus tapi terintegrasi kepada seluruh mata pelajaran. Datengin kalo itu kan penyuluhan-penyuluhan dari pihak apa itu namanya, kepolisian iya, kepolisian dari pihak kalau itu tawuran dari kepolisian kalau kaya kesehatan bisa, tapi kalau situ mendatangkan atau melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang tawuran, tentang dampak dari tawuran, dampak tauran, sosialisasi dampak tauran, sosialisasi dampak, tambahin itu supaya jelas. Sosialisasi Dampak Tawuran. Dilakukan kapan? itu biasanya satu di awal, saat MPLS di awal siswa kelas 7 masuk, di awal pelajaran baru atau di saat-saat pihak kepolisian membutuhkan penanganan preventif.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Pak Fatoni :

Peneliti : Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Pak Fatoni : Untuk mengukur ya, ada melalui ini aplikasi PMM, jadi di aplikasi PMM atau rapat pendidikan, di rapat pendidikan itu ada instrumen atau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bullying, tawuran, intoleransi, dengan kekerasan seksual. Jadi terintegrasi dalam evaluasi penanggulangan kekerasann, tindakan tadi tindakan kekerasan anak-anak dan tawuran itu melalui instrumen aplikasi rapat pendidikan, itu apa kegiatannya? ANBK Assessment National Berbasis Komputer, ANBK, jadi soal-soal itu, karena di dalam ANBK ada, selain literasi, numerasi, lingkungan sama karakter, lingkungan belajar, satu, lingkungan belajar, dua karakter, itu akan mengevaluasi kondisi sekolah, kondisi perilaku anak-anak, kondisi lingkungan sosial, anak-anak. Jadi itu lingkungannya termasuk tadi tawuran, pelanggaran tata tertib, kebijakan sekolah itu semua ada di lingkungan belajar sama karakter.

Peneliti : Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Fatoni : Kita pertahankan peraturan yang sudah ada, kita lebih preventif ya melakukan penyuluhan ya, lebih melakukan penyuluhan, lebih banyak atau mungkin lebih sering ya melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan pihak, diintensifkan dengan pihak kepolisian, jadi caranya diintensifkan di ini juga apa namanya, diperkuat tim TPPK atau tim penanggulangan tindak kekerasan di tingkat sekolah nanti itu.

Lampiran 2.5. 3. Transkrip Wawancara Guru BK

Tanggal Wawancara : 13-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Muhammad Fadil, S.Pd |
| Jabatan | Guru BK |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Fadil | : Saya di sini dari COVID tahun 2021. Tapi <i>record</i> saya kebanyakan ngajarnya di swasta. Baru mengerik ke 2021 di sini. Kurang lebih berapa? 3-4 tahun? Udah 3-4 tahun. |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Fadil | : |
| Peneliti | : Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mempromosikan pendekatan preventif dalam mengurangi tawuran pelajar? |
| Pak Fadil | : Nah ini problem bu, jadi BK kita pasti punya program, kita bikin program tahunan, program semester, tapi permasalahannya adalah, kepentok anggaran, karena setiap acara kalau nggak ada uangnya, kita mau ngapain? Nggak mungkin, orang ibu-ibu arisan aja ada uangnya, kita masa bikin program, karena begini, kita mau bikin program anak-anak supaya kelas 9 itu merekaterarahkan, masa depannya, bikin minat bakat, oke tes, minat bakat, selesai tes ngapain? Cuma dikasih doang hasilnya? Ya kan nggak mungkin, kalau cuma dikasih hasilnya doang, oke bu bakatnya ternyata otak kiri, otak kanan, misalnya intelektual, bakatnya apa? Ya menurut saya mah, itu mah, kagak berguna. Ya follow up-nya, saya pengen ya, itu bikin <i>career day</i> , kita datengin, sama kayak yang SMA ada kampus <i>goes to school</i> , saya pengen yang SMP itu <i>career day</i> , datengin anak-anak SMA, alumni-alumi boleh lah, atau kalau nggak alumni, kita mitra lah kerjasama sama sekolah, minta tolong dong, perwakilan yang paling dekat dateng ke sekolah kita, dateng ke stand, kalau anak-anak nanya dilayaniin, begitu juga yang SMK, jurusan-jurusan tertentu, dateng, jadi anak- |

anak itu ibaratnya mereka semacam *exhibition* ya, pameran, lo mau nanya kemana nih SMA mana, silakan dateng, lo mau nanya IPA-IPS sih, mau bahasa silakan dateng. Begitu juga yang dinas ya, pelayaran, bidab, taruna-taruna, itu juga sama, saya pengennya begitu, cuman kan bikin *event* segede itu, kalau duitnya itu nggak ada, nggak mungkin, sekarang nggak ada dukungan uang.

Jadi mau SMP SMA pun, BK programnya ada, tapi nggak jalan karena nggak ada biaya, itu satu, biaya, yang kedua, tenaga manusianya kayaknya nggak memadai, bisa bayangin aja, memang dua guru BK-nya di sini, tapi yang satu wakil, sisanya saya sendiri, menghadapi tiga angkatan, 18 anak, 600 orang, 600 biji kepala itu, itu udah capek, belum lagi ngajar kita masuk ke kelas, itu repot, belum lagi *home visit*, belum lagi yang *accidental*, yang dadakan kasus, harus gerak cepat, jadi program-program itu nggak jalan Bu.

Sama juga kayak pengawas bilang, kenapa kok ini nggak jalan Pak,? gimana Pak? Bapak bayangin aja deh, Bapak memegang 600 anak, Bapak minta semua itu dikerjakan tuntutan gurunya, gimana caranya? saya bisa datang ke kelas saja sudah Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah saya ngajar ke kelas nggak kaleng-kaleng, bukan ngajar cuman sekadar, ya anak-anak kita hari ini mau bahas blablabla, kenakan remaja, nggak, tapi memang kita, saya selalu berusaha menyamakan seperti mata pelajaran, ada ujian praktiknya, ada kegiatannya.

Ya ini contohnya yang kelas 8 ibu, tadi karena di kelas 9 itu ada program karir masa depan, saya tuh nyuruh anak-anak bikin plan 10 tahun ke depan, rencana hidup mereka gitu, ya ada yang bagus, ada yang jelek, gak apa-apa yang penting anak-anak *aware* lah sama mereka, ah inilah, plan mereka 10 tahun ke depan, ada yang pilih SMA, ini ada lagi, ada yang milih, dulu tuh mereka tuh kebanyakan SMK, kebanyakan pengen jadi SMK, saya baca ternyata kenapa mau jadi SMK, supaya kerja paling bisa cari uang buat bantuan keluarga, pelan-pelan saya kikis ya otaknya ya, saya bilang begini, SMK bukan jelek, tapi buat saya, kalau kamu memang udah kepepet harus kerja, ya silahkan, tapi kalau masih selagi mampu SMA, karena bagaimanapun kita kerja bukan buat 1 tahun 2 tahun, buat 10 tahun, buat 20 tahun, buat selamanya, sekarang kerja kalau nggak ada gelarnya ya. ya kontrak aja kerjanya kontrak gitu kan, jadi admin, jadi apa, hanya agak bagus.

Mungkin ada yang mau jadi pramugari, jadi dokter, gitu misalnya, mereka mulai *aware* tuh, pilih-pilih SMA, pilih-pilih kampus, jadi ngerti ada namanya UGM, ada namanya UI, ya mangga-mangga, mau dibawa boleh, setel yang bagus, kayak gini-gini sudah saya buang juga sih Bu, tapi ya ini bakal yang bagus saya dokumentan buat akreditasi sekolah, UGM, mereka jadi *aware*, *aware* kampus, *aware* jurusannya, ada yang mau jadi apa, jadi apa, saya seneng gitu, akhirnya taraf kualitas hidup mereka meningkat dari yang tadinya, gue cuman pengen kerja cari uang, sekarang mereka jadi berpikir, gue mau menghasilkan uang, karena saya bilang kalau kerja cuman nyari uang, sebulan sekali doang dapetnya, tapi kalau kepikiran yang mau menghasilkan uang, *every time*, gue bisa menghasilkan uang sebanyak apa pun yang kamu mau.

Itu sih ya, ada juga program lain nih, anak-anak kan suka bobo, datang-datang telat, ya itu belajar, ada materinya juga, ada bab juga, saya bikin sendiri aja, emang tuntunannya sih enggak ada dari Kemendikbud, ya saya bikin sendiri, karena mereka suka bangun siang, saya bikin *sleep management*, cara mengatur pola tidur, ya ada yang gambar gini, macem-macem ya di gambar ya, ya lumayan lah, anak-anak mulai *aware* kan, oh tidur tuh 8 jam, beberapa tips tidur juga dia ada, nah ini tips-tips tidurnya, mengurangi apalah, ada lagi 4 tips tidur, agak tip tidur sulit, macem- macem lah, banyak sih yang saya bikin program, bullying juga sama, kalau yang bullying itu mereka bikin sosiodrama. Jadi mereka bikin script, saya bagi peran-perannya. Ada yang jadi bully, ada yang *defender*, ada yang, macem-macem lah. Biasanya 9 atau 8, ya gitu, mereka bikin script, akhirnya mereka peragakan di kelas, seru juga kan jadi tontonan hiburan buat mereka, akhirnya mereka belajar, oh sakit juga ya kalau jadi yang di bully, yang bully juga ngerasain bahwa, ya sebenarnya yang gak bagus juga ternyata tuh, yang diem-diem juga kalau ada pembulyan, yang ngasih tahu itu salah, kan banyak juga tuh yang diem, ga mau terlibat, itu juga pendukung bullying juga, yang ngompor-ngomporin bullying juga sama, jadi mereka sadar tuh ternyata, selama ini namanya bullying bukan hanya si korban dan pelaku, kita juga bisa ikut mendukung perilaku bullying itu, dengan kayak gitu-gitu sih.

Kalau yang keluarga kadang-kadang lewat *empty chair*, jadi bangku kosong, 0-2, mereka duduk kesini, jadi bangku kosong yang 2 itu, mereka memunculkan

di dalam kesadaran otaknya, ayah sama ibunya di depan. Mereka bisa ngomong tuh, hal-hal apa aja yang gak bisa diungkapkan selama di rumah dengan orang tua. Mereka ngomong, ke orang tuanya, aku tuh sebenarnya blablabla. Mereka disitu ngomong ya, nangis, ada yang nangis, ada yang apa. Agar mereka sadar gitu loh, bahwa kita yang sekarang itu hasil didikan dari orang tua. Kamu harus tahu, mana yang gak baik jangan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Harapan saya, ketika kamu besar, berkeluarga, kamu bisa nge-cut, potong tuh didikan-didikan yang gak layak. Jangan ada lagi di generasi kamu. Jangan nanti ujung-ujung, ah lemah. Dulu jaman papa mama masih gini gak ada apa-apa. Yang gini, ngomong-ngomong gini. Jadi memang gak bisa kita samakan. Tiap-tiap generasi pasti beda keadaannya. Jadi jangan sampai bisa maratakan.

Sama kayak kakak kelas kalau universitas itu, apa namanya, ospek-ospek. Ayo-ayo dulu jaman kakak mah lebih parah. Itu pembodohan jaman sekarang. Kita harusnya sudah gak bisa berlaku. Nah itu, sosio drama. Kayaknya diambil sih kalau sosio drama. Ininya, scriptnya sama sekolah diminta. Karena waktu itu ada penilaian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Saya diminta tuh bekasnya. Nah itu, jadi usaha-usaha yang tadi.

Nah kalau Napza, rokok, anak-anak itu bikin banner juga, anti Napza sama *roleplay*. Ya *roleplay* mereka bermain drama. Ada yang jadi penggunanya. Ada yang penyuluhnya. Dia memberi tahu bahwa itu gak baik. Dia menyadarkan ke masyarakat. Dua itu sih. Sisanya tambahan perannya mereka boleh mengkreasiannya. Tapi yang dua itu mesti ada. Jadi selain bikin banner, mereka *roleplay*. Nah itu usaha-usaha, walaupun programnya gak jalan. Tapi saya lewat kelas, di kelas langsung ngajarnya. Ya, menurut mereka sih, lumayan ya. Lumayan ngasih bekel ke mereka. Alhamdulillah lah bu. Udah gak ada bullying. Bullying dulu, jaman dulu. Aduh bullyingnya kacau. Anak yang dilempar jam dinding, kepalanya. Ada yang dimasukin sampah, ke tasnya langsung. Ada anak yang disekep. Nah anak lewat kelas. Disekep, digesek-gesek di kelas. Buset. Itu kacau-kacau. Nah itu. Langsung saya keplak gitu bu. Tendang saya datang, tendang. *Pakk*, pakai pantofel.

Tendang langsung mejanya. Panggil masuk ke ruangan. Kita tatar dulu. Siksa dulu. Nah dari ini mereka paham gitu ya. Bahwa mereka bukan yang paling

kuat di kelas. Mereka bukan preman gitu. Kalau mau jadi preman jangan disini. Saya juga bisa lawan kekerasan mereka. Jadi intinya sebenarnya anak-anak itu karena ngerasa mereka gak punya lawan di sekolah. Jadi mereka tuh ngerasa berkuasa. Dan guru-guru sering kali kalah *power* kan. Sama anak-anak. Ada yang takut. Ada yang males. Ada yang sudah cuek sama anak. Saya gak ada urusan. Kencang-kencangan gitu ya. Lu beli, lu jual, lu beli. Langsung pernah ngajakin anak. Kalau mereka gak terima. Ya ayo kita duel di lapangan. Saya udah lepas bajunya. Mau ngajak berantem ya ayo berantem. Sekalian nanti saya panggil ke kepala sekolah tuh. Kalau ada yang pingsan jangan dibangun. Akhirnya mereka mikir juga, takut juga. Sekarang untuk ngebully pun mereka tau. Mereka harus berhadapan sama siapa. Usaha-usaha itu.

Karena saya lihat sebelumnya kan juga ada guru BK. Jadi ini kosong setahun baru saya masuk. Saya lihat kalau guru BK yang sebelumnya mungkin lebih banyak ke bimbingannya ya. Tapi permasalahan kelas bawah itu gak bisa hanya lewat kognitif. Saya pikir kalau usaha lewat menyadarkan, bimbingan-bimbingan begitu, ngasih tahu, nah yang lainnya. Itu efektifnya kalau mereka kelas sosialnya atas. Karena secara pikiran mereka lebih mampu mencerna nasihat kita. Kalau ngomongin sama yang kelas-kelas bawah ya. Menurut mereka mah kagak efektif. Mereka itu *behavioral*. Mereka akan berubah, sepanjang perilaku mereka itu berubah. Jadi gak bisa sama mereka. Kamu berubah dong. Jangan kayak gitu lagi. Nyampe kiamat juga ibu ngomong sama anak-anak itu gak berubah. Makanya sama guru-guru yang, ah dia mah susah, anaknya gak berubah. Ya, gak bisa.

Karena mereka otaknya, kognitifnya gak bisa. Kita lewatnya *behavioral*. Kalau memang mereka keras, kita kasih keras. Mereka bisa diajarin yang lembut, ya kasih lembut. Biasanya begitu. Kan kita bisa belajar Ivan Pavlov. Itu ngedidik anjing. Pake bel. Anjing itu tahu. Kalau ada bel, bunyi, tandanya mau dikasih makan. Nah, anjing itu bukan berarti dia gak punya otak. Dia punya otak. Tapi anjing dengan perilaku yang kita dididik berulang-ulang. Lama-lama tertanam kebiasaan itu dikepalanya. Itu jadi perilaku baru yang baik. Nah, itu. Saya lewat situ, para anak-anak.

Menyesuaikan tempat saya bekerja dimana. Saya bekerja di tempatnya begini. Gak bisa kalau lewat kognitif. Yang berarti saya pernah dikritik. Pak Fadil

gak modern. Apa namanya? Kurikulum merdeka sekarang udah gak bisa kayak gitu sama anak. Gak boleh keras-keras. Iya, Pak Nadiem ngomong dulu sini ke sini ngajar sebulan. Kalau gak dia stress, ngajarin anak di sini sebulan. Gak bisa itu berlaku. Mati berdiri Pak Nadiem ngajarin anak di sini. Udah bisa berhasil, udah bagus. Kita sering kali nuntut anak itu ketinggian. Tapi gak sadar latar belakang mereka. Coba kita bayangin, minta anak berprestasi. Ibu dateng, rumah anaknya aja kadang sepetak. Udah gitu, daerah-daerah jemit kan itu bau, kotor, lingkungannya banyak yang merokok. Nenek-neneknya pada mabuk. Kondom dimana-mana. Coba kita bayangin, anak kayak gitu kita mengharapin apa? Ranking juara satu. Kayaknya terlalu munafik, anak kayak gitu juara satu. Bisa datang ke sekolah rajin tiap hari juga sudah syukur. Bagus itu. Mereka ada kepikiran sekolah tiap hari aja. Saya pikir kayaknya udah bagus.

Saya datang ke rumah anak. Tempat rumah anaknya, tempat rumah prostitusi. Bola diskotik gede, lampu nyala, warna-warni. Saya kaget ini. Ini rumah apa ini? Kok ada bola bulet? Saya ingat kalau bola bulet ini tempat. Agak lain ini nih. Saya sama wali kelas. Bu, ini kita apa rekreasi dulu apa gimana ini? Kita, agak, tempatnya hiburan begini ya. Iya, kan coba bayangin anak perempuan. Dia hidup di tempat prostitusi. Gendernya bakal jadi apa? Ya, prostitusi. Ya, jadi saya pikir saya sedih gitu sama anak-anak kayak gitu. Tapi kita sebagai guru hanya sebatas mengubah, saya pikir saya cuma bisa mengubah kapasitas mereka. Nggak bisa kita ngelawan kodrta orang kayak mereka itu. Dijadiin kita yang atas belakangnya bagus gitu. Kodrat mereka gak bisa di samaratakan gitu. Itu paling usaha-usaha ini.

Peneliti : Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Fadil : Saya di kelas, kalau kayak dulu lagi kayaknya udah nggak bisa karena beban tugas ngajarnya udah makin banyak. Sekarang harus megang P5, proyek-proyek apalah itu bikin capek juga lah itu. Paling saya selalu nasehatin aja sih. Saya ngasih mereka pengertian ibaratnya *inquiry* lah bu. Dari hati ke hati lah. Saya pake metode itu aja *inquiry*, hati ke hati. Saya cuma ingin menyadarkan mereka. Karena saya bilang, sekolah itu bukan supaya kamu sukses. Bukan

supaya kamu mau apa dapet pekerjaan atau supaya kaya, gak, tapi sekolah tujuannya supaya kamu otaknya ngembang. Kalau kemampuan berpikir kamu lebih baik. Semua kegiatan dalam hidup kamu lebih baik. Tapi kalau kamu sekolah hanya sebatas formalitas. Ya formalitas juga kehidupan kamu di dunia. Nggak bermakna apapun. Tapi yang Alhamdulillah sih, anak-anak di sini lebih, sekarang lebih baik. Mereka punya, apa ya, punya *aware* sama guru, lebih sopan ya. Yang salaman, ya salaman, tetap aja anak-anak yang otaknya segede biji nyam-nyam. Saya bilang begitu, anak-anak yang kalau itu, ada aja otak-otak segede biji nyam-nyam, sudah segede biji nyam-nyam, ngeempos lagi. Kalau otaknya itu, kayak nggak berkembang itu otaknya itu. Tapi yang kayak gitu-gitu ya kodrat ya bu. Kita nggak bisa pengen semua sama 100% berubah, ya, Tuhan udah ngasih komposisi. Ini anak yang kayak gini sekian persen. Ini anak yang kayak gini, ada yang pelau-pelau. Ada yang gak jelas, planga-plongo, ada yang cerdas. ya, sudah gitu persennya. Kita nggak bisa pukul rata semuanya bener gitu. Ya diterima aja keberagamannya. Jadi, alhamdulillah sih kayaknya anak-anak lebih bisa menerima, termasuk juga yang suka ngomong kotor-kotor, *toxic* itu biasanya selalu menghimbau bu. Saya cuma menghimbau, mengedukasi mereka dari hati ke hati. Jadi apa namanya? Ketika mereka sadar gitu ya bahwa ini harus berubah, bahwa itu gak baik buat masa depan. Saya bilang ke mereka, guru yang peduli sama kamu tuh bukan yang gak ngasih tugas. Atau tugasnya sedikit. Ngasih game di kelas itu pembodohan. Yang suka-suka ngasih game bikin kami senang itu pembodohan aja sebetulnya. Kamu tuh cuma diajarkan menghabiskan waktu aja tapi nggak ada intinya. Tapi, yang baik itu mengingatkan masa depan kamu terus. Mengingat masa depan kamu, kenapa? Ya kita mah bentar doang hidup. Nggak lama-lama gitu. Tapi kalau misalnya... Karena menurut saya pribadi, saya ngajarin mereka, remaja itu timeline-nya mesti lurus, garis waktu kehidupan itu mesti lurus. Kenapa? Karena kalau dari remaja agak bengkok, ya gak mungkin dewasanya juga lurus. Bengkok pasti remajanya. Ya bengkok-bengkok sekian persen baru lurus. Jadi nggak mungkin sama lurus dari ujung sampai ujung. Kalau kamu yakin masa depan kamu masih ada, kamu ikutin omongan saya. Tapi kalau gak yakin kamu masih mikir, silahkan. Tapi lama-lama anak-anak juga mikir juga sih, bu. Kamu punya

kesadaran. Nah itu yang kadang-kadang saya sudah gambling ya. Karena ngajarin anak-anak kayak gini, disuruh mereka sadar, kemungkinannya 10% persen dari 90%. Karena rata-rata dari mereka, mereka nggak mikir masa depan. Mereka bisa makan besok aja, sudah alhamdulillah itu. Tapi gambling itu lama-lama memunculkan harapan ya, bahwa kayaknya saya sukses menyadarkan mereka. Termasuk juga ngomong kotor. Ya walaupun tetap ada yang ngomong kotor anjing, babi, apalah, itu ada, tapi kalau gak ada gurunya. Tapi kalau mereka mulai nyadar, pelan-pelan, di antara mereka mulai ngerem. Itu itu salah, nah kalau biasa ngomong kotor, emosi itu gampang naik. Kalau gampang naik, ya nanti punya keluarga, kamu ngomong sama anak, pasti anaknya kalau diomongin, dimarahin, omongannya kotor. Nanti anaknya juga gitu lagi, gitu lagi. Itu kayak lingkaran setan, nggak bisa habis tuh. Mau dididik dua ribu kali juga nggak bisa habis. Itu kayak lingkaran setan. Kaya begitu sih, paling saya pakai hati ke hati aja. Karena saya ngajar di kelas itu 40 menit doang. 40 menit itu juga alhamdulillah, kalau nggak ada gangguan. Kalau ada gangguan, ya kagak ngajar, biasa ditinggal itu.

Lampiran 2.5. 4. Transkrip Wawancara Wali Kelas

Tanggal Wawancara : 07-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Nur Arsyi, S.Pd |
| Jabatan | Wali Kelas 9 |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Nur | : Sudah 2 tahun. Sebelumnya swasta Sekarang baru informasi Dapatnya di P3K. Sejak tahun 2022 setelah pandemi. |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Nur | : Yang paling Ya, biasa saja, standar anak-anak kan pasti persaingan ya, seperti ada bullying, mungkin yang lainnya sekalipun ke arahnya Yang tadi Tawuran seperti Konflik di luar itu gak cukup Ini sih, Kak yang penting |

di samping Bullying ya Ada lah indikasi untuk Sekalipun ikut ngekor begitu untuk tawuran dan lain-lain. Yang mungkin kayaknya konflik-konflik ini aja ke remaja pada umumnya. Karena mereka kadang-kadang memiliki teman di luar yang beda sekolah sehingga menjadi pemicu juga, pemicu buat konflik antar sekolah sehingga ingin melibatkan teman-teman sekelas mereka ya Karena mereka tahu ini anak Sekolah di sini ya tapi jadinya lebih konflik juga Pergaulan.

Peneliti : Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Yang tadi aja ya kayaknya, yang pertama tahun 2022 itu masih ada dan itu pun intensitasnya kayaknya, ada bulan-bulannya, ada momen-momen ada waktu-waktu yang mereka misalnya habis ujian atau kalau interval harinya itu biasa hari-hari hari kamis gitu kan. Kenapa pilihannya di kamis karena kan mereka, Jumat ya Jumat itu kan besok jeda libur, memang pembelajaran nggak penuh kalau hari kamis ini. Ada pengurangan jam terutama yang Pembelajaran Kurikulum Merdeka, mereka pulang cepat. Nah, pulang cepat itu kan yang mengindikasikan mereka, Kan masih harinya masih belajar, tapi begitu sudah pulang mau ke mana ini, Jadi lebih kepada pelarian aja gitu ya karena tidak ada kegiatan lain. Karena orang tua masih ada yang tahunya mereka masih sekolah, jadi merasa bebas dong.

Peneliti : Berapa jumlah kasus tawuran yang pernah terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Kalau nama saya nggak tahu pasti, tapi ada Lima lah. Lima kasus. Ada anak yang terlibat Lima anak. Kalau waktu per tahun itu. Satu sampai tiga kali aja dalam setahun. Ataupun tadi, yang hari itu, itu cumaantisipasi yang dilakukan dari sekolah. Karena biasanya, tradisinya di hari-hari itu tadi. Tapi untuk Interval dalam jangka waktu setahun kayaknya satu sampai tiga kali aja yang sampai melibatkan anak-anak.

Peneliti : Apakah terdapat perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dari tahun ke tahun?

Pak Nur : Ada. Yang pertama faktornya kenapa, ya jelas perubahannya berkurang ya. Tren-nya itu berkurang karena oknum yang tadi kita sebutkan itu,

misal dari lima anak. Semakin mereka ini, semakin mereka kelasnya tinggi atau naik kelas, pasti mereka juga sudah mulai sadar kalau sebentar lagi saya mau lulus. Misalnya posisi sekarang, yang itu waktu mereka ikut kelas 8, sekarang mereka sudah mulai berpikir, berpikir panjang gitu, mungkin berpikir bahwa ini sekadar mereka, jangan bikin masalah sudah. Tinggal lulus. Sudah sayang. Dan itu kelas 7 dan 8 sedang dalam masa pencarian jati diri. Kalau kelas 9 sudah agak, istilahnya tobat ya. Makanya siklusnya itu 3 tahunan karena pasti ada yang melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda dalam interval 1 sampai 3 tahun selama mereka di sekolah. Tahun terakhir ini yang kita khawatirkan tadi yang biasanya kelas 7 atau 8, ini alhamdulillah. Terutama yang tahun 2023 kemarin ya Alhamdulillah Sudah *Clear* begitu. Nah bisa karena kakak kelasnya gak ada yang ajakin juga. Atau Faktor juga itu Ya tapi Mungkin penanganan sekolah juga mungkin sudah, atau mungkin perhatian pemerintah juga sudah, mulai kan. Sekarang kan sudah ada spanduk-spanduk kan. Kita masuk itu, sudah ada semacam peringatan yang buat mereka melihat itu mungkin jadi berpikir. Jadi Sudah agak *clear* memang di tahun terakhir ini sebelum masuk 2024 ini.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Yang pasti melibatkan Guru BK kemudian kesiswaan dan wali kelas. penjaga keamanan pengawasan saja, misalnya mereka di mata-matai, ke mana nih yang kita curigai, mereka cuma ini saja, Informan saja. Sebatas informan tapi tidak ada kewenangan, tindakan sepenuhnya, paling tinggi itu ke Pak kurikulum. Tapi kalau Kepala sekolah karena ada ini satu, duanya itu penanganannya tadi, tapi kalau sudah ketiga kali baru itu Kepala sekolah ya karena sudah tugas dan fungsinya kan.

Peneliti : Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Tadi sudah semakin memberikan informasi-informasi mereka bahwa yang dilakukan adalah salah dan pastinya merugikan. Kemudian langkah lainnya adalah banyak motivasi di kelas mereka. Ada kewajiban Setiap pembelajaran itu terutama di jam pertama, saling berbagi motivasi dan yang lebih

konkrit lagi, kayaknya kerja sama antara Instansi terkait ya, Sekolah, Keamanan setempat, dan pihak-pihak berwajib yang lainnya.

Peneliti : Kebijakan apa saja yang dibuat oleh sekolah dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Dengan melakukan pendampingan. Sekalipun ada kasus, tetap sekolah enggak melempar. Yang terakhir saya tahu, kemarin Ini anak sudah ditahan, tapi tetap bagian kesiswaan yang bagian dari penanganannya, tetap mendampingi. Karena memang rata-rata yang anak siswa di sini alami itu, mereka ini ya tidak utama, jadi mereka ngikut begitu, jadi kita enggak. Kalau sekolah lain kan mempunyai gengnya, punya kelompoknya, punya oknumnya punya peremannya yang memang ditakuti tapi di sini kadang sekadar ini saja. Jadi kita juga lebih sering itu saja, melakukan pendampingan dan itu alhamdulillah bisa dipahami oleh pihak-pihak yang tadi.

Peneliti : Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Kalau saya Ini sangat efektif sih, karena anak itu bisa diperhatikan, mendapat perhatian karena yang kita tahu kan mereka kenapa. Kalau ditanya kenapa mereka bisa terlibat, masa mereka ya jadi kita juga paham. Mereka merasa diperhatikan. Sangat efektif. Dan saya juga kebetulan memang masuk dan tahu anak yang dimaksudkan itu, karena saya Wali kelas ini di kelas 8 saat itu. Tapi kesini semakin guru banyak yang terlibat langsung memahami dan tentunya melakukan motivasi Alhamdulillah anak itu, makanya Saya bilang tadi, mereka setelah kelas 9 kayaknya adem saja, dan merasa, mereka kan masalahnya mungkin di rumah ya, butuh perhatian kalau guru juga di sekolah merasa abai, mungkin akan semakin mereka mungkin sampai semakin lulus juga akan semakin mereka *habit* mereka. Tapi alhamdulillah sejauh ini , karena saya juga Wali kelasnya dan merasa sering dipanggil untuk pendampingan, ketika mereka di sini dipanggil oleh guru BK walaupun mereka masuk di ruang Kurikulum. Alhamdulillah jadi sudah sangat ngerasanya sudah sangat efektif.

Peneliti : Adakah faktor pendukung/pendorong implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Pak Nur : semuanya kan mengacu pada tata tertib sekolah ya, peraturan yang sudah dibuat dari mereka sudah tanda tangan disepakati yang diketahui oleh orang tua dan itu juga yang menjadi komitmen kuat kayaknya, sekalipun nggak semua dihapal, tapi sebenarnya mereka pernah ingat ya atau pernah berjanji bahwa ada aturan yang mereka harus implementasikan demi menjaga ketertiban di sekolah maupun di luar. Dan di setiap upacara juga mereka punya janji, janji siswa nah itu yang secara langsung mungkin ya, karena itu dibaca setiap hari senin sekalipun nggak sepenuhnya dipahami, tapi saya rasa itu juga cukup berpengaruh dalam memberi *warning* kepada mereka sekadar menginformasikan wah ada loh ada ya, batasan yang kalian boleh, yang kalian boleh dan tidak boleh, lakukan baik di dalam sekolah, maupun di luar sekolah.

Peneliti : Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Pak Nur : Kalau penghambatnya sejauh ini kalau yang saya pahami, kalau penghambat terkait dengan penghambatnya ya mungkin pengawasan aja jadi itu yang bikin kadang yang namanya anak kan, selalu ada cara untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali kita ya, jadi pengawasan aja kan yang mungkin tidak sepenuhnya efektif, apalagi cuma melibatkan beberapa bagian dari bidang-bidang yang ada di sekolah, anak itu kadang kita kurang ini dari kurang record begitu. karena ini biasa ini kan sudah dari mereka dari kelas SD gitu ya, kadang kita informasi kurang. kan proses penerimaan siswanya itu yang penting jatah atau tempat aja yang terpenuhi, kita tidak lagi ada kewajiban atau keharusan untuk record ini, anak gimana nih di keluarganya, masa lalunya seperti apa atau dia *broken home* atau punya masalah. Itu mungkin, informasi yang belum sepenuhnya memihak kepada sekolah, sehingga sekolah juga dalam menanganinya hanya sebatas perkara yang ada, jadi tidak bisa men-track begitu ya padahal kan kalau institusi punya kewenangan untuk mencegah, sehingga pemerintah juga memberi fasilitas untuk sekedar tahu, ya mungkin itu lama, mungkin akan lama butuh proses lama tapi kita ingat pendidikan ke depannya seperti itu jadi tidak hanya mereka diterima masuk dan sekolah, tapi tanpa kita mau tahu kondisi dan bagaimana mereka di lingkungan dan keluarganya.

Peneliti : Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?

Pak Nur : saling *support*, saling menguatkan, kalau saya orang baru kan ngerasanya gitu jadi selalu dikasih tahu kalau ini kan kita tidak tahu, karena saya dari swasta sebelumnya, jadi saya tidak terlalu terlalu banyak mengalami masalah-masalah karena di swasta itu kan pasti penanganannya cuma kepala sekolah dan sekolah saja tapi begini, di sini yang saya rasakan senior-senior yang dulu sudah nanganin anak malah sebelumnya di kelas ini wali kelasnya dia, dan dia tahu jadi salingbegini, termasuk salah satunya kalau ada dikasih melakukan yang tadi, tindakan dia sering-sering konfisi gitu, dan itu informasinya dari wali kelas sebelumnya, atau guru yang lain sekedar untuk bercengkerama, apalagi kepala sekolah bilang tanya anak, sambil anak pagi-pagi kalau ada gerak-gerik yang kita tidak biasa saja, dekatkan dia lakukan persolasi mungkin, jadi saling ini, saling saling support, apalagi di kebaikan institusi kan jadi nilai terhadap sekolah pastinya. Kalau dulu kan terkenal BK itu polisi sekolah ya sekarang BK itu ya ini aja, sudah sesuai tupoksi aja kalau dulu kan memang *image* yang dibentuk, bukan kerjanya sekarang malah, kayaknya guru BK juga adalah menangani anak nggak *share* berapa-berapa karena memang, masalah berkurang, anak-anak sudah semakin ini sehingga ya, kalau dulu kan kita jangankan guru, BK yang polisi menangani anak guru di kelas aja kadang jadi monster dalam pengertian tanda petik, kita sudah cukup takut gitu kan.

Peneliti : Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?

Pak Nur : Ada, yang melibatkan wali murid atau orang tua dan juga siswa sendiri. Sekarang kan *stakeholder*-nya sudah banyak nih bentukan-bentukan baik pemerintah maupun sekolah sendiri, seperti sekolah yang sekarang itu, sekolah Laboratorium Pancasila jadi karakter, di arahnya kan. Ada yang dari dinas langsung dan yang diberikan oleh sekolah sendiri.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Pak Nur : iya, pasti terdorong untuk lebih. Tadi karena pertimbangan sudah banyak mereka, sudah semakin dewasa kemudian berpikir, di samping sekolah juga sudah konsen dalam melakukan pendekatan kepada mereka, mereka juga secara langsung sudah mulai sadar ya harapannya seterusnya tapi memang trennya memang, mereka cukup di samping kita juga mereka kita berikan apresiasi dalam bentuk misalnya di hari-hari pembiasaan mereka kita isi panggung sikapnya tersalurkan setelahnya apa yang menjadi hobi kalau yang anak, tapi rata-rata kan yang tawuran itu kan kita kita buat olahraganya fisik dan pastinya mental spiritual terutama di jam-jam pembiasaan, di senin sampai jum'at beda-beda pembiasaannya, seperti Selasa ceria. Jadi mereka sampai tidak ada waktu, di samping juga ada ekstrakurikuler, kita tambah *eskul* menjadi pilihan mereka juga. Intinya anak ini sebenarnya butuh pelarian untuk melakukan hal positif sehingga mereka lupa terhadap hal negatif di samping mengurangi intensitas bermain dengan teman di luar sekolah mereka, kan pasti mereka akan fokus di samping tadi saran dan prasarana yang kita maksudkan sebenarnya mereka bisa lebih maksimal dalam waktu belajar baik di kelas dan di luar lingkungan sekolah.

Peneliti : Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Pak Nur : Ada, di samping ada evaluasi di rapat-rapat bulanan wali kelas dan juga pastinya, kalau evaluasi secara langsung, kalau ada kasus saja tapi kalau secara umum selalu ada *briefing* setingkat *briefing* dan rapat formal baik yang melibatkan guru secara umum, maupun wali kelas saja yang punya masalah di kelas yang ada masalah masing-masing.

Peneliti : Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Nur : Dan jadi harapan kita semua ini, tentunya kalau saya sih berharap ada korelasi ada kerja sama yang sekolah dan perangkat-perangkatnya, guru, dan keluarga ya, di rumah serta lingkungan mereka yang mungkin harus terlibat langsung dalam pengawasan secara tidak langsung kalau di rumah, mereka dengan orang tua sepertinya dengan misalnya dengan memberi informasi, kalau

ada gerak-gerik atau masalah anak dengan teman lainnya di luar sekolah yang itu mereka serilakan di pergaulan mereka mungkin itu butuh informasi dan orang tua juga tidak bingung mau ke mana mereka, jangan-jangan jadi ah memang sudah biasa itu anak saya jangan. Terus kalau di lingkungan kita juga perlu *track* kayaknya, guru, sekolah itu harus tahu, di mana anak ini tongkrongannya di mana nih, dengan siapa dia di main dan pertama pastinya sekolah yang punya intensitas pengaruh pendidikan yang lebih relevan terhadap kebaikan anak-anak baik di sekolah maupun di luar jadi kalau saya boleh ini sih kayaknya lebih memadupadankan aja, sinkronisasi antara pengawasan yang guru lakukan dengan yang anak sebagai keluarga di rumahnya dan perhatian masyarakat untuk memberikan ruang atau wada yang lebih positif lagi misalnya kan tren kan di Jakarta memperbanyak RPTRA mampu memperbanyak ruang-ruang terbuka jadi kan bagian dari cara lingkungan mereka untuk memberikan ruang positif begitu. Intinya pemerintah juga harus punya lah perhatian yang benar-benar konkrit dengan tidak hanya, misalnya kadang-kadang ini terjadi juga ini, karena mungkin mereka kehabisan uang atau tidak cukup, dengan adanya KJP, jadi gak berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif kalau semuanya tercukupi secara lahir maupun batin pasti kita berharap akan lebih baik lagi melalui kebijakan, kewenangan, dan pengawasan dari sekolah, keluarga dan masyarakat.

Lampiran 2.5. 5. Transkrip Wawancara Wali Kelas

Tanggal Wawancara : 07-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|---|
| Nama | Nuning Otikasari, S.Pd |
| Jabatan | Wali Kelas 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Bu Nuning | : Sejak tahun 2015. |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Bu Nuning | : Tapi kalau konflik kecil kayak, ya berantem lah, berantem sama anak-anak urusan cowok. Pasti sih. Ya kan? Atau urusan cewek, rebutan cewek, gitu kan. Ada aja, gitu. Atau antara kakak kelas sama adik kelas saling ngeliat-lihatan akhirnya berantem. Kayak kemarin kan baru. Misalnya baru anak perempuan kelas 9 sama kelas 7 akhirnya berantem tapi bisa diselesaikan. |
| Peneliti | : Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Bu Nuning | : Untuk tahun-tahun kemarin, ada, tapi tahun ini nggak ada. Kalau tawuran antar sekolah, biasanya kita nggak, bukan wali kelas yang menangani. Langsung wakil biasanya ya kalau udah antar sekolah. Tapi kalau konflik yang kecil-kecil itu, tiap tahun kan pasti ada aja. Terus kalau kelas lain yang ada juga kadang-kadang kita ikut bantuin. Kalau misalnya wali kelas yang nggak bisa, saya ikut bantuin. Karena kebetulan kan saya suka bantuin Wakil kesiswaan kan. Kalau dihitung banyak saya nggak ngerti berapa banyak ya. Setiap tahun ada. Satu, dua. Paling banyak ya. Paling banyak itu. Paling banyak itu tahun kemarin deh saya itu nangani. Kebetulan kelas saya anaknya badung-badung. Beneran. Itu paling banyak tuh saya tangani. Ada kali 3-4 kasus itu. Dalam satu tahun nggak setiap bulan. Cuman anaknya lagi-lagi dia. Itu aja gitu. |
| Peneliti | : Apakah terdapat perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dari tahun ke tahun? |

Bu Nuning : Fluktuasi ya. Jadi kayak kalau tahun kemarin. Mungkin karena anaknya kebanyakan di rumah kali ya. Begitu masuk. Kita masuknya cuma semester dua kalo gak salah anak kelas 9 kemarin tuh. Begitu masuk agak *euphoria* masuk begitu ya. Nah itu agak banyak tuh. Karena anak-anaknya keenakan rumah. Pokoknya banyak. Nggak kepegang lah sama guru kan cara penanganannya, cara pembentukan karakternya. Kan kalau pake *zoom* itu nggak bisa untuk membentuk karakter anak. Beda dengan kalau kita tatap muka. Kalo tatap muka mah bisa kita *press*. Tapi kalau masuk nggak bisa. Makanya fluktuasi, sebelum tahun kemarin. Nggak ada tawuran, walaupun ada gosip-gosip. Mau tawuran tapi nggak jadi. Cuma ada yang gosip aja ya. Gosip doang sebelum pandemi. Nah mulai pandemi kita agak *loss* ya karena memang juga ada orang di rumah semua. Kita nggak tau. Pokoknya kemarin itu agak banyak ya karena itu. Karena baru masuk. Iya baru masuk setelah pandemi. Sudah kelamaan di rumah, masuk. Di pertengahan mau dekat semester 2. Terus baru masuk full di semester 2. Nah itu baru ketemu anak-anak itu. Tiba-tiba mereka jadi senior, kasusnya banyak. Pemalakan lah ini lah itu. Banyak banget ya. Karena kita pakai prosedur nih. Pertama pasti penanganan pertama dari Wali kelas dulu. Mungkin kalau Wali kelas agak tidak sanggup atau bagaimana. Mungkin kita misalnya minta bantuan. Mungkin minta bantuan antar Wali kelas yang mau bantuin. Atau kalau sudah tidak sanggup baru BK turun tangan. Kalau dia naik tingkat lagi baru wakil kesiswaan yang turun tangan. Jadi kalau dibilang kuwalahan nggak. Karena banyak lah yang bisa dibantuin. Kayak anak misalnya nggak masuk-masuk aja. Diminta tolong itu banyak. Kayak Pak Naim itu kan bisa diminta tolong *home visit*. Pak saya minta tolong dong *home visit*, dia tadi berangkat. Nengokin anak ini kenapa nggak masuk. Banyak saling bantu lah kalau semua begitu.

Peneliti : Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta?

Bu Nuning : Pertama itu. Kondisi ya. Kondisional udah jatuhnya kan. Kondisional pertemuan antara guru dengan siswa jatuhnya berarti kalau pandemi berarti itu nggak ketemu langsung dengan guru. Itu faktor utamanya itu. Terus kondisi ekonomi berpengaruh. umumnya yang agak-agak nakal itu yang

ekonominya ke bawah terus orang tuanya tidak begitu peduli atau terlalu peduli. Maksudnya terlalu manja. Terlalu dimanjain. Jadi begitu anak yang melakukan kesalahan di belain. Pokoknya dibenarkan. Anak saya nggak gitu loh. Padahal anaknya di sininya udah kita kasih tahu, anaknya begini-begini-begini. Tapi kan terlalu dilindungi sama orang tua. Setiap kita panggil orang tua begini. Biasanya anaknya begini begitu. Jadi antara anak yang tidak terlalu pedulikan sama terlalu di pedulikan. Makanya emang kalau terlalu di lindungi itu nggak bagus. Biasanya kalau sudah gitu kita perang antara orang tua sama wali kelas. Cuma ada orang tuh yang agak ngotot. Agak keras nih. Biasanya kalau begitu wali kelas suka ngasih ke kesiswaan. Langsung.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Bu Nuning : Selain wali kelas, BK, terus staf dan wakil kesiswaan. Security itu keterlibatannya kalau tawurannya di lingkungan sekolah. Tapi kalau sudah di luar sekolah, nggak. Kan biasanya tawurannya nggak di sini. Waktu tawuran tahun kemarin, tawurannya di sekitar SMK 55, tawurannya ke daerah-daerah pademangan atau dekat rel kereta yang bahari-bahari itu. Jadi gak mungkin security kesana. Disana bukan anak SMK saja tapi mereka bawa. Entah mungkin mereka alumni 116, kadang-kadang suka begitu kan. Alumni bawa. Ngasih tahu nih. Yuk, kita besok apa-apa. Itu rombongan ke sana anak-anak. Karena tawurannya di situ. Jarang kalau tawurannya di sini, tawurannya di rel kereta sana yang pas di JIS itu. JIS itu ada rel kereta di situ. Biasanya ada yang nyerang, misalnya datang. Nah, anak-anak kita pas jalan ke sana, pulang. Biasanya begitu. Jadi bukan tawuran kita yang nyerang. Kalau orang bilang kita ini kayak jalur gaza. Kalau udah sore, tiap hari Jumat, itu pasti ada yang keliling. Keliling anak-anak yang mau tawuran itu yang naik motor bertiga-tiga. Keliling-keliling disini nih. Makanya kita kalau udah sore hari Jumat atau mulai sore, anak-anak yang eskul, gurunya biasanya kita nunggu di SD 09. Nungguin ngeliatin, kan? Sampai mereka baru pulang semua, udah dijemput, baru gurunya pulang. Kalau nggak begitu, ntar anaknya pas anaknya pulang, diserang. Kejadian tuh, ada rombongan anak sekolah, bawa-bawa celurit apa di sana. Jadi, anak mau pulang, ditahanlah.

Nggak boleh pulang. Ntar dulu ya. Di-check dulu, gurunya di-check. Bicara, dilihat. Udah aman, baru-baru pulang. Yang ditakutkan selalu berantem.

Peneliti : Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Bu Nuning : Kalau pencegahannya, sekolah udah ngadain kerja sama dengan lingkungan ya, dengan RT/RW di setempat, kemudian dengan sama-sama security kan. Terus dengan bimas, bimas RW sini, Sama kepolisian juga udah. Jadi kalau misalnya ada kejadian, tawuran atau apa, kita langsung telpon polisi-polisi dan gitu. Kalau sudah ada tauran, Biasanya apa sih? Panggil orang tua. Tergantung di tawurannya ya. Biasanya kalau taurannya ketangkep polisi, baru agak susah. Tapi kalau enggak ketangkep polisi, hanya ketauan guru. Yang mana tawuran? Itu biasanya panggil orang tua. Terus pencabutan KJP sementara. KJP aja ditahan sama sekolah. Kalau kita udah ngambil ke dinas, kan dia kecabut secara langsung, enggak nerima KJP lagi. Kita kan masih punya hati. Jadi penanganannya ambil KJP tahan selama beberapa bulan, baru nanti di balikkan kembali.

Ya ada skor. Terus di skor. Kalau yang kena ambil, terus di skor. Dengan beberapa tugas ya. Kalau di skor, sengaja gak kasih tugas, anak-anak itu percuma. Kalau yang ada, jangan jalan. Bahagia anak-anak kita lagi skor. Tapi biasanya skornya enggak begitu. Skornya kita itu datang, tapi tidak belajar di kelas. Jadi ke ruang khusus. Kata-kata keruang BK. Nanti ada yang nunggu kan. Tugasnya dikasih. Kalau dia taruh di rumah, yang di takutkan begitu. Akhirnya malah jalan-jalan. Orang tua nya memang mau ngawasin, pasti belum tentu.

Peneliti : Jika ada yang tertangkap Polisi, bagaimana?

Bu Nuning : Itu pernah tahun kemarin. Oh itu anak-anak saya kenal, enggak yang kemarin? Untungnya anak saya enggak. Tapi anak-anak kelas lain. Ketangkep tapi belum tawuran. Cuma dia bawa sajam (senjata tajam). Karena bawa sajam. Terus ada polisi. Udah takut duluan kan. Akhirnya dia melarikan diri. Polisi suruh berhenti, melarikan diri. Jatuh, ketangkap. Polisi kemayoran atau pademangan begitu. Diurus sama sekolah. Jadi sekolah juga yang ikut turun tangan. Sampai jam berapa itu Miss Gusti itu di kantor polisi. Sampai sore kalo gak salah. Bisa keluar sih, Orang tuanya tetap pakai bayaran, tapi tetap keluar

bisa. Kan kepolisian hanya minta sekolah mau menjamin. Jadi sekolah bilang menjamin. Binaannya ga usah di kantor polisi. Kan masih ada sekolah biar kami yang menjamin. Jadi, menjamin sekolah. Udah ribet banget itu. Udah urusannya pokoknya kalau ga duit. Kalau ga duit, tahan. Anaknya kesian, mentalnya kan. Biar bagaimana kalau tahan beda. Makanya cepet di tangani langsung.

Peneliti : Kebijakan apa saja yang dibuat oleh sekolah dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Bu Nuning : Kebijakan itu doang. Kita cuma mencoba yang terbaik ya. Kalau aturan kita ga bisa. Karena ada plang yang gede-gede. Kalau ikut tawuran, cabut KJP. Kalau kita menahan sementara.

Peneliti : Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?

Bu Nuning : Ada, hampir setiap tahun ada. Dari polisi. Kita kerja sama kepolisian. Hampir setiap tahun kepolisian datang ke sini. Himbauan tawuran, himbauan narkoba sekalian. Jadi tawuran dan narkoba itu langsung dari kepolisian Tanjung Priok.

Peneliti : Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Bu Nuning : Untuk sementara, iya. Efek sanksi dari penarikan KJP sementara. Boleh lah. Maksud saya anak-anak agak jera. Minimal orang tuanya ikut ngomel, ya kan? Karena duitnya ditahan. Kalau engga, biasanya mungkin ngambil sehari udah. Tapi kalo ini engga. Karena berasa banget kalau orang tua ga bisa ngambil duit. Karena biasanya, iya. Biasanya tawuran-tawuran begitu. Itu saat ulang tahun 116. Semua sekolah. Saya kan pernah di 282 juga, pernah tuh. Sama. Pas ulang tahun, bilangnyanya. Dia bilang karena 282, bilangnyanya february. Tanggal 28, ulang tahun 282. Gitu kan? Ngayal, ngayal cerita. Disini juga ada tuh. Disini bilangnyanya tanggal 11 Juli apa-apa. Ntar ada ulang tahunnya. Ya itu bikin di grup-grup ulang tahun itu. Yuk kita ini gini-gini begitu, ulang tahun. Emang pernah tau dari mana 116 berdiri tanggal segitu tau dari mana? Engga, ada ceritanya. Yang tau dari mulut ke mulut. Biasanya begitu. Tapi kalau tahun kemarin bisa dicegah. Karena gurunya kan langsung. Bohong, ya kan? Biasanya kalo gosip begitu tuh kita

langsung tuh. Ya kan? Anak-anak-anaknya dikumpulin di lapangan. Diomongin. Itu biasanya anak perempuan yang suka ngadu. Ya, karena grup. Bu, bu, bu. Ini loh anak-anak mau tawuran, tanggal segini. Kenapa? ulang tahun ini? Orang gila. Kita kumpulin, kumpulin. Ga ada, tapi mereka karena denger dari alumni. Dateng, hya pada dateng. Itu waktu itu di 55 juga gara-gara ulang tahun. SMK 55 apa-apa. Ulang tahunnya tawuran. Mereka pada datang ketemu tawuran. Tawuran sama siapa? Orang sekolah mana?

Peneliti : Adakah faktor pendukung/pendorong implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Bu Nuning : Pendorong utamanya pasti himbauan dari dinas. Otomatis ya. Itu pendorongnya. Terus. Kayaknya rata-rata itu deh. Selebihnya dari tahun ke tahun namanya tawuran semua juga gak ada setuju. Tapi ga ada. Pendorong utamanya itu doang kayaknya.

Peneliti : Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Bu Nuning : Ga ada. Kalo di sekolah gak ada ya. Karena hampir semua guru, semua komponen di sekolah, semua tidak setuju adanya tawuran. Jadi kalo dibilang penghambat ga ada. Ga ada penghambat. Oh penghambat utama ada Alumni. Kita tidak bisa mengikat alumni itu kan? Kalo kebijakan sekolah sih ga ada. Yang menghambat ga ada. Tapi kalo dari luar itu alumni. Kita cuman rata-rata dari luar doang. Yang agak sulit dikunci. Walaupun ada ikatan alumni 116 tapi kan anak-anak yang baru keluar itu, yang masuk SMK itu belum masuk alumni 116 doang. Jadi alumni yang ada di ikatan itu bukan anak-anak yang baru. Rata-rata yang udah tua-tua. Jauh kan? Rata-rata belum, ga dimasuk mungkin karena mungkin juga orang alumni yang merasa mereka belum penting, apa gimana jadi kan ga dimasukin ke grup. Malah yang ikut tawuran itu ya emang mereka baru lulus gitu lah. Yang biangnya itu.

Peneliti : Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?

Bu Nuning : Menerapkan, kita hampir setiap hari Senin, ada pembiasaan upacara terus itu ada himbauan. Selalu ada himbauan. Terus setiap hari Jumat itu kita ada tadarus, itu juga masukkan ke anak-anak, pada saat anak-anak di

lapangan dikasih himbauan. Itu sih biasanya. Hampir rutin lah tiap minggu pasti ada. Dan akan lebih *jeng* lagi kalo pada saat kita mendengar kabar, itu biasanya laki-laki semua di keluarin. Laki-laki doang, perempuan ga. Keluarin di lapangan duduk. Bagian kesiswaan yang langsung memberikan arahan.

Peneliti : Tapi anak perempuan ga pernah ada yang terlibat kan?

Bu Nuning : Ga ada. Kalo terlibat tangguran, ga sih. Kalo terlibat mancing-mancing mungkin kali ya. Saya bilang bikin mancing. Bulan apa ya itu anak-anak pada keliling di Kemayoran. Jadi anak ceweknya ada yang ke keliling Kemayoran. Ikut. Mereka bawa-bawa bendera 116. Itu kan namanya mancing. Iya kan? Dia konvoy. Oh, Bagi-bagi bukber. Bukber tahun kemarin. Acara tajil bersama. Pokoknya bagi tajil. Tapi, abis bagi tajil, itu mereka keliling. Bawa lah tuh bendera 116. Yang cewek-cewek ikut. Itu langsung di tangani. Semuanya di panggil. Mereka bilang kita bagi-bagi. Tapi gak begitu. Kenapa jadi muter-muter ke situ? Itu kan namanya mancing. Ada sekolah yang gak seneng aja. Atau katakan ada yang ikut. Nama kamu ngikut nebeng. Padahal bukan 116, tapi ngikut nebeng. Ngelempar dikit ke kerumunan lain. Jadi pasti berantem. Walaupun itu bukan anggota kamu padahal. Iya pasti ada yang begitu. Gitu.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Bu Nuning : Kalau yang cewek, kayaknya menghindari, ya pasti. Tapi kalau yang cowok itu, anggapannya bagaimana itu anak-anaknya? Dibilang menghindari, ya enggak juga lah. Namanya anak-anak seumuran mereka itu mereka sedang mencari jati diri, ya kan? Terus masukkan guru kan mereka cuma beberapa jam. Kalau anak yang ini positif, tidak ada. Baru keluar. Sebagai peserta, tanggapannya bagus. Kecuali anak-anak yang badung, ya? Karena mereka bertemannya lebih luas. Karena pertemanan mereka. Ya, begitu lah. Cuman kalau saya pantauanya sekarang sih, yang kelas 9 sekarang ya, yang badung itu di kelas 9F ya. Udah enggak sih. Karena anak itu udah di-press pas mau kenaikan Sudah di-press. Harusnya dia gak naik. Pokoknya ada sekitar berapa orang, 3 orang. Di-press sebelum mereka masuk ke 9. Agak jera Agak jelas, agak tertahan. Terus kalau ada anak ini nggak masuk aja, udah langsung

berbicara sama orang tua. Jadi orang tua-nya merhatiin ya. Ya, orang tua-nya udah merhatiin. Tapi kita juga udah memasang. Pak, anak ini negalkuin kesalahan sekali aja. Jangan kecil aja ya, Pak. Bapak, saya suruh di pindah di sekolah. Karena udah tangani kepala sekolah. Karena kasusnya sudah parah. Kalo misalnya kalo wali kelas kan anak itu nggak jera-jera. Paling kita pindah di kelas. Kalau kepala sekolah, lo pindah di sekolah lah. Pindah cari sekolah lain. Kalo sekarang sudah teredam. Karena istilahnya biangnya. Karena biangnya diem. Karena biangnya diem kan yang lain nggak berani macam-macam.

Peneliti : Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Bu Nuning : Evaluasi sih ada. Tapi biasanya itu di bagian kesiswaan. Karena kita penanganannya kalo ke siswa. Kalo ke siswa larinya, ke kesiswaan. Nggak semua wali kelas. Paling wali kelas hanya diberikan laporan doang. Gimana anaknya? Pemantauan gimana?

Peneliti : Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Bu Nuning : Paling kita tetap pertahanan kerja sama dengan polisi. Pertama ya. Terus penyuluhan-penyuluhan terkait dengan tawuran. Terus yang mau sedang dicoba itu, mengikat alumni. Alumni yang baru. Kayak misalnya dengan kelas 9 ini nih. Ini kan kita pantauin anak-anak yang pentolan-pentolan ya. Pada saat mereka mau keluar. Biasanya nanti akan ada pengarahan khusus. Rencananya gitu mau ada arahan khusus atau membuat semacam perjanjian. Jangan bawa adik kelas. Atau pada saat kalian keluar dari 116 tetap membawa 116 dengan baik.

Lampiran 2.5. 6. Transkrip Wawancara Wali Kelas

Tanggal Wawancara : 07-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Fatunnaim, S.Pdi |
| Jabatan | Wali Kelas 9C |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Naim | : Sudah 10 tahun mengajar di 116 |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Naim | : Kalau konflik yang terlalu susah, tidak, kalau di dalam sekolah ya, kalauya, perselisihan biasa gitu-gitu, karena bercanda awalnya kan, dan itu mudah diselesaikan bercanda, kedorong, sebagainya, itu, kalau saya enggak, mengatakan konflik yang besar karena siswa suka bercanda, beda kalau yang di luar, itu, biasanya kan ada anak-anak luar, anak sekolah lain atau umum ya, kalau rombongan remaja, naik motor keliling, kemudian ketemu sama siswa 116 yang pulang sekolah, biasanya pulang sekolah juga, kalau sendiri, berdua biasanya dipalak dulu, yang waktu sebelumnya, ini kan cerita selama saya disini kan? Tapi memang kejadian itu juga suka terjadi. Atau rombongan ke warung lagi, atau lagi nunggu mobil, kan ramai-ramai? Datanglah, karena itu tadi yang cari masalah, makanya saya selalu di agama dan staf kesiswaan, mengingatkan, mengimbau, dan melarang untuk membuat dan usaha saya adalah, kalau pulang sekolah itu saya pantau, seringnya saya pantau keliling, patroli, dan membubarkan anak-anak yang nongkrong, tidak ada alasannya, hanya main tapi kalau ngumpulnya lagi nunggu mobil ya, saya awasi, dan saya minta untuk mempercepat pulang ketika ada yang jangan nunggu-nunggu teman yang lain, itu aja kalau untuk tahun ini |
| Peneliti | : Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Pak Naim | : tahun ini, gak ada, sampai 2023 pun nggak. |

Peneliti : Apakah terdapat perbedaan intensitas atau frekuensi keterlibatan peserta didik dalam kasus tawuran di SMP Negeri 116 Jakarta dari tahun ke tahun?

Pak Naim : Penurunan, karena memang pertama kita pihak sekolah, wanti-wanti keras, jadi saya sering berpatroli, sehingga tidak ada kerumunan, kalau ada kerumunan itu biasanya itu terjadi, atau mereka bolos kemana-mana. Terus kan pemerintah pun sekarang, itu begitu tegas, contohnya memberikan, memutus KJP yang terlibat tawuran, yang terkadang dispanduk-spanduk, dan sebagainya lah sanksi, jadi lebih tegas pada para siswa yang terlibat tawuran jadi udah jarang terjadi, untuk di 116.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Naim : Yang jelas pasti kesiswaan, saya sendiri lah, saya, kemudian guru BK. Kemudian, kalau kesiswaan staf, dan wakil, guru Beka, terus pembina OSIS kemudian masyarakat, kalau di luar masyarakat, satu lagi security.

Peneliti : Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Naim : Yang pertama tadi, sering memberikan peringatan, mengingatkan atau menasihati kepada siswa ketika apel pagi terutama di hari Jumat, biasanya kan terjadi di hari Jumat karena besoknya libur, saya sendiri yang mewanti-wanti, jadi satu, memberikan peringatan atau arahan. Yang kedua, berpatroli ketika pulang sekolah, saya didampingi pembina OSIS, kesiswaan dan security, tapi kadang-kadang saya sendiri juga kalau mereka lagi sibuk jadi kesiswaan, pembina osis dan security.

Peneliti : Kebijakan apa saja yang dibuat oleh sekolah dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Naim : Ya, tadi memberikan bimbingan, penguatan terhadap agama ya, pemahaman agama kemudian, meminta bantuan orang tua siswa, melibatkan orang tua siswa, untuk membantu menginformasikan anaknya sudah pulang atau belum pada waktunya yang terindikasi, ada kemungkinan ikut tawuran. Siswa kan tidak bisa kita petakan kan iya, jadi mana yang lebih cenderung ikut-ikutan tawuran nah, itu kita hubungi baik itu wali kelas atau kesiswaan, sudah pulang

belum atau mereka melaporkan, sudah pulang jadi itu saja. Jika ketahuan ikut tawuran. Sekolah ada bertahap, tahapannya itu pertama dari berapa kali ada berapa kali dia melakukan, dari pertama tentunya peringatan dan nasihat, dua, pemanggilan orang tua dan membuat pernyataan, tiga, pemanggilan orang tua dan biasanya dapat peringatan yang lebih tegas. Nah itu kalau dari urutannya. Dan juga dari keterlibatannya, pertama, ikut-ikutan atau dia pemrakarsanya pentolan yang sanksinya sama urutan satu, dua, tiga. Kalau sanksi yang paling tinggi selama ini KJP, sesuai anjuran pemerintah, kalau yang pertama tadi kita hanya peringatan saja peringatan, teguran, dan pencabutan sementara KJP. Yang saya tahu, skor pernah ya, ada skor, penskoran tapi kalau di keluarin belum ada pengen sih ada ya.

Peneliti : Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengatasi masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Naim : Ya, kalau untuk efektif namanya perkembangan kan, semakin tegas suatu sanksi semakin bisa dia jera. Menurut saya ya, kalau selama ini ya, Alhamdulillah mereka sudah cukup jera. Tapi alangkah baiknya kalau sampai terjadi nih, suatu kapan, berulang-ulang harusnya ada sanksi dibolehkan dia di kembalikan ke orang tua, selain skor ya, alias di dikeluarkan, pindah sekolah atau bagaimana. Apalagi yang pentolannya, biangnya bahasa ini, apa ya pelopornya. Karena membuang yang satu atau menyingkirkan yang satu menyelamatkan yang 600 lebih, daripada mempertahankan satu itu akan terbawa semua dan juga tentunya, efek jera buat yang lain buat, membuat dia berpikir.

Peneliti : Adakah faktor pendukung/pendorong implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Pak Naim : Ya, kerja sama yang baik antara komponen sekolah dan masyarakat serta aparat keamanan dan juga pemerintah. Kenapa saya katakan demikian, contoh, si A menjadi pentolan, sudah berkali-kali diingatkan di sekolah masih begitu, kan harus dikeluarkan, sebaiknya gitu menurut saya untuk efek jera. Tapi, kalau sama pemerintah gak boleh ya, ya kan akhirnya, kan gak apa-apa gak dikeluarkan misalnya. Atau, sekolah ini tegas, tapi masyarakat diem saja, contoh ngeliat tauran, gak lapor atau anak nongkrong kan, awalnya tawuran itu kan nongkrong, masyarakat membiarkan. Itu berarti kan gak ada perhatian, gak

ada kerja sama. Kalau dia langsung foto, cari tahu sekolah di mana. kirim ke sekolah foto itu ya nah, ada kan, apalagi nongkrong di sekitar sini kan, masih ketahui, dekat dari sini. Itu kerja sama. Nah, orang tua juga sama ketika anaknya, belum pulang pada waktunya cepet nanya wali kelas. itu lah ya kan supaya tidak terjadi tawuran, jadi tahu karena kemana-mana. Jadi itulah, adanya kerja sama yang baik sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan.

Peneliti : Adakah faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mengatasi tawuran pelajar?

Pak Naim : Kalau untuk saat ini, itu tidak ada, tidak ada sih.

Peneliti : Bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut?

Pak Naim : Peranannya, sangat berperan penting, sangat memiliki peranan, memiliki peran yang penting dari semua *stakeholder* yang ada di sekolah ini. Jadi *stakeholder* semua bekerja sama. Punya peranan, gak bisa mengandalkan satu unsur, terjadinya sekolah yang kondusif.

Peneliti : Apakah terdapat pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada siswa untuk mencegah tawuran pelajar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?

Pak Naim : Ada, penyuluhan dengan menghadirkan pihak kepolisian sebagai narasumber dari kepolisian Tanjung Priok bahkan dari Polres Jakarta Utara. sudah kayanya itu.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Pak Naim : Iya, sangat berpengaruh. Setelah pandemi sudah hampir gak pokoknya gak ada yang seperti itu lah, sudah turun.

Peneliti : Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Pak Naim : Iya, dengan tidak adanya kasus tawuran itu, itu adalah satu tolak ukur, tidak ada, jarang ditemukan anak yang berkerumun atau nongkrong ya setelah pulang sekolah itu sudah jelas menunjukkan keberhasilan dari kebijakan.

Peneliti : Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Pak Naim : Pihak sekolah itu berupaya keras, lebih tegas lagi untuk memperhatikan para siswa seluruhnya, karena kadang-kadang gini, yang gak diduga juga bisa juga melakukan, belum tentu dia sama anak yang di sini, bisa sama teman dari luar, jadi intinya pihak sekolah lebih keras lagi untuk memperhatikan dan memantau siswa dan juga memberikan bimbingan agar tidak melakukan tawuran.

Lampiran 2.5. 7. Transkrip Wawancara Penjaga Keamanan Sekolah

Tanggal Wawancara : 05-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Suprpto |
| Jabatan | Penjaga Keamanan Sekolah |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Sudah berapa lama bekerja di sekolah ini? Pak Suprpto: Sudah dari 2015 |
| Peneliti | : Apakah masih ada kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? Pak Suprpto: Tawuran akhir-akhir ini sudah jarang bahkan bisa dibilang sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang terlibat dalam kasus tawuran. Sudah aman. |
| Peneliti | : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Pak Suprpto: Penjaga keamanan terlibat dalam membantu menangani kasus tawuran, bahkan bagian kebersihan juga ikut membantu, ada Pak Jojo dan Mang Jaja, dan Pak Yanto. |
| Peneliti | : Adakah pemantauan khusus untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar? Pak Suprpto: Ada. Kebetulan, Babinsa (Bintara Pemantauan Desa) di sini ada sering kontrol. Sering keliling. Juga pintu gerbang di sekolah ini hanya satu untuk keluar dan masuknya. CCTV alhamdulillah di sini ada. |

Lampiran 2.5. 8. Transkrip Wawancara Peserta Didik

Tanggal Wawancara : 06-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|---|
| Nama | Muhammad Fatur Rohim |
| Kelas | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Ada tawuran, bolos, merokok. Kalo pembullying sih aku jarang denger. Pembullying verbal, sama paling ribut doang sih, bertengkar lah. |
| Peneliti | : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Tahun ini, kagak, tapi tahun sebelumnya, ada. Tahun sebelumnya aku gak tahu, tapi ada lumayan banyak, ada satu atau dua kasus. |
| Peneliti | : Seberapa sering tawuran pelajar terjadi? |
| Siswa | : untuk, waku kelas 8 sih, lumayan banyak, pas kelas 8 itu bisa sampe 3 ke atas, itu biasanya di ajak sama kelas 9 biasanya. Kalo misalkan pas kelas 7 kan, pandemi, gk ada, ada, tapi kan sedikit. Untuk kelas 9, cuman, pernah kedengeran satu doang pas kelas 9. |
| Peneliti | : Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Kalau penyebab aku kurang tahu. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? |
| Siswa | : Pasti tau |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Kalo kebijakan sih aku kurang tahu, paling anak-anak OSIS tahu |
| Peneliti | : Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Aku gak tahu |

Lampiran 2.5. 9. Transkrip Wawancara Peserta Didik

Tanggal Wawancara : 06-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|---|
| Nama | Hazim Husaini |
| Kelas | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Paling ini, berantem, itu doang kayanya. |
| Peneliti | : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Terakhir kali sih kelas 9, sekali, denger doang. |
| Peneliti | : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Mis Gusti, Pak Panji, Pak Fadil, Pak Naim, terus ada Pak Djoko, Pak Fatoni. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? |
| Siswa | : Aku tahu, maksudnya, kalo misalkan aku gak tahu, aku, gak menemukan benefitnya begitu. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Tahu, ada di depan satpam itu ada tulisan akibat-akibat tawuran, di dekat pos nya, di atasnya, jika terlibat tawuran, akibatnya. |
| Peneliti | : Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Paling pemanggilan orang tua, terus, ini, pengubah jalur pikiran, kaya di, bimbingan konseling. Kalo sudah terlalu berat paling dicabut KJP, sama pengeluaran dari sekolah kali. Ada yang hampir, tapi enggak, Cuma peringatan. |

Peneliti : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?

Siswa : Kurang, kurangnya, menurutku pengawasan sama kurangnya patroli luar sekolah, walaupun ada, tapi sedikit. Biasanya juga bukan securitynya juga, sama Pak Naim doang biasanya.

Peneliti : Di sekitaran sini masih ada tawuran kah? Walaupun bukan kalian gitu?

Siswa : Masih ada, di sini, itu itu di depan situ, depan JIS

Peneliti : Tahu gak dari sekolah mana?

Siswa : Gak tahu sih. Itu kan terakhir kali, waku itu, ada tawuran di depan, anak-anak di stay dulu.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Siswa : Gak peduli, sekolah sering kasih tahu, tapi, yaudah, masuk kuping kiri keluar kuping kanan.

Peneliti : Tapi gara-gara kebijakan ini ada gak sih yang ngerasa kayak, yaudah deh aku udah gak ikutan lagi, begitu?

Siswa : Mungkin ada, tapi jarang.

Lampiran 2.5. 10. Transkrip Wawancara Peserta Didik

Tanggal Wawancara : 06-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Rasyad Rizky Saputra |
| Kelas | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Ada konflik tawuran, ada yang ketahuan ngerokok di kamar mandi, terus ada kasus pembullyan. |
| Peneliti | : Pembullyan verbal? |
| Siswa | : Iyah |
| Peneliti | : Gak ada pembullyan fisik kan? |
| Siswa | : Ada yang fisik. Sudah itu saja |
| Peneliti | : Di kelas pernah ada yang berantem gak? |
| Siswa | : Pernah |
| Peneliti | : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Dari semester 1 sudah gak ada, sudah aman. |
| Peneliti | : Waktu kelas 2 kemarin sering terjadi tawuran? |
| Siswa | : Sering banget |
| Peneliti | : Dalam satu semester kira-kira ada berapa kasus? |
| Siswa | : Seingetnya itu ada 6 |
| Peneliti | : 6 kasus dalam satu semester? |
| Siswa | : Iya, itu banyak banget dulu |
| Peneliti | : Itu karena ikut-ikutan kakak kelas atau bagaimana? |
| Siswa | : Ikut-ikutan kakak kelas begitu |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? |
| Siswa | : Tawuran itu kek, apa ya, mereka itu kek mau pamer-pamer di medsos begitu. Seinget aku begitu. |

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Siswa : Kebijakannya, ada, paling cuma disuruh, kek, setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah, kagak boleh main, gak boleh nongkrong-nongkrong gitu, dipantau sama guru begitu. Guru nya ngikutin begitu, kek mantau.

Kalau misalnya ada yang kena kasus tawuran, kaya kasus kemarin kelas 8, itu sekolah ngasih sanksi apa?

KJP dicabut, dipanggil orang tua, sama di kasih skors.

Peneliti : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?

Siswa : Efektif sih

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Siswa : Gak bakal pernah ikut-ikutan sih, soalnya jelek juga, tawuran itu, ntar nyusahin orang tua, sekolah juga gak mau tanggung jawab, paling cuma ya ini doang.

Lampiran 2.5. 11. Transkrip Wawancara Peserta Didik

Tanggal Wawancara : 06-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Rangga |
| Kelas | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Tawuran, bolos, terus, sama dasi, melanggar tata tertib, sudah sih itu doang. |
| Peneliti | : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Tahun ini, belum ada sih. Belum, soalnya sekolah ini rada-rada. Kalo dulu parah, cuma kan tahun kemarin kan juga sama. |
| Peneliti | : Gara-gara apa? |
| Siswa | : |
| | Saya gak tahu sih, saya bergaul sama yang teman-teman yang begitu, Cuma saya gak tahu, otaknya, tiba-tiba ngikut saja. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? |
| Siswa | : Mereka tahu, ya, cuma bodo amat. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Paling KJP dicabut, terus sama diskors. |
| Peneliti | : Pernah ada sosialisasi mengenai tawuran gak? |
| Siswa | : Oh, ada, pernah, kayanya tiap tahun ada deh. |
| Peneliti | : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar? |
| Siswa | : Kurang. Ya, percuma, orang-orang itu kan nakal-nakal semua. Kalo dijelasin juga, yaudah, <i>i dont care</i> . |

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Siswa : Masa bodo, iya. Tobat mungkin nanti, masa-masa remaja ya begitu, salah teman kayanya.

Lampiran 2.5. 12. Transkrip Wawancara Peserta Didik

Tanggal Wawancara : 06-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Juan Pablo |
| Kelas | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : Tawuran paling sering, sama bully. |
| Peneliti | : Seberapa sering tawuran pelajar terjadi ketika kamu kelas 8 waktu itu? |
| Siswa | : Bisa 4 atau 3 kasus. |
| Peneliti | : Kalo kelas 9, ada kasusnya gak? |
| Siswa | : Sekali kayanya |
| Peneliti | : Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : dendam sih, bisa juga ikutan kakak kelas |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? |
| Siswa | : Tau |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Siswa | : dicabut KJP nya |
| Peneliti | : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar? |
| Siswa | : Efektif, karena berkurang |
| Peneliti | : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar? |
| Siswa | : Mereka mendengarkan, masih ada yang gak dengerin juga |

Lampiran 2.5. 13. Transkrip Wawancara Peserta Didik

Tanggal Wawancara : 06-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Refandra Pancaramadan, Fiqih Adialamsyah, Tristan Revalino, dan Gilang Saktiawan |
| Kelas | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Refandra | : Tawuran, ngerokok, pembullying, berantem. |
| Peneliti | : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Tristan | : Sedikit, sudah gak ada. Tahun ini, belum sih. |
| Peneliti | : Ketika kelas 8 itu kan banyak kasus tawuran. Seberapa sering tawuran pelajar terjadi? |
| Fiqih | : Banyak. Mungkin, ada 5 kasus. |
| Peneliti | : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Refandra | : Pak Fadil, Pak Fatoni, Bu Maryam, Miss Gusti. |
| Peneliti | : Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Gilang | : Diajak, dendam, karena dendam sih. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar? |
| Refandra | : Kebacok, kematian, cacat fisik, masuk sel, gak punya masa depan. |
| Peneliti | : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Tristan | : Tahu. Pernah ada seminar dari kepolisian, dari Tanjung Priok. |
| Peneliti | : Apa saja yang dilakukan sekolah dalam menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? |

Fiqih : Dicabut KJP nya, di skors. Disita 3 bulan dulu KJP nya.

Peneliti : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?

Gilang : Efektif.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Tristan : Baik, dengerin. Gak akan ikut tawuran, karena gak mau. Gak mau meninggal juga.

Lampiran 2.5. 14. Transkrip Wawancara Peserta Didik (OSIS)

Tanggal Wawancara : 07-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|---|
| Nama | Alif Awalia Ridwan |
| Kelas/Jabatan | 8B/Ketua OSIS |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Pasti kamu pernah ngerasain pas awal masuk itu banyak banget tawuran di sini. Aku kemarin udah kelas 9. Katanya ketika mereka kelas, berarti kamu kelas 7 ya? Itu banyak banget tawuran. Masih inget gak? |
| Alif | : Ya mungkin ada yang berapa yang mengetahui, tapi saya kurang tau juga sebenarnya. Kayak mereka ngelakuin yang ngapain, kenapa. Saya kurang tau, saya cuma denger-denger doang. Iya, ada yang pengen tawuran. Saya sebenarnya gak ngikutin banget gitu-gitu. |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Alif | : Kalau untuk tawuran, saya kurang tau juga. Soalnya di sekolah ini memang sekarang udah jarang. Mungkin kenakalan-kenakalan yang lainnya doang seperti, mungkin masih ada yang banyak yang ngerokok gitu. Terus juga mungkin minum-minuman. Tapi, gak tahu juga sih, Cuma denger-denger doang. Kalau masalah tawuran, jujur saya, paling cuma kayak, denger-denger yang berantem-berantem doang. Mungkin juga ada yang nongkrong doang, siapin barang-barang, foto-foto clurit itu, senjata tajam, buat degen doang, ngumpul. Ngumpul, mungkin masih ada, tapi sama Pak Naim. Biasa kalau pulang sekolah itu, dari, waktu kelas 7. Saya ingat waktu pas saya jalan kan masih ada yang ngumpul di depan jalanan sana, terus guru-guru tuh pada muter gitu, dibubarin sih. |
| Peneliti | : Ada kenakalan apa lagi yang kamu tahu? |
| Alif | : Paling, katanya sih, yang, mungkin <i>sex-sex</i> begitu. Nggak ada lagi sih, cuman, tawuran sekarang juga udah jarang. Kalau masih ada, besar masalahnya, pasti saya juga tau. Tapi gak ada. |

Peneliti : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta?

Alif : Nggak ada, jarang juga sih. Paling berantem-berantem di sekolah ini doang.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Alif : Mungkin dari guru BK sendiri, Pak Fadil. Sama di sisni itu, guru yang paling ditakutin itu Pa Naim. Jadi semua, guru agama. Jadi semuanya itu pada nurut pas sama dia mah. Semua kasus diselesain sama dia, kasus tawuran, dia itu yang muter juga dia. Sama Satpam juga ikut, Ikut, muter, buat liat-liat gitu. Yang paling utama sih mungkin Pak Fadil sama Pa Naim sih.

Peneliti : Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Alif : Menurut saya mah, itu mah pada gaya-gayaan lah. Gaya-gayaan doang. Anak SMP mau pada cari nama kali, mau pada sok-sok ngebela nama sekolahnya tapi caranya nggak benar. Karena kan nggak usah tawuran. Itu kan tawuran itu penyebabnya kesalahannya juga sepele-sepele gitu. Sepele-sepele ya mungkin salah paham doang kayak kata-kataan. Sekolah jelek, sekolah lebih jelek. Pada bagusin nama sekolah, tapi ujung-ujungnya tawuran dengan cara kekerasan.

Peneliti : Aku kemarin dengar, bener nggak sih kalau misalnya mereka itu... Tawuran itu karena ikut-ikutan kakak kelas atau ikutan alumni gitu?

Alif : Iya sih masih diajak-ajakin. Saya kemarin waktu yang ngumpul-ngumpul juga ada alumni, eh katanya gini, eh jalan lagi dong. Masa 116 gak jalan lagi. Terus ada yang bilang juga gini katanya. Itu di ancol waktu itu, tiga orang kita juga jadi. Tapi udah jarang sih kak.

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar?

Alif : Iya, mereka udah tahu, pasti, ngelukain dirinya sendiri, juga pasti bakalan dihukum. Pasti juga sama guru BK-nya kan dapet sanksi, orang tuanya dipanggil. Harusnya sudah tahu, tapi ya tetap aja pada bandel, pada mau, pada mau bilang dirinya paling keren, paling kuat.

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Alif : Ya setau... Saya sih yang ikut tawuran gitu, biasanya kita ,guru-guru tuh pada emang garcep, terus langsung ya dipanggil-panggilin orang tuanya. Tapi pas di dalam orang tuanya, tapi saya nggak tahu ya pada ngomonginnya apa. Tapi pada dipanggil-panggilin sih kalau yang tawuran, orang tuanya. Sama Pak Naim sih kalau dulu, katanya cerita, kalau ada yang tawuran gitu kayak semua anak itu di barisin, terus disuruh makan permen karet, dibagi-bagi, diganti-gantian. Itu jaman dulu katanya. Namun sekarang katanya udah nggak boleh. Dianggap kekerasan, nanti orang tuanya pada ngelaporkan. Pak Naim sih katanya, saya mah nggak takut kalau ada orang tua yang ngelaporkan, begitu.

Peneliti : Kalau di sekolah ini ada program kayak seminar gitu gak sih? Misalnya ada dari luar, dari kepolisian, atau apa, yang ngasih tahu tentang tawuran, akibatnya.

Alif : Mungkin kemarin, kemarin sih, ada kita di *event* bulan, Eh, *event* hari guru, itu kita datengin semua profesi, ada guru. Nah, kalo gak salah sih, profesi juga bahas itu. Dan ,waktu MPLS kemarin, anak kelas 7 yang baru juga kepolisian datang, ngejelasin juga sih. Ya, dari tata tertib, apa yang harus dilakukan, polisi datang waktu itu.

Peneliti : Kepolisian Tanjung Priok ya?

Alif : Saya kurang tahu Kepolisian apa itu.

Peneliti : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?

Alif : Menurut saya udah , sudah efektif. Anak-anak juga sudah, sekarang memang, benar-benar kurang banget. Pak Naim juga udah terang-terangan ngomong kalau pagi, alhamdulillah sekarang sekolah kita juga udah nggak ada lagi yang gituan. Kalau masih ada juga langsung, tiga pin, dengan garcep. Udah nggak ada sih. Udah emang efektif banget lah dari Pak Naim nya.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Alif : Menurut saya, peserta didik itu, bukan gara-gara mereka jera. Tapi emang udah pada takut aja kayaknya sama guru-guru-nya gitu. Dapat hukumannya, tapi saya nggak tahu. Kayaknya udah pada takut. Tapi kalau nongkrong-nongkrong, masih ada. Saya ngomongin di belakang juga masih ada katanya mau-mau juga gitu. Tapi, di depannya mah, iya-iyah, begitu.

Peneliti : Tapi mereka nggak ngelakuin ya?

Alif : Enggak sih

Lampiran 2.5. 15. Transkrip Wawancara Peserta Didik (OSIS)

Tanggal Wawancara : 07-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|--|
| Nama | Aulia Nursafinah |
| Jabatan | 8D/Wakil Ketua OSIS |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik atau kenakalan remaja apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Aulia | : Ya itu, terutama tawuran, terus pacaran, kayak yang tadi <i>sex</i> , terus negrokok, minum-minum, alkohol, terus itu sih sama yang bm-bm, tahu gak? yang ngeberhentiin truck begitu, terus pergi. |
| Peneliti | : Masih ada? |
| Aulia dan Alif | : Masih |
| Peneliti | : Aku pikir udah nggak ada lagi sekarang. |
| Alif | : Malah tawuran yang kurang, kayak gitu masih ada. |
| Aulia | : Mereka ini, misalnya kan pulang cepat, kan kita biasanya hari Jumat atau hari Kamis, terus mereka tuh ngumpul gitu, ngumpul dulu, terus ke sana, mungkin ke depan. Ancol, terus berhentiin, terus mereka ke Kotu sambil bawa-bawa bendera 116, itu, parah banget |
| Alif | : Kan emang malah mancing tawuran. |
| Aulia | : Terus, sempet waktu itu kan, mereka tuh katanya bagi-bagi takjil tu, bagi-bagi takjil. |
| Alif | : oh, iya. |
| Gendis | : Itu paling kocak. |
| Aulia | : Ternyata, bagi-bagi takjil kan mereka ramean, terus bawa-bawa bendera, terus waktu itu sempet bentrok tuh sama anak yang lain, katanya, jadi tuh mereka ituin, apa sih? |
| Alif | : Perang petasan. |
| Aulia | : Perang petasan, untungnya tuh di sosmed tuh kan menyebar alhamdulillah itu nggak nyebut, gak nyebut nama 116 tapi cuma kayak remaja |

gitu, tapi nggak nyebut sekolahnya alhamdulillah disitu. Maksudnya, sudah bagus begitu bagi-bagi takjil.

Gendis : Udah gitu lawan arah bagi-bagi takjil.

Aulia : Karena itu bulan puasa loh

Peneliti : Tapi kok, aku pikir sudah nggak ada loh, nebeng-nebeng karena kayaknya nebeng itu identik sama anak-anak tahun 2000an

Aulia : Nggak, sekarang masih tapi ada kurang terlihat

Peneliti : Ada apa lagi selain itu?

Aulia : Udah sih, aku yang taunya udah nggak terlalu ngikutin

Peneliti : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta?

Aulia : Mungkin ada, tapi jarang, soalnya aku juga nggak terlalu gimana-bagaimana gitu. Jarang, gak kedengeran, mungkin mereka mainnya diem-diem.

Peneliti : Ketika kamu kelas 7 itu, seberapa sering tawuran pelajar terjadi?

Aulia : Mungkin bisa dibilang sebulan sekali atau berapa bulan sekali itu pokoknya masih kacau banget, karena masih, mungkin alumni yang kemarin itu masih ke bawa-bawa giotu, itu kacau itu, sampe sempet, temen aku itu

Gendis : Yusa?

Alif : Itu Eki

Aulia : Iyah, si Eki, dia itu kebacok ininya, itu sampe udah sekarat dia makasih kacau

Alif : Oh iya, kebacok dia.

Aulia : Iya aku ditelponin. Aku ditelponin malam-malam. Ada tuh tetangganya, tapi nggak tau ya dia, dia tuh ributnya sama siapa, pokoknya dia anak sini begitu, tapi nggak tau ributnya sama siapa, sama temen-temennya siapa. Pokoknya dia anak sini, dia ribut nggak tau dimana, Eh enggak, dia bukan ribut ternyata dia salah, magrib-magrib dia keluar, dia tuh ngelewatin gang yang sebenarnya nggak boleh dilewat sama dia karena dia punya banyak musuh di situ, begitu. Jadi dia langsung *set* begitu, dia lagi boti kalo gak salah.

Alif : Bonceng tiga

Aulia : Terus kebacok ininya (punggung), aku lihat jahitannya aku di telponin malam-malam kan sama mamanya yoga, tetangga dia juga, satu daerah, karena mungkin mamanya yoga cuma punya nomer aku kan, di situ nelponin aku, Aul ini katanya Egi kebacok, beneran nggak? iya beneran kata dia begitu. Yaudah dong aku kan bingung mau apa, aku telpon, Pak Dimas, wali kelas aku waktu kelas 7. Pak, Pak Dimas, Eki kebacok.

Peneliti : Kamu langsung telpon guru?

Aulia : Iya, aku aku bingung mau apa, temen-temen aku juga di situ nggak pada aktif, itu sekitar jam 10, aku udah merem-merem, gini kan, masih scroll tiktok sih, terus kaget kan, karena aku emang orangnya, cepet ya kalau buat balas chat, terus aku telpon-telpon , fast repon aku orangnya, nggak terlalu bagaimana-bagaimana, yaudah akhirnya angkat, terus aku telpon Pak Dimas juga kaget ya, telpon-telponan terus kayak begitu, terus aku bilang aku nggak tau gimana kondisi Eki, mungkin karena lagi di bawa ke rumah sakit. Dia sempet nggak masuk beberapa hari, seminggu begitu, terus cerita-cerita gitu kata dia, ya gue nggak boleh tidur, gue sebenarnya udah ngantuk gitu pas di bacok itu, dia ngerasa kesakitan sambil mau tidur, terus kenapa nggak tidur saja? ya kalau gue tidur gue lewat gitu.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Aulia : Ya itu, Pak Fadil, Pak Naim, Bu Nuning, Pak Fatoni, itu kayaknya mereka tuh menyatu padu begitu. Miss Gusti juga terlibat sih tapi kayak, Miss Gusti itu kayak nggak terlalu megang banget, yang megang tuh beliau-beliau

Peneliti : Pernah ada yang sampai masuk Ke polsek, Gak?

Aulia : Oh, oh ini si, si Black yang 8E

Alif : Oh iya dia, tapi dia mah antar rumah

Aulia : Eh antar rumah, tapi kan dia bawa-bawa nama 116, pokoknya waktu itu serumah gitu, ributnya disitu ya, di Warakas jauh

Alif : Bukan dari sekolah sih

Aulia : Itu apa sih, di foto gitu, terus biodatanya, keterangannya, namanya ini dari siswa SMP 116.

Peneliti : Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Aulia : Mereka itu, mungkin, bisa gaya-gayaan terus ikut-ikutan, kebanyakan kan kayak, dari temen yang ya, taulah kalau kita temenan sama yang baik kita jadi baik, kalau kita temenan sama yang buruk kita jadi buruk, pertamanan terus lingkungan juga nah, temennya itu mungkin ngajakin kayak misalkan kalau lu nggak mau ikut, lu cemen, pasti di ajak-ajak kayak gitu mungkin, makanya dia tuh nggak mau dibilang kayak gitu makanya dia ikut-ikutan, terus pengaruh lingkungan juga, mungkin lingkungannya emang terbiasa kayak begitu, dia jadi kayak menganggap hal ini itu biasa, gitu terus ini juga sih, katanya sih, aku kan emang karena suka sharing gitu, mau ngobrol-ngobrol saja, aku yang mau ngobrol gitu kan, kayak, kenapa sih pengen ikut-ikut tawuran mulu? itu melampiaskan emosi gua, kata dia gitu, kata dia masalahnya di rumah, terus dia nggak mau melampiasin itu di rumah, dia melampiasin itu ke tawuran-tawuran gitu, kata dia begitu. Walaupun, pokoknya dia bilang kayak, masalah dia tuh udah banyak, makanya dia tuh kenal dunia malam, gitu ceritanya, padahal umur mereka masih, ya Allah, tapi kan nggak tau ya mungkin masalah hidup mereka lebih berat, karena Allah itu nggak bakal ngasih ujian terlalu berat ke hambanya.

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar?

Aulia : Mereka mah, harusnya tahu itu. Kan sudah dihimbau juga kan, terus dampak-dampak tawuran apa saja, kan menyebabkan, mereka bisa melukai diri sendiri terus bisa melukai orang lain. Mereka tahu, tapi mereka bodo amat, selagi mereka ingin, ya pengen saja gitu. Tapi mungkin, sekarang sudah lumayan agak terkontrol.

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Aulia : Ya, itu, kayak, kemarin itu di hari guru kita ngundang-ngundang orang berbagai profesi dari profesi dokter , akmil, terus sama yang jaga-jaga di lapas begitu, sempat diundang, terus dikasih tahu penyebabnya begitu, tapi ya mereka tetap ya seperti itulah karena mungkin pengen ikut-ikutan.

Peneliti : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?

Aulia : Efektif, itu efektif. Tapi itu, dia itu, orang bebal begitu, udah apa ya, jadinya udah bawaan dari dia sendiri gitu pengen begitu, sudah, terlalu apa ya, kecanduan gitu buat kayak begitu. Mungkin kalo dari sekolahnya mungkin, udah enggak, tapi ya dari temen-temen dari lingkungan rumah. Karena aku juga suka ngeliatin sw, tuh temen aku, si Eki begitu. Masih ikut-ikutan tawuran, gak ada jera nya itu, masih ikut-ikutan. Kadang tuh aku tuh bingung orang-orang kayak begitu. Mereka itu, mereka lagi tawuran, terus sempet-sempetnya di videoin, ngerti gak sih? kamu tau gak sih videoin kayak, ayok maju, weh mundur, ayo. Sambil megang HP, megang senjata, maju-mundur, begitu, terus di edit, bener. Aku itu, apa ya, punya dua orang itu, nomor yang, sw-nya itu, begitu itu. Itu tuh Eki, Eki teman sekelas aku, gak mungkin dong nomornya gak aku save begitu, terus sama satu lagi, sebut gak ya namanya?

Alif : Siapa? Fiqih?

Aulia : Bukan, kelas 9A kelas, mereka itu, berantem terus, mereka itu diedit di *capcut*, tahu gak bu? terus dibikin kayak lagu sedih, terus ada captionnya juga bikin-bikin kayak, kalau misalkan keluarga yang gak gini-gini atau masalah percintaan atau masalah pertemanan dia gak mungkin bakal kayak gini. Padahal kan ya, kita bisa ngontrol gitu kan, aku aja mungkin kayak, keluarga aku gak sebaik itu, terus karena temen-temen gak terlalu gimana-gimana, terus percintaan aku yang gak gimana-gimana juga, gak ada malah, tapi tuh aku bisa ngontrol, makanya aku kadang bingung. Kebanyakan kan anak-anak kaya kita, kan kita sama ini, kita sama ini keluarganya. Aku malah bingung sama yang keluarganya lengkap tapi merasa gak ada peran orang tuanya gitu, mereka kenapa gitu? Aku mungkin juga merasakan, tapi alhamdulillah nya masih ke isi gitu sama peranan orang tua, mereka kenapa itu kadang, kenapa ya pemikiran nya beda sama kita? kayak aku kan pengennya kalau aku memang ngerasa kaya gini, aku pengennya yang lebih baik lagi, aku gak mau jadi mereka atau orang tua aku. Kok pikiran mereka beda ya? Aku gak terlalu ingin punya banyak teman karena ya tahu lah ya.

Lampiran 2.5. 16. Transkrip Wawancara Peserta Didik (OSIS)

Tanggal Wawancara : 07-02-2024

| Identitas Informan | |
|--------------------|---|
| Nama | Gendis Rizkyningtias |
| Kelas/Jabatan | 8F/Sekretaris 1 |
| Daftar Pertanyaan | |
| Peneliti | : Konflik apa saja yang masih terjadi di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Gendis | : Tawuran, mungkin, siswa di sini kalau pakai sosmed suka di luar batas gitu. Entah yang ekspos suatu hal negatif. Entah yang kayak <i>sex</i> . |
| Peneliti | : Yang kontennya 18 ke atas? |
| Gendis | : Iya, iya. kayak gitu. Kayak dia, Cuma gaya-gayaannya kayak upload-upload sajam di sosmed. Seorang, dua orang. |
| Peneliti | : Tapi bukan di sini nggak boleh bawa HP ya? |
| Gendis | : Nggak, nggak boleh. Nggak boleh, Cuma, Tapi masih ada di seludupin. Kasian soalnya yang kalau butuh tapi nggak dibolehin bawa. |
| Peneliti | : Iya, apalagi sekarang kan. Kayaknya berorientasi pada Google, lebih banyak pakai itu. Menurut aku nggak masalah sih. Cuma memang anak-anak suka |
| Gendis | : Salah pakai. |
| Peneliti | : Apakah masih terdapat kasus tawuran pelajar yang melibatkan peserta didik di SMP Negeri 116 Jakarta? |
| Gendis | : Beberapa bulan lalu ada sih. Jadi kita juga pernah beberapa kali nggak dibolehin pulang dulu. Jadi bener-bener nunggu di depan gerbang, gerbang belum dibuka. Karena di depan ada tawuran. Jadi kayak Pak Naim, Satpam, kalo dulu nge-cek dulu, Bu Nuning. Jadi kita beberapa bulan lalu. Kayaknya akhir-akhir 2023. Udah masuk. Oktober, November. |
| Peneliti | : Tapi bukan anak sini, tapi ada orang lain? |
| Gendis | : Luar, cuman kalau anak-anak sini kayaknya. Pulang, pulang sekolah. Rawannya pas pulang cepat. Pokoknya Pak Naim, kalau misalnya kita pulang cepat, kita semua dibarisin. Terus kayak pokoknya udah di himbau. Langsung pulang. Kalau mau kemana-mana izin. Tapi kalau mau mampir |

dibolehkinnya ke bestie, jualannya Pak Naim. Tapi kita semua sponsor di sini. Sponsor? Kita semua brand ambassador-nya

Peneliti : Waktu kamu kelas 7 tuh ketika masih ada tawuran. Seberapa sering tawuran pelajar terjadi?

Gendis : Pernah beberapa kali tahu. Terus paling ingat itu, waktu itu di barisin anak-anaknya di depan meja piket. Ditanya-tanya sama Bu Nuning kayak, Lu berteman sama siapa di kelas 9? Begitu, ditanya-tanya begitu

Peneliti : Oh iya, karena anak kelas 9 nya yang begitu ya.

Gendis : Kelas 9 atau kelas 8 gitu.

Peneliti : Dalam satu semester suka ada berapa kasus tuh?

Gendis : Mungkin lebih dari dua.

Peneliti : Lebih dari dua?

Gendis : Dari kelas 7 tuh masih rawan.

Peneliti : Tapi anak kelas 7 nya ada yang ikutan gak?

Gendis : Kelas 7 baru-baru... Ada sih. Yang emang dasarnya basis. Hmm, beberapa orang.

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Gendis : Pak Naim, Bu Nuning. Buat Bu Nuning itu, dia. Sekarang masuk kesiswaan juga ya? Ya, Bu Nuning. Tapi emang dari dulu juga aja itu sih suka menghimbau kita. Ya, ke Fatoni juga wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Terus, Satpam. Kalau Bu Gusti mungkin dia himbauan sih. Pak Naim. Pak Naim yang paling ngehimbau banget.

Peneliti : Apa penyebab peserta didik terlibat dalam tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Gendis : Bisa dari dia nya emang mau-mau aja ikut-ikutan. Bisa dari emang dia senang yang begitu. Mungkin ya bawaan dari luar aja kebanyakan itu dia udah mau banget. Mungkin perspektif dia tentang hal itu sama kita-kita yang ngenjauhin, beda sih. Karena kalau gak dari dalam diri kan juga gak bisa ya. Tapi udah dari dalam diri. Jadi kita udah mikirin kesitu. Pengen keren-kerenan.

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui akibat dari mengikuti aksi tawuran pelajar?

Gendis : Tau. Disini udah pernah ada yang tangannya patah. Itu kalo gak salah angkatan kita deh waktu itu. Kayaknya pas ulangan deh. Yang ban biru.

Aulia : Itu bukan yang dia karna silat?

Gendis : Nggak, kayaknya kelas satu deh.

Alif : Silat, kapan, ndis? Kagak.

Gendis : Oh, gak tahu sih. Cuman kayaknya, setau gua juga ada.

Peneliti : Ada yang pernah terluka karena tawuran?

Gendis : Pernah sih. Diva kan pernah, pernah kebacok kan, belakangnya?

Alif : Oh iyah!

Gendis : Pakai penggaris besi.

Alif : Korban salah sasaran

Gendis : Korban salah sasaran. Gak tahu anak sini atau..

Alif : Dia pengen ngebelain, terus malah kena dia nya.

Gendis : Lagi jalan pulang. Terus kayak salah sasaran kena belakangnya. Diurus sama Pak Fadil.

Peneliti : Tapi dia gak ikutan, tapi salah sasaran?

Gendis : Iyah, temenku itu.

Alif : Sekarang kan gak boleh bawa Mister.

Gendis : Iya, gak boleh bawa penggaris besi. Jadi semuanya penggaris yang butterfly gitu.

Peneliti : Apakah peserta didik mengetahui adanya kebijakan sekolah yang menangani masalah tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Gendis : Di sini, yang di tangga sini, kita kayak ada undang-undangnya gitu. Terus kayak gak tahu di nomor berapa bagian berapa. Tapi ada yang tentang tawuran gitu sih. Kayak bakal kena sanksi. Terus kalau program, mungkin kayak... Himbauan aja sih. Setiap hari, setiap Jumat. Setiap Jumat kelas pulang cepat. Kamis juga kelas 7-8 pulang cepat. Suka dihimbau juga. Setiap Senam. Senam anak cowok. Suka dihimbau itu. Setiap dua minggu sekali. Terus, setiap ada acara gitu. Kayak, hari guru kemarin. Ada yang bahas juga. Dari kayak polisi. TNI juga ada, TNI, polisi juga ada yang bahas itu. Jadi kayak kita paling, yang memang lagi ngumpul semuanya ada. Di lapangan atau kayak di satu forum. Itu juga diangkat

Peneliti : Seberapa efektif menurut kalian kebijakan yang diterapkan oleh SMP Negeri 116 Jakarta dalam menangani tawuran pelajar?

Gendis : Kalau dari situ sih efektifnya tergantung orangnya. Takut atau gak. Buat yang memang. Takutnya karena Pak Naim sih. Takutnya karena Pak Naim sih. Kayak Pak Naim, udah bener-bener ngehimbau banget. Terus kayak Pak Naim selalu tau orang-orangnya dimana-mana. Kayak Pak Naim tau. Kayak, pernah ada yang ngumpet di kotrakan atas. Terus Pak Naim tau orangnya. Kayak udah kelihatan begitu.

Alif : Jadi dibahas besoknya, gak didatengin.

Gendis : Iya, dibahas besoknya

Peneliti : Jadi, udah lewat baru dibilangin?

Gendis : Iya. nunggu ngaku dulu anaknya. Kalau kebijakannya efektif atau belum, tergantung orang-orangnya. Cuman kalau untuk keseluruhan belum. Kalau untuk yang memang udah kayak, aku udah nggak bisa itu. Ya udah, udah setuju aja. Iya, iya aja. Karena takut, reputasi dia di sekolah rusak. Padahal memang udah rusak.

Peneliti : Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah peserta didik merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Gendis : Kebijakannya, responnya sih, takut sih ya. Kayak mereka, kayak. Karena emang kalau guru yang memang serius itu, ya Pak Naim udah ngomong. Itu emang bakal beneran kayak gitu. Kalau yang emang nggak menghargai dan nggak kayak. Pokoknya nggak, itu dia nggak, apa ya. Pokonya yang nggak menghargai, sama bodo amat sama itu, bahasanya, kayak bodo amat sama hal itu. Mungkin dia bakal tetep aja. Tetep aja tapi, kayak, sembunyi-sembunyi dan kayak geraknya nggak terlalu mencolok.

Lampiran 2.6. 1. Tabel Pertanyaan Validasi

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|--|
| Tanggal: | |
| Identitas Informan | |
| Nama: | |
| Jabatan/Kelas: | |
| Daftar Pertanyaan | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? 2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? 3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? 4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? 5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? 6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? 7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? 8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? 9. Apa saja program ekstrakurikuler yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan. 10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar? 11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten? 12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan. 13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? 14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar? 15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya? | |

Lampiran 2.6. 2. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|---------------------------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Akhmad Fatoni |
| Jabatan/Kelas: | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: Kebijakan yang diterapkan termasuk tata tertib sekolah, penerapan program ekstrakurikuler dengan 18 cabang, serta kerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi tentang dampak tawuran. Selain itu, sekolah juga memiliki Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (TPPK) yang bertujuan mengurangi kekerasan dan konflik di sekolah.</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Kebijakan ini sangat efektif, terbukti dengan tidak adanya kasus tawuran sejak tahun 2023. Selain itu, kolaborasi antar sekolah dalam komunitas belajar juga membantu membangun karakter positif siswa.</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: Secara keseluruhan, kebijakan sudah optimal karena tidak ada lagi kasus tawuran. Tapi, penguatan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan dari pihak kepolisian dapat lebih ditingkatkan.</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: Faktor pendukung utama adalah kebijakan preventif melalui sosialisasi rutin dan kegiatan pembiasaan di sekolah. Dukungan dari pihak luar seperti kepolisian juga sangat membantu, terutama dalam memberikan pemahaman lebih mendalam kepada siswa tentang dampak tawuran.</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: Hambatan yang ada lebih bersifat eksternal, misalnya konflik antara orang tua siswa yang kadang terbawa ke lingkungan sekolah, pihak sekolah selalu berusaha memisahkan urusan rumah tangga dari masalah yang ada di sekolah.</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: Sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan kepolisian untuk memantau dan mencegah terjadinya konflik atau tawuran di luar</p> | |

lingkungan sekolah. Tim keamanan sekolah juga sering ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk memantau aktivitas siswa sepulang sekolah.

7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut?

Jawaban: Tidak ada langkah khusus yang diambil untuk mengontrol alumni, tetapi kerja sama dengan pihak kepolisian dan komunitas sekolah telah membantu mencegah keterlibatan alumni dalam tawuran.

8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini?

Jawaban: Layanan bimbingan konseling (BK) di sekolah bertugas membantu mencari data mengenai siswa yang bermasalah, dan bekerja sama dengan kesiswaan untuk menangani kasus secara lebih mendalam. BK juga melakukan home visit untuk siswa yang bermasalah, dan memberikan penanganan pedagogis tanpa hukuman fisik.

9. Apa saja program ekstrakurikuler yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan.

Jawaban: Program ekstrakurikuler yang efektif dalam mencegah tawuran termasuk rohis, marawis, serta olahraga seperti rube. Kegiatan ini membantu menyalurkan energi siswa ke aktivitas yang positif dan mengurangi potensi konflik.

10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar?

Jawaban: Tata tertib sekolah sangat efektif dalam membatasi perilaku negatif siswa. Misalnya, larangan membawa ponsel membantu guru untuk lebih memperhatikan perilaku siswa dan mencegah aktivitas yang berpotensi menimbulkan masalah.

11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten?

Jawaban: Langkah-langkah yang diambil termasuk pemantauan ketat oleh guru dan staf sekolah, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, serta pengawasan langsung terhadap siswa yang bermasalah melalui surat pernyataan dan tindakan preventif.

12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.

Jawaban: Kebijakan yang paling berpengaruh adalah penerapan tata tertib dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, peraturan Pergub yang mengatur pencabutan KJP bagi siswa yang terlibat tawuran juga memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan angka tawuran.

13. Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Jawaban: Evaluasi dilakukan melalui instrumen di aplikasi PMM dan Assessment National Berbasis Komputer (ANBK), yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait bullying, tawuran, dan kekerasan. Evaluasi ini mengukur kondisi lingkungan belajar dan karakter siswa.

14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Jawaban: Siswa merasa terdorong untuk menghindari tawuran karena adanya ancaman pencabutan KJP dan penegakan tata tertib sekolah. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara rutin membuat siswa lebih paham tentang konsekuensi tindakan negatif.

15. Bagaimana rencana ke depan untuk terus meningkatkan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Jawaban: Rencana ke depan termasuk memperkuat penyuluhan, lebih sering bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan memperkuat Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di sekolah.

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|---|---------------------------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Gustiana |
| Jabatan/Kelas: | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: Kebijakan yang diterapkan termasuk tata tertib sekolah, pengarahan rutin dari sekolah kepada siswa, dan program pengembangan karakter yang melibatkan 17 ekstrakurikuler wajib untuk setiap siswa. Selain itu, sekolah juga bekerja sama dengan pihak eksternal seperti kepolisian dan BIMAS untuk penanganan tawuran yang sifatnya eksternal.</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Menurut saya, kebijakan yang diterapkan cukup efektif karena adanya penurunan jumlah kasus tawuran sejak kebijakan tersebut diterapkan, terutama setelah dipasangnya spanduk peringatan di sekolah yang menyebutkan sanksi bagi siswa yang terlibat tawuran.</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: Kebijakan ini masih perlu ditingkatkan di bagian pemantauan keterlibatan alumni dalam tawuran pelajar. Selain itu, menurut saya, pengarahan yang lebih efektif terkait pengembangan karakter siswa perlu diperkuat, karena pengarahan rutin saja dianggap kurang efektif tanpa adanya kegiatan yang nyata.</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: Dukungan dari pihak kepolisian, BIMAS, serta keterlibatan orang tua dan wali kelas menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Selain itu, keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi faktor kunci yang membantu mengalihkan perhatian siswa dari hal-hal negatif.</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: keterlibatan alumni dalam tawuran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah?</p> | |

Jawaban: Sekolah bekerja sama dengan BIMAS, RW setempat, dan Polsek untuk memastikan bahwa jika ada indikasi tawuran di luar lingkungan sekolah, pihak berwenang dapat segera merespons.

7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut?

Jawaban: Saat ini belum ada upaya khusus yang disebutkan untuk mengontrol alumni yang terlibat dalam tawuran, namun pihak sekolah terus berupaya berkoordinasi dengan pihak luar seperti kepolisian untuk menangani masalah ini.

8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini?

Jawaban: Layanan bimbingan konseling berperan penting dalam menangani siswa yang terlibat tawuran. Siswa yang terlibat akan diarahkan melalui BK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

9. Apa saja program ekstrakurikuler yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan.

Jawaban: Keterlibatan siswa dalam berbagai program ekstrakurikuler, termasuk yang paling diminati seperti Paskibra, dianggap sangat efektif dalam mencegah tawuran. Program-program ini membantu siswa menyalurkan energi mereka ke hal-hal yang lebih positif dan berprestasi.

10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar?

Jawaban: Tata tertib sekolah dianggap berperan besar dalam mencegah tawuran karena berisi aturan yang jelas tentang konsekuensi dari pelanggaran, termasuk sanksi seperti pemanggilan orang tua dan penangguhan KJP jika siswa terlibat tawuran.

11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten?

Jawaban: Sekolah melibatkan seluruh elemen guru dan staf untuk bersama-sama memantau serta mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. Setiap indikasi tawuran segera direspons dengan tindakan yang cepat.

12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.

Jawaban: Kebijakan yang paling berpengaruh adalah pengembangan karakter melalui ekstrakurikuler dan tata tertib sekolah, di mana siswa diajarkan untuk memiliki karakter yang baik sehingga menjauhi perilaku tawuran tanpa harus selalu diarahkan.

13. Apakah terdapat evaluasi atau pemantauan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar?

Jawaban: Sekolah melakukan pemantauan melalui tim Laboratorium Sekolah Pancasila untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil dalam membentuk karakter siswa.

14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Jawaban: Siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka melalui kebijakan yang diterapkan dan merasa terdorong untuk menghindari tawuran karena adanya sanksi yang jelas.

Lampiran 2.6. 4. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|---|------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Gilang Saktiawan |
| Jabatan/Kelas: | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: membuat peraturan baru untuk melarang tawuran</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: sangat efektif</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: efektif yaa, tapi mungkin perlu disesuaikan seperti membuat aturan baru</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: mengikuti eskull, melakukan aktivitas yang positive disekolah maupun diluar sekolahan dan melakukan pensitaan kjp selama 3bulan</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban:</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: sudah baik</p> <p>7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? Jawaban:</p> <p>8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban:</p> <p>9. Apa saja program ekstrakurikuler atau program lain yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan. Jawaban:</p> <p>10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar? Jawaban: sangat baik</p> <p>11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten? Jawaban:</p> | |

12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.
Jawaban: memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan tawuran tersebut.
13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
Jawaban:
14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?
Jawaban: yaah sangat membantu untuk mencegah terjadinya konflik negatif
15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya?
Jawaban:

Lampiran 2.6. 5. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|---|----------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Rangga |
| Jabatan/Kelas: | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: memperketat peraturan sekolah, dan apa bila yang terkena dalam kasus tauran bisa kena sangsi yaitu kjp di cabut atau di DO</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: sangat efektif adanya kebijakan baru tentang sangsi tauran antar pelajar</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: udah optimal, sangat membantu karna ada nya kebijakan yang makin banyak, dan peraturan sekolah yang makin ketat</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: mengikuti eskull, melakukan aktivitas yang positive disekolah maupun diluar sekolah dan melakukan pensitaan kjp selama 3bulan</p> <p>6. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: orang yang mengajak teman nya untuk tauran</p> <p>7. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: masalah pengawasan di luar sekolah cukup kurang, perlu bantuan orang yang berada di luar untuk menjadi mata elang sekolah</p> <p>8. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? Jawaban: jika ada alumni yang berurusan bisa kena sangsi juga bisa dengan panggilan orang tua</p> <p>9. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: berbicara kepada teman tentang kerugian setiap mengikuti tauran</p> <p>10. Apa saja program ekstrakurikuler atau program lain yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan. Jawaban: kebijakan tentang adanya kjp akan di cabut</p> <p>11. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar?</p> | |

Jawaban: cukup mengesankan

12. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten?

Jawaban: adanya mata elang di sekolah cukup memastikan itu udah dilaksanakan dengan baik

13. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.

Jawaban: kebijakan tentang ada pencabutan kjp, dan men DO setiap pelajar yang mengikuti tauran. Adanya kebijakan ini setiap orang tua pasti tidak mau anak nya di DO dan di cabut kjp, maka setiap orang tau pasti selalu memerhatikan anak nya.

14. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Jawaban:

15. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Jawaban: yaah sangat membantu untuk mecegah terjadi nya konflik negatif

16. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya?

Jawaban:

Lampiran 2.6. 6. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|--------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Alif Awalia Ridwan |
| Jabatan/Kelas: | Ketua OSIS |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: dari pihak sekolah setiap apel pagi selalu di peringatkan untuk tidak melakukan aksi aksi tawuran setelah pulang sekolah, sekolah juga telah memberi tahu beberapa konsekuensinya seperti akan di panggil ke BK bersama dengan orang tuanya, dan menandatangani perjanjian yang telah di buat</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: cukup efektif,karena dengan kebijakan/peringatan yang di buat itu sudah membuat takut siswa/i</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: sedikit belum, kalau bisa harus lebih sering lagi mengedukasi dan memperingati dan sanksinya lebih keras lagi</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: peran guru yang selalu mengedukasi kita dan memperingati kita tentang tawuran</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: kurangnya kesadaran dari siswa/I nya masing masing</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: pihak sekolah hanya mengawasi siswa/I nya sampai perjalanan pulang sekolah saja, biasanya satpam akan keliling daerah sekitar jalanan sekolah memastikan bahwa tidak ada anak" yg nongkrong, tapi jika sudah ada di rumah, itu bukan tanggung jawab sekolah lagi</p> <p>7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? Jawaban: tidak tahu, jika mereka sudah alumni, mereka sudah tidak membawa nama smp kami lagi, jadi bukan tanggung jawab sekolah</p> <p>8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini?</p> | |

Jawaban: sangat membantu dalam mengedukasi kami tentang dampak" tawuran, sehingga kami menjadi takut

9. Apa saja program ekstrakurikuler atau program lain yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan.

Jawaban:

10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar?

Jawaban: sudah cukup bagus, allhamdulillah para siswa nya juga patuh terhadap tata tertib tersebut

11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten?

Jawaban: selalu melakukan pengawasan hingga di luar sekolah, seperti keliling saat pulang sekolah untuk memastikan tidak ada yang tawuran

12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.

Jawaban: dikeluarkan dari sekolah dan jika di tangkap polisi sekolah tidak mau mengurusnya.

13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?

Jawaban: tentang selalu ada sanksi di setiap yang kita perbuat, mengedukasi kami di kelas tentang bahaya tawuran

14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?

Jawaban: sangat membantu, sekarang smkn 116 sudah jarang mengikuti tawuran, karna kebijakannya yg sangat keras dan banyak, seperti di dikeluarkan dari sekolah, mendapatkan hukuman, di skors

15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya?

Jawaban: ada, dengan tidak mengikuti perbuatan teman yang salah

Lampiran 2.6. 7. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|----------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Muhammad Fatur Rohim |
| Jabatan/Kelas: | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: dari pihak sekolah setiap apel pagi selalu di peringatkan untuk tidak melakukan aksi aksi tawuran setelah pulang sekolah, sekolah juga telah memberi tahu beberapa konsekuensinya seperti akan di panggil ke BK bersama dengan orang tuanya, dan menandatangani perjanjian yang telah di buat</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Kebijakan tersebut efektif, karna angka tawuran pelajar di lingkungan sekolah jadi berkurang</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: kebijakan sekolah sudah berhasil mengurangi angka tawuran</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: wali kelas yang memperhatikan anak mereka</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: Ketidakikutsertaan siswa dalam kebijakan kebijakan yg sekolah berikan</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: pihak sekolah hanya mengawasi siswa/I nya sampai perjalanan pulang sekolah saja, biasanya satpam akan keliling daerah sekitar jalanan sekolah memastikan bahwa tidak ada anak" yg nongkrong, tapi jika sudah ada di rumah, itu bukan tanggung jawab sekolah lagi</p> <p>7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? Jawaban: Biasanya jika alumni terlibat aksi tawuran, maka alumni itu akan di datengin ke sekolahan yg sekarang</p> <p>8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Cukup baik mereka terbuka pada anak" Yg ingin bercerita</p> | |

9. Apa saja program ekstrakurikuler atau program lain yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan.
Jawaban:
10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar?
Jawaban: udah cukup bagus, allhamdulillah para siswa nya juga patuh terhadap tata tertib tersebut
11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten?
Jawaban: Pihak sekolah terus mengawasi perkembangan siswa nya
12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.
Jawaban: dikeluarkan dari sekolah dan jika di tangkap polisi sekolah tidak mau mengurusnya.
13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
Jawaban: Guru ips sering menceritakan tentang konsep kekeluargaan antar bangsa dan negara
14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?
Jawaban: sangat membantu, sekarang smpn 116 sudah jarang mengikuti tawuran, karna kebijakannya yg sangat keras dan banyak, seperti di keluarkan dari sekolah, mendapatkan hukuman, di skors
15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya?
Jawaban: ada, dengan tidak mengikuti perbuatan temen yang salah

Lampiran 2.6. 8. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|--|------------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Hazim Husaini Mansiang |
| Jabatan/Kelas: | 9F |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: Bekerja sama dengan petugas keamanan di dekat sana</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Sangat efektif karena telah mengurangi tawuran antar sekolah</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: Menurut saya sih sekolah harus lebih memperhatikan perilaku anak murid apalagi di luar sekolah</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: Bekerja sama dengan pihak setempat</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: Ketidakikutsertaan siswa dalam kebijakan kebijakan yg sekolah berikan</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: Bagus karena satpam nya mengawasi kita</p> <p>7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? Jawaban: Alumni sekolah saya ada yang berada di polri dan mereka sudah bekerja sama untuk mengatasi itu</p> <p>8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Ya pertama dinasehati trus kalo gutu lagi bisa kena sanksi do atau skorsing</p> <p>9. Apa saja program ekstrakurikuler atau program lain yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan. Jawaban:</p> <p>10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar? Jawaban: Bagus banget apalagi udah bekerja sama dengan polri jakarta pusat</p> | |

11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten?
Jawaban: dengan benar benar menerapkannya apalagi kadang kadang ada guru yang sengaja berpatroli untuk mengecek
12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.
Jawaban: Do mutlak pastinya sangat membuat mereka takut tapi beberapa anak tidak peduli karena mereka kira itu tidak serius padahal kan asli.
13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
Jawaban: Ips mengajarkan kita untuk bersosialisasi dengan sehat, Berusaha mempelajari karakter anak anak
14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?
Jawaban: Ya karena ada beberapa sanksi mutlak sekolah yang sangat mengurangi hal tersebut contohnya; do dan pemanggilan wali murid
15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya?
Jawaban: ada, Yang pasti tentang hukum negara ya.tentang kekerasan pelajar dibawah umur

Lampiran 2.6. 9. Validasi Data Narasumber

| TABEL PERTANYAAN VALIDASI DATA PERAN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENGURANGI TAWURAN PELAJAR DI SMP NEGERI 116 JAKARTA | |
|---|-----------------------|
| Tanggal: | 26 – 07 - 2024 |
| Identitas Informan | |
| Nama: | Gendis Rizky Ningtias |
| Jabatan/Kelas: | Sekretaris OSIS |
| Daftar Pertanyaan | |
| <p>1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan di SMP Negeri 116 Jakarta untuk mencegah dan mengatasi tawuran pelajar? Jawaban: Pembinaan setiap apel maupun dikelas</p> <p>2. Seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: Sangat efektif karena telah mengurangi tawuran antar sekolah</p> <p>3. Apakah kebijakan sekolah yang ada sudah optimal dalam mencegah tawuran pelajar? Jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki? Jawaban: sudah</p> <p>4. Apa saja faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: sanksi yang berlaku</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan sekolah dalam mengurangi tawuran pelajar? Jawaban: kurangnya kesadaran para oknum</p> <p>6. Bagaimana sekolah mengatasi keterbatasan pengawasan terhadap peserta didik di luar lingkungan sekolah? Jawaban: Cukup baik, salah satu tindakannya yaitu guru dan satpam berpatroli ketika jam pulang</p> <p>7. Apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk mengontrol alumni yang mungkin terlibat dalam aksi tawuran? Jika ada, apa saja upaya tersebut? Jawaban: Sekolah tidak terlalu mengurus hal tersebut. Sekolah fokus ke anak yang masih menjadi siswa 116.</p> <p>8. Bagaimana Anda menilai efektivitas layanan dan bimbingan konseling dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di sekolah ini? Jawaban: sangat membantu</p> <p>9. Apa saja program ekstrakurikuler atau program lain yang dianggap efektif dalam mencegah tawuran pelajar? Tolong sebutkan dan jelaskan. Jawaban:</p> <p>10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peran tata tertib sekolah dalam mengurangi kasus tawuran pelajar? Jawaban: sudah cukup baik</p> <p>11. Apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara konsisten? Jawaban: dengan bergerak langsung</p> | |

12. Menurut Anda, kebijakan mana yang paling berpengaruh dalam menurunkan angka tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta? Tolong jelaskan.
Jawaban: Pembinaan, dan konsekuensi yang berlaku.
13. Menurut Anda, bagaimana peran guru IPS dalam membantu mengurangi tawuran pelajar di SMP Negeri 116 Jakarta?
Jawaban: Kurang membantu secara langsung melainkan lewat pelajaran, karena yang mengurus hal tersebut adalah bidang kesiswaan
14. Bagaimana respons peserta didik terhadap kebijakan sekolah yang diterapkan? Apakah mereka merasa terdorong untuk menghindari tawuran pelajar?
Jawaban: Ya, karna adanya sanksi yang benar benar berjalan tidak hanya ancaman semata
15. Apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran IPS turut membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menghindari tawuran pelajar? Jika ya, bagaimana caranya?
Jawaban: untuk saat ini sepertinya tidak ada

LAMPIRAN III

Dokumentasi

Lampiran 3.1. Tata Tertib SMP Negeri 116 Jakarta

I. Ketentuan Umum :

Pelajar SMP Negeri 116 Jakarta

1. Berkewajiban untuk melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Wajib menaati dan patuh terhadap peraturan Tata Tertib Sekolah.
3. Memiliki sikap santun, menghormati guru, orang tua dan sesama pelajar.
4. Berpakaian rapi dan bersih sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku.
5. Bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nama baik sekolah.
6. Menjauhkan diri dari hal – hal perbuatan negatif (narkotika, perkelahian, pornografi, perundungan, pencurian dan sejenisnya).

II. Ketentuan Khusus

Pelajar SMP Negeri 116 Jakarta

1. Pakaian Seragam Sekolah

b. Pakaian seragam SMP 116 Jakarta ditetapkan sebagai berikut :

- **Senin**
 - Siswa Putri: Baju putih, rok biru, sepatu hitam, beserta kelengkapannya yaitu kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, dasi dan topi SMP Negeri 116, serta jilbab sesuai ketentuan (bagi siswi berjilbab)
 - Siswa Putra: Baju putih, celana biru, sepatu hitam beserta kelengkapannya yaitu kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, dasi dan topi SMP Negeri 116.
- **Selasa**
 - Siswa Putri: Baju batik khas sekolah, rok biru rempel, sepatu hitam, beserta kelengkapannya yaitu kaos kaki putih dan ikat

pinggang hitam SMP Negeri 116, serta jilbab putih polos (bagi siswi berjilbab)

- Siswa Putra: Baju batik khas sekolah, celana biru, sepatu hitam, beserta kelengkapannya yaitu kaos kaki putih, ikat pinggang hitam SMP Negeri 116.
- Rabu
 - Siswa Putri: Baju pramuka penggalang, rok pramuka warna coklat, kaos kaki pramuka, sepatu hitam, ikat pinggang pramuka SMP Negeri 116 dan atribut pramuka lengkap dengan kaku ring pramuka, serta jilbab coklat tua polos (bagi siswi berjilbab)
 - Siswa Putra: Baju pramuka penggalang, celana panjang pramuka, kaos kaki pramuka, sepatu hitam, ikat pinggang pramuka SMP Negeri 116, dan atribut pramuka lengkap dengan kaku dan ring pramuka.
- Kamis
 - Siswa Putri: Baju putih rok biru, sepatu hitam, beserta kelengkapannya yaitu kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, dasi dan topi SMP Negeri 116, serta jilbab biru polos (bagi siswi berjilbab)
 - Siswa Putra: Baju putih, celana biru, sepatu hitam, beserta kelengkapannya yaitu kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, dasi dan topi SMP Negeri 116.
- Jumat
 - Siswa Putri: Busana kedaerahan warna abu - abu, rok biru rempel, sepatu hitam, berjilbab putih (bagi yang berjilbab) dan kelengkapannya yaitu kaos kaki putih dan ikat pinggang hitam SMP Negeri 116.
 - Siswa Putra: Busana sadariah warna abu – abu, celana biru, sepatu hitam dan kelengkapannya yaitu kaos kaki putih dan ikat pinggang hitam SMP Negeri 116.

- Pada saat pelajaran PJOK dan senam menggunakan seragam olahraga SMP Negeri 116 dan hanya dipakai pada saat jam olahraga.
- Ketentuan seragam pada saat kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga, menggunakan pakaian yang pantas dan sopan.
 - a) Menggunakan pakaian seragam sekolah yang bersih, rapi dan lengkap atributnya.
 - b) Memakai singlet putih untuk siswa laki – laki dan untuk putri memakai kaos dalam warna putih.
 - c) Kemeja dimasukkan ke dalam celana atau rok dan memakai ikat pinggang warna hitam kecuali seragam hari Jumat.
 - d) Peserta didik wajib menggunakan seragam sesuai aturan selama berada di area sekolah.

2. Kehadiran Peserta Didik

- a) Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan.
- b) Peserta didik wajib hadir di sekolah mengikuti proses belajar mengajar dari hari Senin sampai dengan Jumat.
- c) Peserta didik hadir 15 menit sebelum bel masuk di bunyikan.
- d) Peserta didik yang terlambat kurang dari 10 menit, wajib lapor ke guru piket dan diperkenankan masuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung dengan catatan akan mendapat pembinaan setelah pulang sekolah sesuai waktu keterlambatannya. Jika keterlambatan terulang sampai 3 (tiga) kali akan dilakukan pemanggilan orang tua.
- e) Apabila peserta didik tidak hadir di sekolah tanpa surat keterangan, maka hari pertama masuk sekolah wajib membawa surat keterangan yang sah antara lain :
 - a. Surat keterangan orang tua / wali karena sakit atau halangan lainnya.

- b. Surat keterangan dari dokter karena sakit lebih dari 2 hari.
 - f) Selama proses belajar mengajar berlangsung :
 - a. Peserta didik wajib mengikuti semua pelajaran dengan tenang dan tertib (minimal 90 % tatap muka setiap mata pelajaran setiap semester)
 - b. Peserta didik wajib melaksanakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - g) Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar, baik yang dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas.
 - h) Peserta didik yang dikarenakan sesuatu hal tidak dapat melanjutkan proses belajar, wajib memberitahukan/ijin kepada guru pengajar/piket dan penanggung jawab kegiatan
 - i) Peserta didik yang ijin pada jam pelajaran karena sesuatu yang sudah direncanakan, harus membawa surat dari orang tua.
 - j) Peserta didik yang dijemput sebelum usai pelajaran maka penjemput wajib melapor kepada guru piket dengan menyerahkan surat orang tua/wali peserta didik.
 - k) Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa dilarang menerima tamu kecuali menyangkut hal yang penting.
 - l) Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa dilarang menerima telepon/menghubungi orang tua, keperluan penting bisa melalui wali kelas.
 - m) Jika guru berhalangan pada waktu kegiatan belajar mengajar siswa tetap harus berada di dalam kelas mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru yang menggantikan.
3. Kerapian Diri Peserta Didik
- a) Peserta didik putri wajib mengikat rambut yang panjangnya melebihi bahu.

- b) Peserta didik putra wajib memotong rambut dengan model 3 – 2 – 1 (bagian depan tidak menutupi alis, bagian samping tidak menutupi telinga, dan bagian belakang tidak melewati kerah)
4. Kegiatan Pembiasaan Peserta Didik
- a) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembiasaan yang sudah dijadwalkan oleh sekolah sebagai berikut :
- Senin: Upacara Bendera
 - Selasa: Selasa ceria (Pengembangan Kreativitas)
 - Rabu: Pramuka, Literasi, Numerasi
 - Kamis: Senam bugar / kebersihan kelas
 - Juma : Tadarus, (Siswa Muslim) dan Kebaktian (Siswa Kristiani)
- b) Peserta didik wajib mengikuti Sholat Jumat berjamaah di masjid sekolah bagi siswa muslim setiap hari Jumat. (Sesuai jadwal)
- c) Mengikuti dengan aktif kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan ekstrakurikuler pilihan maksimal tiga, yang diselenggarakan oleh sekolah.
5. Larangan – Larangan
- a) Peserta didik dilarang memakai celana pensil, rok di atas mata kaki, baju dilipat, dan ketat.
- b) Peserta didik tidak diperbolehkan memakai jaket di area sekolah.
- c) Peserta didik tidak diperkenankan mewarnai rambut.
- d) Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan perhiasan / aksesoris yang berlebihan
- e) Peserta didik dilarang memanjangkan dan mewarnai kuku.
- f) Peserta didik dilarang memakai *make – up*
- g) Peserta didik putra dilarang memakai anting
- h) Peserta didik dilarang bertato

- i) Peserta didik dilarang keluar masuk lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket.
- j) Peserta didik dilarang menerima tamu pada jam – jam belajar tanpa izin guru piket.
- k) Peserta didik dilarang makan/minum di dalam kelas selama pelajaran berlangsung dan makan / minum di kantin ketika jam pelajaran berlangsung kecuali setelah olahraga dan masih menggunakan seragam olahraga.
- l) Peserta didik dilarang menyimpan, membawa, menggunakan dan mengedarkan rokok, minuman keras, dan obat terlarang (narkoba).
- m) Peserta didik dilarang menyimpan dan membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak atau benda – benda yang sejenis.
- n) Peserta didik dilarang menyimpan dan membawa benda – benda dalam bentuk yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan pembelajaran.
- o) Peserta didik dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah.
- p) Peserta didik dilarang melakukan perundungan, intoleransi, dan pelecehan sesama siswa atau pihak lain.
- q) Peserta didik dilarang melakukan tindakan pemerasan terhadap sesama siswa atau pihak lain.
- r) Peserta didik dilarang mempengaruhi (memprovokasi) sesama peserta didik atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan perkelahian.
- s) Peserta didik dilarang melakukan tindakan perjudian dan sejenisnya.
- t) Peserta didik dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik.

- u) Peserta didik dilarang membuat, membawa, membaca, memperlihatkan, dan menyebarkan buku, bahan bacaan gambar atau video yang mengandung unsur pornographi, porno aksi, dan kekerasan.
 - v) Peserta didik dilarang mengucapkan perkataan tidak pantas dan tidak sopan seperti mengumpat, menghardik, menghina, mengejek dan sejenisnya.
 - w) Peserta didik dilarang menggunakan toilet yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - x) Peserta didik dilarang melakukan tindakan asusila (berpacaran, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan sejenisnya)
 - y) Peserta didik dilarang membawa dan menggunakan HP di sekolah
1. Aturan Penggunaan *Handphone* di Sekolah
 - a) Peserta didik tidak diperbolehkan membawa, menggunakan HP untuk pembelajaran diketahui oleh wali kelas dan bidang kesiswaan.
 - b) Selama tidak dipergunakan dalam pembelajaran, HP dikumpulkan di guru mata pelajaran yang menugaskan.
 2. Perhitungan Poin Pelanggaran

Tabel 4. 7. *Tabel Poin Pelanggaran*

| NO | JENIS PELANGGARAN | POIN |
|----|--|------|
| 1 | Seragam | 5 |
| 2 | Kehadiran | 5 |
| 3 | Kerapian | 5 |
| 4 | Pembiasaan | 5 |
| 5 | Larangan : | 5 |
| 6 | Memakai celana pensil, rok diatas mata kaki, baju dilipat, dan ketat | 5 |
| 7 | Mewarnai jaket di area sekolah | 5 |
| 8 | Mewarnai rambut | 5 |
| 9 | Menggunakan perhiasan /aksesoris yang berlebihan | 5 |
| 10 | Memanjangkan dan mewarnai kuku | 5 |

| | | |
|----|--|----|
| 11 | Memakai <i>make - up</i> | 5 |
| 12 | Peserta didik putra memakai anting | 5 |
| 13 | Bertato | 10 |
| 14 | Keluar masuk lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket | 10 |
| 15 | Menerima tamu pada jam - jam belajar tanpa izin guru piket | 10 |
| 16 | Makan / Minum di dalam kelas selama pelajaran berlangsung atau makan / minum di kantin bukan pada saat jam olah raga atau tidak menggunakan seragam olahraga | 10 |
| 17 | Menyimpan, membawa, menggunakan dan mengedarkan rokok, minuman keras, dan obat terlarang (narkoba) | 50 |
| 18 | Menyimpan dan membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak atau benda - benda lain yang sejenis | 50 |
| 19 | Menyimpan dan membawa benda - benda dalam bentuk apapun yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan pembelajaran | 10 |
| 20 | Mengendarai kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah | 20 |
| 21 | Melakukan perundungan, intoleransi, dan pelecehan sesama siswa atau pihak lain | 50 |
| 22 | Melakukan tindakan pemerasan terhadap sesama siswa tau pihak lain | 50 |
| 23 | Mempengaruhi (Memprovokasi) sesama peserta didik atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan perkelahian | 50 |
| 24 | Melakukan tindakan perjudian dan sejenisnya | 50 |
| 25 | Mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik | 50 |
| 26 | Membuat, membawa, membaca, memperlihatkan dan menyebarkan buku, bahan bacaan, gambar atau video yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi dan kekerasan | 50 |
| 27 | Mengucapkan perkataan tidak pantas dan tidak sopan seperti mengumpat, menghardik, menghina, mengejek dan sejenisnya | 20 |
| 28 | Menggunakan toilet yang tidak sesuai dengan peruntukannya | 20 |
| 29 | Melakukan tindakan asusila (berpacaran tangan, berpelukan, berciuman dan sejenisnya | 50 |
| 30 | Menyalahgunakan HP di sekolah | 20 |

3. Pembinaan Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

- Pembinaan I : Poin mencapai 5 – 10, teguran lisan 1
- Pembinaan II : Poin mencapai 15 – 30 pembinaan tertulis
- Pembinaan III : Poin mencapai 35 -50 pembinaan tertulis dan pemanggilan orang tua

- Pembinaan IV : Poin mencapai > 50 pembinaan tertulis, pemanggilan orang tua atau pengembalian siswa ke orang tua.



Dokumentasi 4 Ruang Wakil Kepala Sekolah Kurikulum



Dokumentasi 7 Ruang BK



Dokumentasi 5 Lantai 2 Sekolah



Dokumentasi 8 Koridor Sekolah Lantai 2



Dokumentasi 6 Spanduk Sanksi Tawuran



Dokumentasi 9 Taman dan Gazebo Sekolah



Dokumentasi 11 Pintu Masuk Sekolah



Dokumentasi 12 Pos Penjaga Keamanan



Dokumentasi 10 Jalan menuju Sekolah



Dokumentasi 13 Pintu Masuk Sekolah



Dokumentasi 14 Gerbang Sekolah



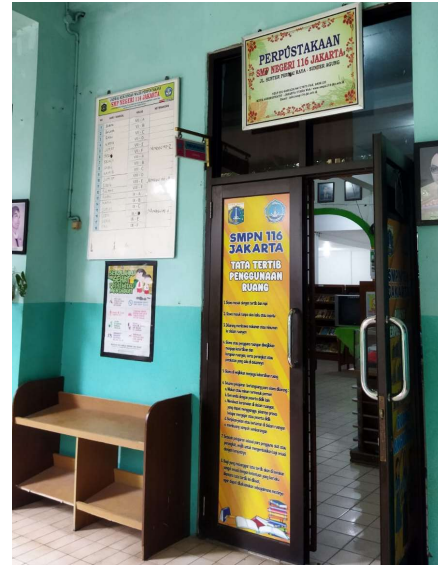
Dokumentasi 15 Westafel dalam Toilet Putri



Dokumentasi 16 Koridor Sekolah



Dokumentasi 17 UKS



Dokumentasi 18 Perpustakaan



Dokumentasi 19 Kantin



Dokumentasi 21 Tempat Parkir



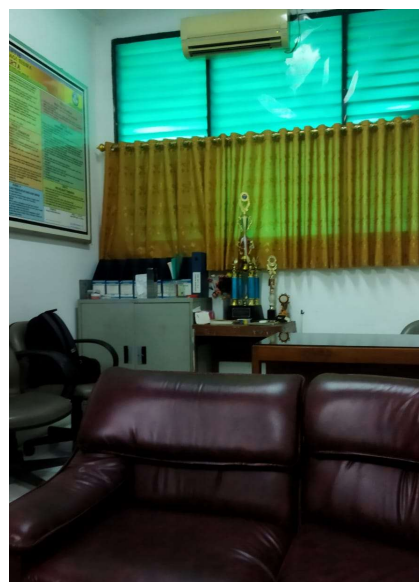
Dokumentasi 20 Lapangan



Dokumentasi 22 Musala dan Tempat Berwudhu



Dokumentasi 23 Pola Layanan



Dokumentasi 24 Ruang BK



Dokumentasi 25 Demo Ekstrakurikuler Angklung



Dokumentasi 26 Ekstrakurikuler Basket

RIWAYAT HIDUP



Rahma Aprilia, lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 2002, penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Ivan Rahman Lea dan Ibu Siti Nur Romlah. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar pada tahun 2008 di SD Negeri 04 Pademangan Timur dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 34 Jakarta dan selesai pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di SMA Negeri 41 Jakarta mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan daya kepada penulis, serta dukungan dari orang tua dan teman-teman sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan berproses untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia hingga akhirnya skripsi dengan judul “Peran Kebijakan Sekolah dalam Mengurangi Tawuran Pelajar (Studi Kasus SMP Negeri 116 Jakarta)” ini dapat diselesaikan.

